



LAPORAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT
ANGKATAN I

BOGOR, 21 S.D. 24 OKTOBER 2024

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN
KONSTITUSI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para kuasa hukum dan advokat mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kegiatan ini dibuka oleh YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh para perwakilan Organisasi Advokat, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	6
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan	7
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN.....	20
E. PENUTUP.....	20
F. LAMPIRAN.....	21



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 4. Bahan Penjelasan Teknis**
- 5. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 6. Panduan Moderator**
- 7. Panduan Narasumber**
- 8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 9. Kumpulan Materi Narasumber**
- 10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 11. Surat Tugas Narasumber**
- 12. Surat Tugas Peserta**
- 13. Daftar Hadir Peserta**
- 14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 15. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 17. Tata Tertib Peserta**
- 18. Data Peserta Registrasi**
- 19. Laporan Keuangan**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi tim hukum Partai Politik sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon atau pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I”.

B.2. Waktu dan Tempat

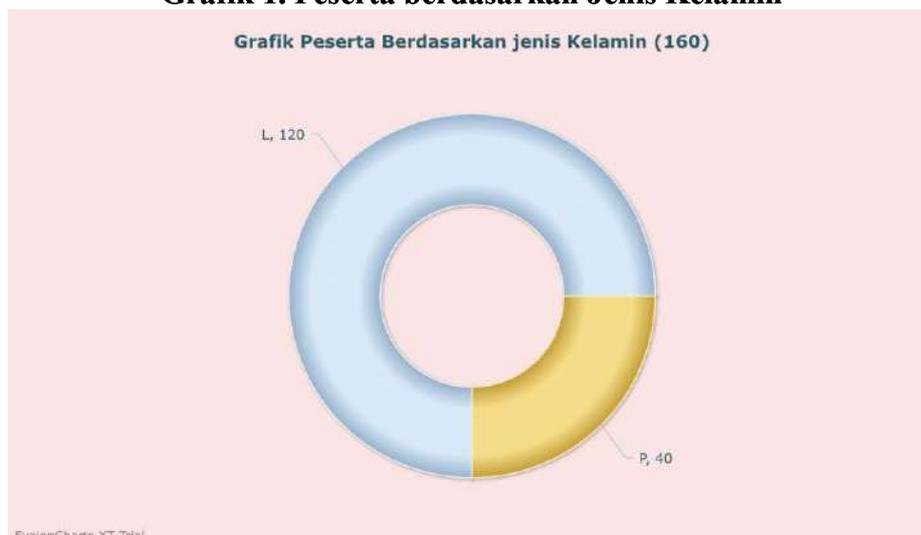
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 160 orang anggota organisasi advokat yang terdiri dari 4 (empat) Organisasi Advokat meliputi Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI), Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia (BPP PERADIN), dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia). Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin

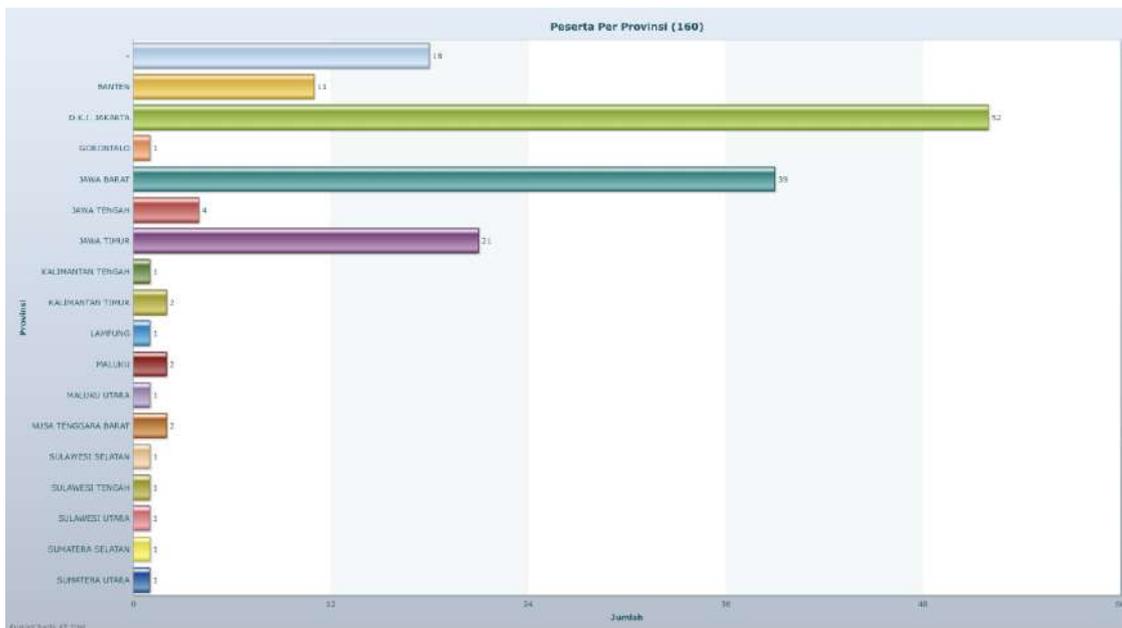


Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



+

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan**B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 21 Oktober 2024 pukul 10.00 – 16.30 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mandiri pada hari Senin, 21 Oktober 2024 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada Senin, 21 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mandiri, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi,



Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan YM Hakim Konstitusi, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Mundiri
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani
3.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Ishak Purnama, S.Kom.	
5.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	1. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 2. Ria Indriyani, S.H., M.H. 3. Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	1. Edwin Aditya Irawan 2. Angga Putri Gardina



NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
		4. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	3. Elin Asrofah Qibtiah 4. Chafid Sugianto
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	1. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 2. Ria Indriyani, S.H., M.H. 3. Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H. 4. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	1. Andy Fahri 2. Edwin Rivano 3. Elin Asrofah Qibtiah 4. Bambang Sukmadi

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Konstitusi dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.



B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 11.00 WIB pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 14,87 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 120 menunjukkan nilai sebesar 1,65765. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,97**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **sudah berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara,



akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,73 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,81 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,79 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,76 dengan kategori Sangat Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,79 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi 3,81 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,80 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta



tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,75 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,76 yang tergolong kategori Sangat Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,67	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,79	Sangat Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,72	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,73	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,72	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,72	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,69	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Elin Asrofah Qibtiah 2. Santhy Kustrihardiani	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,71	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,80	Sangat Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,82	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,80	Sangat Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,78	Sangat Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,80	Sangat Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,79	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,79	Sangat Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,76	Sangat Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,75	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,69	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,72	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	3,56	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,70	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,63	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	3,79	Sangat Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,79	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,79	Sangat Baik
Layanan Keamanan			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	3,81	Sangat Baik
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	3,81	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,81	Sangat Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	3,81	Sangat Baik
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	3,79	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan	3,80	Sangat Baik
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,75	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,76	Sangat Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirkpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,97 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 maka tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,76 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(4+3,76)/2 = 3,88$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,88**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.



Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Ditingkatkan untuk metode pelaksanaan Bimtek supaya lebih informatif dan mampu dipahami oleh peserta.
 - b) Narasumber bisa lebih akomodatif terhadap pertanyaan setiap peserta.
 - c) Seyogyanya sertifikasi tidak hanya dalam bentuk keikutsertaan melainkan sertifikasi keahlian khusus.
 - d) Sisi pemberian *tools* UU dan Peraturan SK hard Copy atau buku.
 - e) Kursi peserta bisa di rubah / di ganti ganti depan belakan setiap perubahan hari.
 - f) Ditingkatkan juga untuk kualitas diskusi yang dilakukan.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Adakan fitness centre adakan ruang perpustakaan adakan televisi di setiap kamar peserta.
 - b) Walaupun peserta sudah mendapat alat mandi sedianya sabun cair tetap ada dalam dispenser yang menempel ditembok sehingga pihak bisa refil saja.
 - c) Shower di kamar 234 graha 5 kurang lancar dan sering tersendat;
 - d) Di setiap kamar sebaiknya di tambah televisi atau di setiap lobby.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 140 orang dari 160 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang lupa mengisi daftar hadir di setiap sesi;
- c) Masih ditemukan peserta yang tidak membawa perangkat komputer laptop untuk kegiatan pembelajaran.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 20 November 2024
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri
NIP. 19690808 199012 1 001



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan dihadiri pimpinan masing-masing organisasi advokat, Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



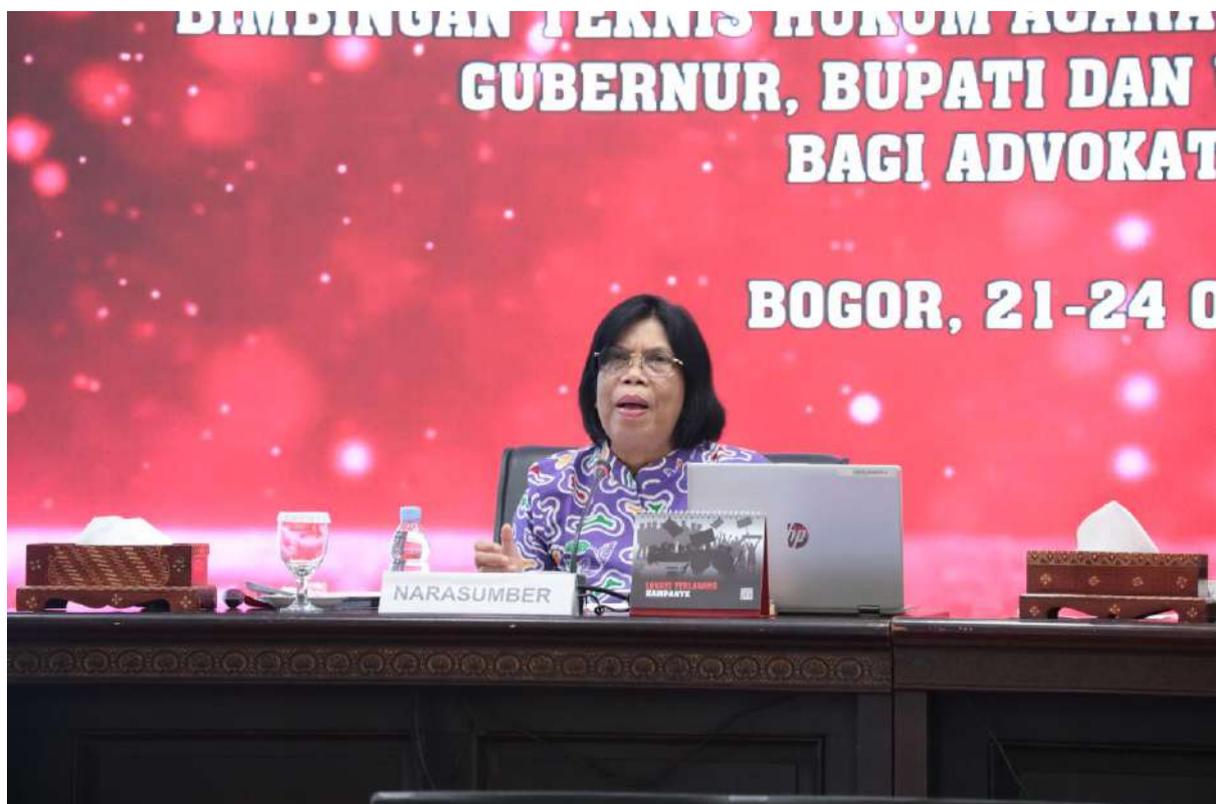
Foto bersama setelah acara pembukaan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 oleh YM Wakil Ketua MK Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 oleh Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. dan Ishak Purnama, S.Kom.



Penyampaian Materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024 dan Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI
ADVOKAT ANGKATAN I

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin,	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Registrasi: Andy Fahri, Suhardi, Edwin Rivano Seminarkit + kamar : Muhlis Nova, Yahya Amarullah	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Mundiri	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Chafid Sugianto	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Saldi Isra M. Guntur Hamzah Moderator : Mundiri	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Fajar Laksono Moderator : Santhy Kustrihardiani	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Ida Ria Tambunan Moderator : Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Aula Grha Konstitusi 3
Selasa,	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Nanda Adityansyah Ishak Purnama	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 17.30 WIB	ISHOMA		
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		
	21.00 WIB	Istirahat		
	KETIGA			

Rabu,	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Rizki Amalia Moderator: Hadian Taofik Rochman	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: 1. Ria Indriyani 2. Dian Chusnul Chatimah 3. Helmi Kasim 4. Bisariyadi Koordinator Praktik: Rizki Amalia Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Angga Putri Gardina 3. Edwin Aditya Irawan 4. Suhardi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: 1. Dian Chusnul Chatimah 2. Ria Indriyani 3. Helmi Kasim 4. Bisariyadi Koordinator Praktik: Rizki Amalia Moderator : 1. Edwin Aditya Irawan 2. Angga Putri Gardina 3. Elin Asrofah Qibtiah 4. Chafid Sugianto	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis,	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: 1. Dian Chusnul Chatimah 2. Ria Indriyani 3. Helmi Kasim 4. Bisariyadi Koordinator Praktik: Rizki Amalia Moderator : 1. Andy Fahri 2. Edwin Rivano 3. Elin Asrofah Qibtiah 4. Bambang Sukmadi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Bogor, 21 s.d. 24 Oktober 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi para anggota organisasi advokat sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang terdiri dari Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Oktober 2024

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	13
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
8. Akomodasi	15
9. Konsumsi	15
10. Pembiayaan	15
11. Lain-lain	16
12. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	35

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
• Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan :
 - S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
 - S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
 - S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
 - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir :
 - Panitera Mahkamah Agung RI
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of
Public Relations
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management
University
- Karir :
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Padjadjaran
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- b. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
- d. Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait tim hukum partai politik dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
Senin, 21 Oktober 2024	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	21.00 WIB	Istirahat
Selasa, 22 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
	15.00 – 17.30 WIB	ISHOMA
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam
Rabu, 23 Oktober 2024	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan
	21.00 WIB	Istirahat
Kamis, 24 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 orang meliputi terdiri dari Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan Pemohon f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		<ul style="list-style-type: none"> h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan 	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>) 	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024; c. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait; g. Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait. 	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
	dan Keterangan Pihak Terkait		

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta kegiatan.
- c. Peserta tidak mendapatkan uang saku selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- **Media Offline:**
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- **Media Online (*pusdik.mkri.id*)**
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

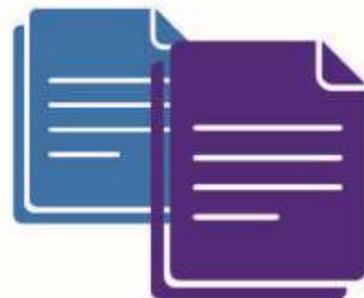
1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Mundiri, S.E., M.A.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.I.P., M.Si.

Kepala Bagian Umum



Santi Widiastuti, A.Md

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Medi Kurniadi, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi,

ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **Pusdik_MK**, *password*: **pusdikmkri9**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **GK3_PUSDIKLAT**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi
Advokat Angkatan I

Senin, 21 Oktober 2024





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PANCASILA

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



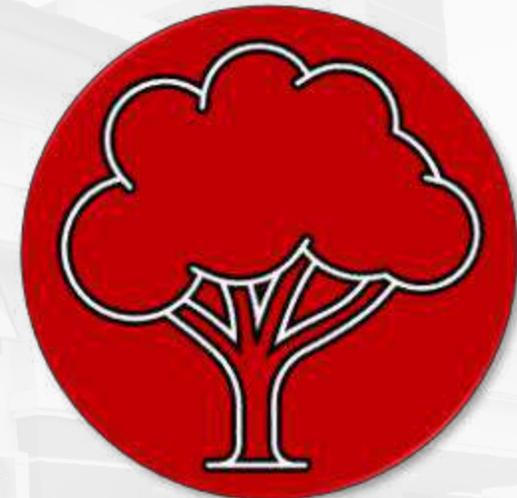
Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



**Pohon
Saran**

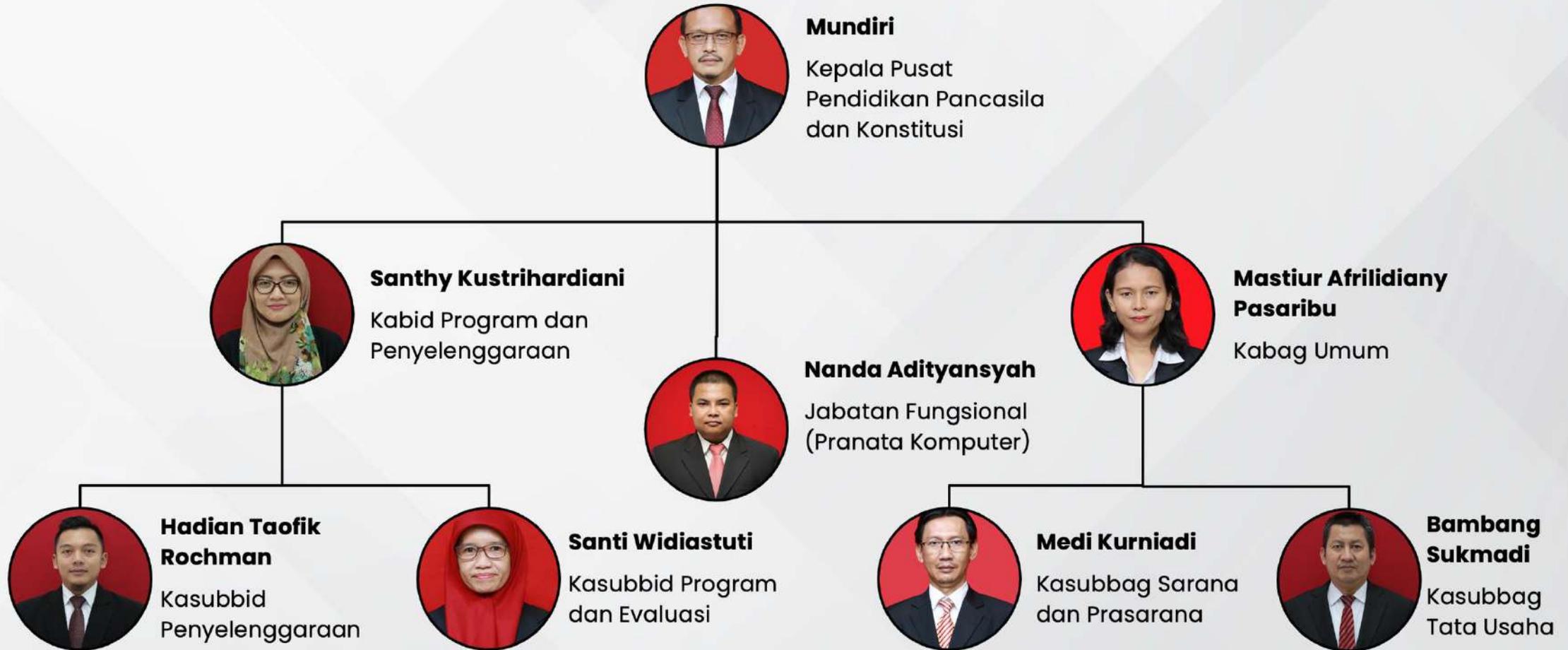


Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Chafid Sugianto



Edwin Aditya Irawan



Angga Putri Gardina



Muhlis Nova



Suhardi



Andy Fahri



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN BAGI ADVOKAT I

Hukum Acara
Perselisihan Hasil
Pemilihan
Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota

Dinamika Penanganan
Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota

Mekanisme, Tahapan
dan Jadwal
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota

Pemanfaatan
Teknologi dan
Informasi dalam
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota

Teknik Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan
Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota

Praktik Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota

Evaluasi Hasil Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
21 s.d. 24 Oktober 2024
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 21 Oktober 2024	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta dan Check In
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Wakil Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Narasumber: YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 22 Oktober 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Narasumber: Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan – Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik di MK Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.30 – 17.30 WIB	ISHOMA
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 23 Oktober 2024	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi Ahli Madya
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutn Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	Istirahat
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan / Pentas Seni

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 24 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang para anggota organisasi advokat meliputi: PERADI SAI, PERHAKHI, BPN PERADIN, DPN Indonesia.
- ✓ Membawa Surat Tugas untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- ✓ Peserta **wajib membawa laptop** untuk keperluan kegiatan pembelajaran selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan *Pre-Test* dan *Post-Test* secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta kegiatan.
- ❖ Peserta tidak mendapatkan uang saku selama kegiatan.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

PANCA SILA & KONSTITUSI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmkri9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 160 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang

Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



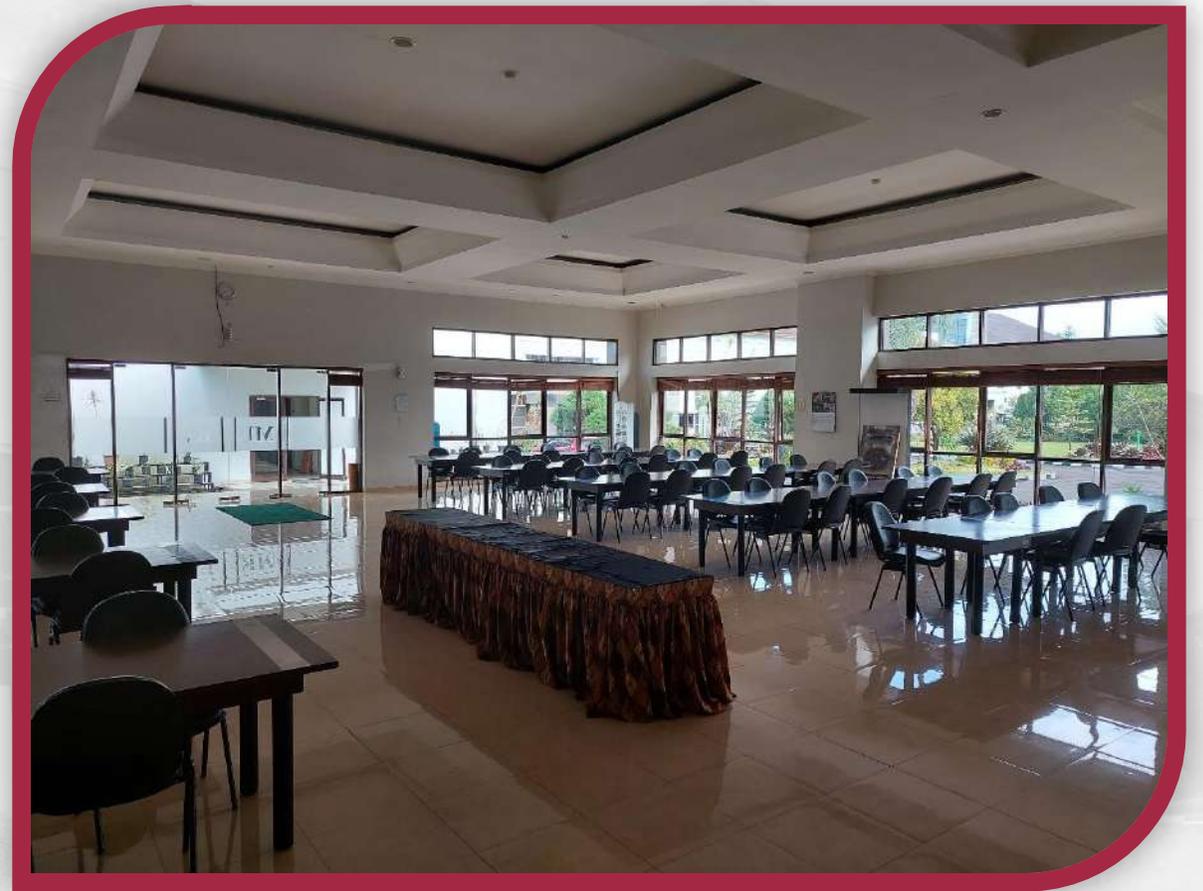
Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

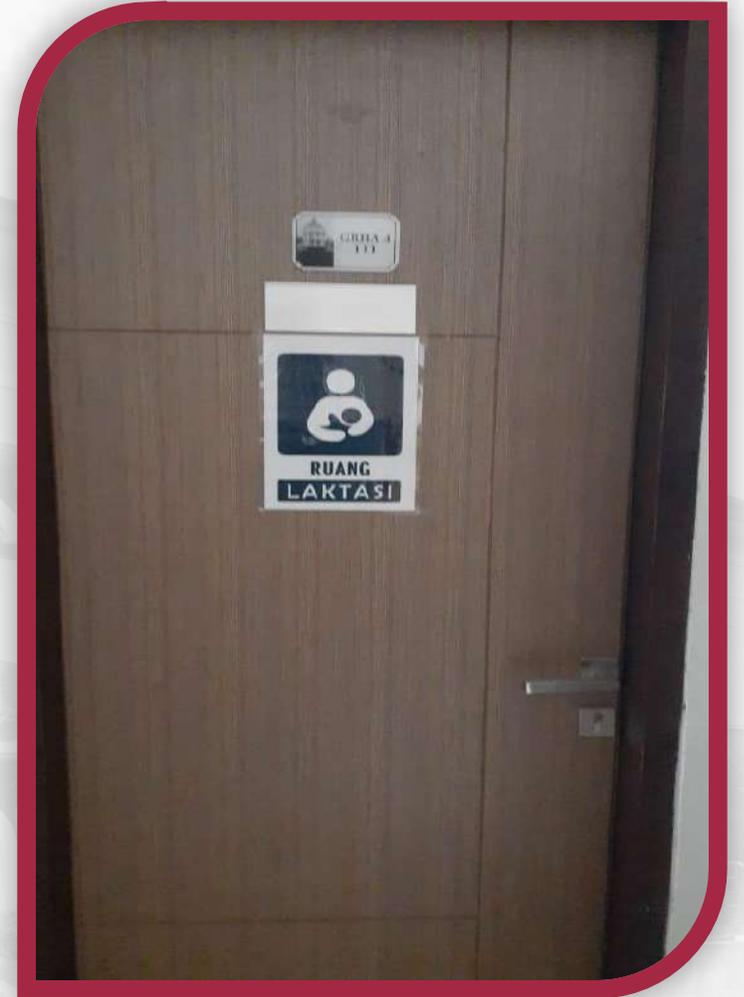
Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmkri9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular inset image. A green button is visible on the left side of the main content area.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

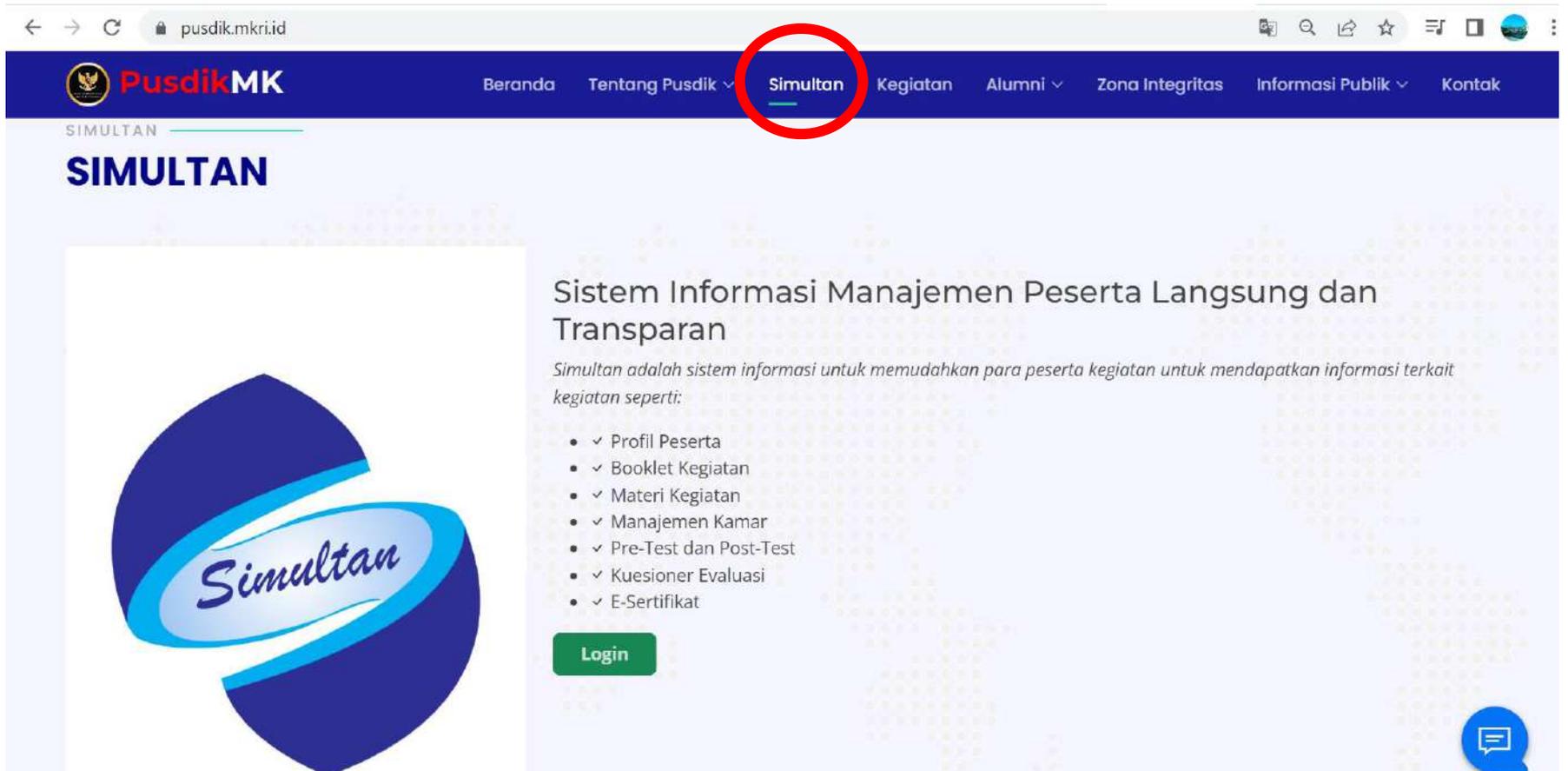
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

[Chat](#)

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

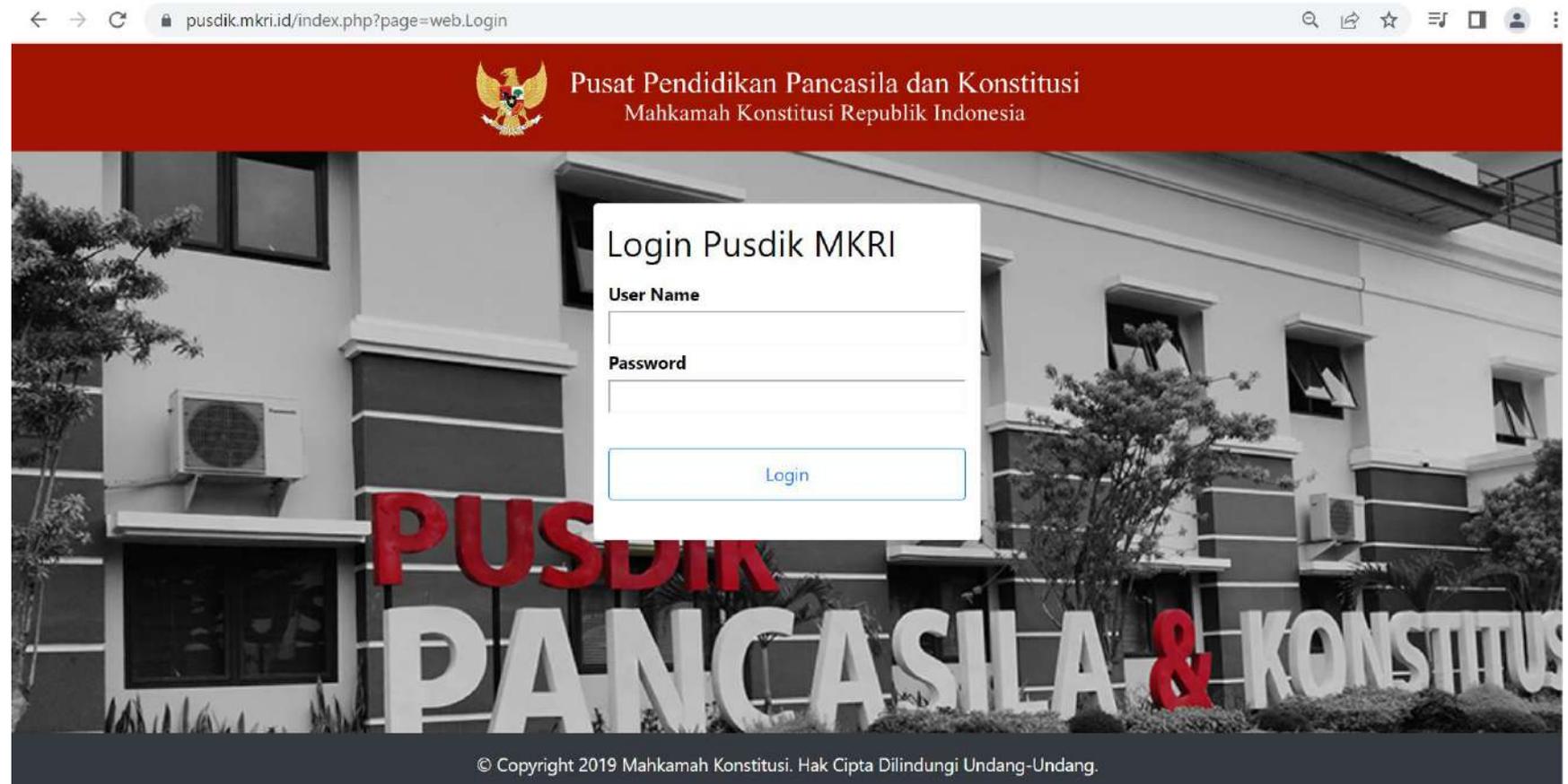
Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ 🔒 pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	:Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Dicetak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Setriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No.	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

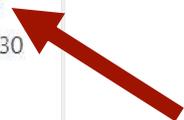
*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	:	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...
- Badan Pengawas Pemilu
 - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 - Komisi Pemilihan Umum
 - Mahkamah Konstitusi
 - Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah..

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatn untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatn untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024**

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	40	3,64	Materi yang disuguhkan seharusnya di tambaj alat pelengkap di atas meja Materi ditambahi dari pemandu
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Baik Baik
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah cukup baik
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Kalau Bisa Ketua MK langsung yang hadir. Biar tambah semangat
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	lebih ditingkatkan lagi yang sudah baik
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sudah sangat baik
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	saran, agar lebih interaktif kepada peserta.
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	penjelasan cukup baik dan mudah dipahami perlu diberikan contoh2 kasus , baik yg dialami Pemohon, Termohon atau pihak terkait
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	dimohon diselenggarakan bimbingan teknis begini bisa diselenggarakan di tiap-tiap wilayah atau daerah agar banyak advokat yang memahami teknis hukum acara perselisihan pemilihan akan lebih baik jika banyak advokat diwilayah atau daerah yang memahami teknis hukum hasil pilkada
15	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	Bimbingan Teknis oleh MK sebaiknya selalu dilaksanakan lebih awal sebelum dekat ke waktu pilkada seperti saat ini, agar persiapan dilapangan lebih leluasa waktunya .
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	Sesi tanya jawab lebih panjang Sertai contoh2 bukti yang kuat dan tidak kuat
19	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	Saran. Ada Materi contoh Kasus dalam Sengketa Pilkada Gubernur
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada
21	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	PERTAHANKAN KARENA SUDAH CUKUP BAIK DAN JELAS
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	materinya kalau bisa di tambah waktunya sudah sangat baik
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	41	3,73	terlalu cepat dan singkat dalam penyampaian materi, yangmana materi seperti ini semestinya durasi lebih lama karena merupakan materi pokok yang semestinya kami sebagai Advokat benar-benar memahami untuk materi penting seperti ini seharusnya diberi durasi yang lebih lama
28	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	37	3,36	
29	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	meja peserta kurang lebar klo untuk dua orang
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	tetap konsisten melakukan kegiatan serupa
32	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40	3,64	Tetap konsisten dalam memberikan pembelajaran dan mungkin sesi pembelajarannya bisa lebih diperpanjang waktunya. Terima Kasih
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Agar dapat dipertahankan dalam memberikan pelayan maupun pemahaman terhadap peserta pusdiklat Dalam perbaikan selalu tingkatkan pelayanan terbaik untuk peserta pusdiklat
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mantappp pemaparan dan pembahasannya
35	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	38	3,45	Waktunya kurang, karena sharing pengalaman dari Hakim Konstitusi sangat berharga buat kami.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
36	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	sudah cukup baik pertahankan dan terus tingkatkan !
37	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,00	Untuk perselisihan perbedaan jumlah suara seharusnya waktu penyelesaian diberikan lebih lama mengingat memeriksa bukti formal perlu waktu yg cukup banyak. MK harus mengutamakan sila pertama Pancasila secara menyeluruh. Contoh Masjid tempat ibadah harusnya diutamakan, jangan ditaruh di belakang.
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	tidak ada tidak ada
41	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	41	3,73	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Agar lebih di tingkatkan lagi materi dan kualitas jawab menjawabnya
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok ok
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
48	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	sangat menyenangkan sehingga waktu yang sudah cukup pun dirasa masih kurang, semoga kedepannya bisa datang lagi dalam kegiatan serupa
52	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	35	3,18	PESERTA YANG IKUT DIKLAT HARUS DI PERTIMBANGKAN UNTUK BISA MASUK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI MASING-MASING DAERAH SESUAI DOMISILI DAN SEGBAI LAW GOVERMENT DAERAH DAN ATAS DASAR REFERENSI DARI MK
53	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mohon agar kualitas pelayanan di semua sektor dan sesi kegiatan dipertahankan dan semakin ditingkatkan sesuai kemampuan anggaran apbn mkri di setiap tahun anggarannya
55	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	39	3,55	Baik Baik
56	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	37	3,36	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat jelas penjelasannya sangat jelas penjelasannya
58	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	39	3,55	
59	3	4	4	3	4	4	4	2	2	4	4	4	38	3,45	Membuat bahan materi yang lebih komperhensif dengan disertai dasar-dasar yang lebih komperhensif Membuat bahan materi yang lebih komperhensif dengan disertai dasar-dasar yang lebih komperhensif
60	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	35	3,18	lebih ditingkatkan lagi dalam penyampaian materinya supaya peserta lebih memahami lagi
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
62	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	35	3,18	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	36	3,27	
65	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	38	3,45	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mudah dimengerti dalam pemberian materi
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
69	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	38	3,45	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	Materi yang diberikan oleh kedua Profesor (Yang Mulia) Hakim Konstitusi sungguh luar biasa memberikan ilmu kepada kami selaku peserta, sehingga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi sangat berguna bagi kami. Tetap menjadi program yang terbaik
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	agar dipertahankan kukuualitasnya agar selalu ada inovasi sesuai perkembangan hukum

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
75	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	41	3,73	Pertahankan semangat
76	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	40	3,64	pada saat penyampaian materi hendaknya banyak variasi sifatnya mengajak peserta selalu semangat dlm mengikuti pengajaran materi sampai akhir
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat baik, nyaman
80	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	40	3,64	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat bagus
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	saya mengucapkan terima kasih kepada pemaeri yang sudah menyajikan materi dengan baik dan saya sangat mengeti dengan materi dimaksud.
87	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	saran kedepan ada hukum acara yang menentukan advokat yang boleh beracara ke depan harus py sertifikat bimtek pusdik mkri ndidkan di pusdik harus diadakan terus kepada semua advokat supaya tidak ada lagi advokat yg beracara di mkri yag tidak mengerti dan memahami hukum tentang penyusunan permohonan, hukum acara di mk sehingga pada gilirannya akan membantu majelis hakim mk untuk menyelesaikan sengketa pilkada
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	lebih disosialisasikan lagi
89	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	40	3,64	Diklat/Bimtek yg demikian hendaknya di waktu mendatang bisa diperlebar terkait penanaman jiwa pancasila pd advocad.
90	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	38	3,45	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Ke depannya diskusi bisa dibuat lebih interaktif dan kesempatan mengajukan pertanyaan bisa diberikan waktu lebih lama dikarenakan ada pertanyaan yang sifatnya bagi kami penting namun tidak terjawab sampai hari terakhir pelaksanaan bimtek
92	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	Kesempatan bertanya kepada Peserta ke depan supaya diberikan durasi yang lebih lama sehingga apabila ada pertanyaan yang sifatnya penting dapat terjawab
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3,73	Luar biasa
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat baik sistem matis
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	luar biasa
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	BAIK
100	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	39	3,55	
101	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	38	3,45	untuk peserta dalam satu ruangan terlalu banyak untuk peserta yang berada di bagian belakang banayak materi yg tidak difahami disebabkan suara tidak begitu jelas,untuk saran itu saja,untuk lainnya sudah sangat baik terimakasih untuk itu kami ucapkan
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat Istimewa
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sudah baik Sudah baik
105	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3,09	Tingkatkan terus kualitas ditahun yang akan datang Mutu akomodasi ditingkatkan
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
109	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	38	3,45	
110	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	36	3,27	lebih banyak waktu interaksi dengan peserta
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat jelas dan bagus sekali

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Appreciated.
	3,70	3,72	3,73	3,78	3,63	3,62	3,71	3,70	3,57	3,71	3,74			3,69	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024**

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	tingkatkan yang lebih baik tingkatkan yang lebih baik
5	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	38	3,45	
6	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	39	3,55	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
8	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	Agar dapat diberikan contoh2 kasus kasus PHPU yg aktaul dan faktual
9	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sejauh ini sudah cukup baik sejauh ini semuanya sudah cukup baik
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sejauh ini sudah cukup baik sejauh ini semuanya sudah cukup baik
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sejauh ini sudah cukup baik sejauh ini semuanya sudah cukup baik
13	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	40	3,64	
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	ditingkatkan lagi kualitas materinya
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34	3,09	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Agar lebih ditingkatkan lagi materi yg dipaparkan Agar mengenai tanya jawab diberikan kesempatan luang yang panjang
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok ok
22	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3,73	- -
23	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3,73	
24	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	3,27	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	PENYELENGARA LUAR BIASA SEMOGA DISELENGARAKAN LEBIH MATANG LAGI AGAR ADVOKAT LEBIH MEMAHAMI HUKUM ACARA PERSELISIHAN PILKADA
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
30	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	41	3,73	materinya dan narasumber sudah sangat baik semoga ke depannya lebih tambah baik lebih di utamakan dalam diskusi nya lebih panjang
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mungkin kedepannya agak di tambah sesi tanya jawabnya
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	akan lebih kena jika materi ini disajikan dihari pertama bimbingan
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
35	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	Waktu penyajian agar di tambah -
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	konsisten melakukan kegiatan serupa
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
38	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	37	3,36	Semoga sesi pematieran bisa lebih panjang waktunya
39	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mohon agar diperhatikan yang berhubungan dengan per snack kan pada saat break terkadang tidak kebagian karena habis semoga pelayanan nya semakin baik ..bravo m k
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	42	3,82	
45	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	lebih ditingkatkan lagi penyampian materinya

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
47	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	36	3,27	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
49	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	37	3,36	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	good
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Bagus
52	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	35	3,18	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tiap-tiap undang-undang maupun PMK dan putusan yg di sebut dalam materi sekaligus dicantumkan link-nya
54	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	penjelasan sangat jelas hanya waktu untuk bertanya kurang
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	tidak ada tidak ada
58	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	39	3,55	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat memberikan edukasi kepada kami dan sangat bermanfaat
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah sangat baik Perla peningkatan
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	tetap dipertahakan
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	34	3,09	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
68	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	jaya selalu buat MKRI istimewa
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat membantu
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	semangat, untuk terus memberikan yang terbaik.
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
76	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	35	3,18	agar sepulang dari diklat di beri buku hardcopy materinya
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mantap
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
80	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	39	3,55	Diskusi sudah berjalan dengan baik namun ke depannya pertanyaan dari peserta untuk dapatnya dijawab secara keseluruhan karena kemarin ada pertanyaan yang tertinggal dan tidak terjawab sampai akhir sesi
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah baik, tetapi mohon semua pertanyaan untuk dijawab ke depannya
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
83	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	40	3,64	penyampaian materi kurang fariatip
84	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
86	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
87	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	42	3,82	
88	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	saran dan perbaiki ansh pada makanan agar ditingkatkan kualitasnya yang bergisi gitu biar sehat kita yang ikut bimtek
89	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	41	3,73	sangat baik sistematis
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	luar biasa
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	40	3,64	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	BAIK
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
96	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	38	3,45	semua yang sudah disajikan baik narasumber, pemaparan menurut hemat kami sudah sangat baik jika saran yang bisa kami sampaikan kiranya untuk peserta tidak terlalu banyak dalam satu ruangan agar peserta yg berada pada posisi paling belakang dapat mendengarkan arahan dari narasumber atau pemapar dapat jelas terdengar, tidak lupa kami sebagai peserta mengucapkan banyak terima kasih baik ilmunya dan pelayanannya sudah sangat luar biasa
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
102	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	42	3,82	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
107	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
	3,70	3,64	3,67	3,67	3,67	3,74	3,73	3,68	3,63	3,67	3,72			3,68	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3,36	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	39	3,55	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	materi sangat baik ,pemaparan cukup jelas Penjelasan nya mhn lbh rinci lagi , tm ksh
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	supaya kedepannya ditingkatkan lagi tentang pemaparan materi dan tanya jawab
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Cukup baik Cukup baik tingkatkan untuk lebih baik lagi
12	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	40	3,64	Mudah dimengerti untuk narasumbernya
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Good
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
15	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	39	3,55	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	suaranya keras, MANTAP KEREN
17	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	good
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok ok
19	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	sudah cukup baik sudah cukup baik
20	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
22	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
23	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	38	3,45	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	materi ini sangat bermanfaat dan menjadi suplemen untuk menambah pengetahuan dan wawasan bravomkri
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	penjelasan sangat baik hanya waktu sangat kurang
30	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	41	3,73	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	efisiensi waktu pemaparan dengan tanya jawab perlu ditingkatkan
34	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	38	3,45	
35	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	Materi yang diberikan sangat penting kala nanti kita masuk pada pelaksanaan teknis pengajuan dokumen persidangan, baik pada posisi sebagai PEMOHON, TERMOHON, maupun sebagai TERKAIT. Sehingga kami sangat membutuhkan ilmu itu untuk mendukung kami dalam berproses dalam beracara di Mahkamah Konsitusi. Kami sangat berterima kasih. Lanjutkan!!!!!!
36	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	39	3,55	atas dasar hasil diskusi ini yang cukup komunikatif ,agar ada komunikasi antara DPR dengan Yudikatif sebagai pelaksana Undang Undang perbaikan Undang Undang dengan aturan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Kurang waktu saja penjabaran dan tanya jawab hukum acara
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
43	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	39	3,55	Tetap semangat terimakasih atas ilmu baru buatku Pengalaman prtama

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah Sangat baik Perla dipertahankan
45	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	39	3,55	sebaiknya pada saat menyampaikan materi tidak terpaku dalam satu tempat, artinya bisa sambil berdiri tidak monoton duduk agar bisa menatap para peserta agar lebih semangat
46	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
47	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	32	2,91	lebih ditingkatkan lagi
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	tetap dipertahankan
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
51	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	36	3,27	
52	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	35	3,18	
53	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Baik penyanyiannya dan mudah dipahami.... Dipertahankan
55	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	39	3,55	Semoga bisa lebih tepat dalam mempergunakan waktu Mohon dalam memberikan penjelasan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Terima kasih.
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	tidak ada tidak ada
58	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Informatif
61	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	38	3,45	- -
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3,09	
64	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	41	3,73	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
66	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Bagus
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	oke
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Penjelasan dari pemateri sudah baik yang perlu ditingkatkan untuk durasi waktu supaya bisa lebih maksimal dalam penjelasannya
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sudah baik dan dapat dimengerti hanya durasi yang kurang
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
78	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	35	3,18	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	Bisa lebih antraktif dan interaktif
81	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	41	3,73	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	34	3,09	- -
83	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	39	3,55	pas
84	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	41	3,73	sangat baik sisematis
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	luar biasa
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	lebih ditingkatkan lagi
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	BAIK
90	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
93	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	36	3,27	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
96	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	38	3,45	untuk pemapar kami berharap dalam memberikan materi supaya tidak terburu buru sebab banyak dari peserta tidak begitu faham sebab materi yang diberikan terkesan terburu buru juga sebagai bahan pertimbangan banyak dari kami yang gagap teknologi sehingga terlambat untuk memahami hal hal yang disampaikan pemapar yg terburu buru disampaikan
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
99	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
100	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	38	3,45	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
101	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	36	3,27	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	interaksi tanya jawab diperbanyak
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
106	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	40	3,64	
	3,65	3,64	3,58	3,57	3,66	3,62	3,68	3,73	3,63	3,69	3,71			3,65	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024**

Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. & Ishak Pumama, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	36	3,27	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	cukup baik cukup baik
8	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	agar sistemnya ditingkatkan kualitasnya agar selalu up
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mantap
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	istimewa istimewa
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	good
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lebih di tingkatkan lagi untuk kuis nya jawab dan mate
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sangat bermanfaat
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	lebih ditingkatkan lagi
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	34	3,09	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok ok
18	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	41	3,73	Ide yang Bagus Bp Nanda untuk membangun semang
19	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	37	3,36	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	.
21	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
22	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	42	3,82	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	dalam rangka pelayanan yang prima
24	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	40	3,64	
25	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	38	3,45	Semoga bisa tetap konsisten bahkan lebih lagi
26	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	terlalu cepat menjelaskannya, pas juga jam nya jam rav
29	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
31	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	materi yg bagus dan befrmanfaat harus lbh banyak pra
32	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	31	2,82	lebih ditinkatkan lagi dalam penyampaian materi
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Terlalu cepat penyampaian oleh pak Ishak Pumama. A
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat bagus semua sudah bagus sekali
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah sangat jelas
41	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Cukup menarik apa yang disampaikan oleh kedua pem
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
47	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	40	3,64	- -
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43	3,91	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat Bagus
53	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	35	3,18	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	tidak ada tidak ada
58	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	36	3,27	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sangat bagus memberikan ice breaking dengan hadiah

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	oke
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Cukup baik Cukup baik
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3,73	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Penjelasan yang diberikan sudah baik tetapi masih bel
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Penjelasan tentang simpel MKRI durasinya sangat pen
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Isi Quesinair thd. Prof Saldi Isra, S. H. dan Prof. Dr. Gu
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	37	3,36	
72	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	39	3,55	penayangan slide tulisan terlalu kecil untuk penyimaka
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	39	3,55	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	43	3,91	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	pas
79	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	41	3,73	sangat baik sistematis
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	luar biasa
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	BAIK
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
86	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	39	3,55	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	35	3,18	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	40	3,64	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Waktunya kurang lama
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	38	3,45	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
101	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	40	3,64	
	3,63	3,62	3,64	3,63	3,66	3,61	3,65	3,65	3,63	3,66	3,71			3,65	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024**

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	37	3,36	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Cukup baik Cukup baik dan tingkatkan untuk lebih baik
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	agar peserta selalu bersemangat pemberi materi hendaknya dalam penyampaiannya tidak monoton duduk bisa berdiri atau bahkan menyapa peserta dalam jarak dekat
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materi komplit
9	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	materi yg disampaikan cukup jelas
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	39	3,55	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lebih ditingkatkan lagi pembelajaran materi yang diberikan
21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
22	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat Bagus
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	36	3,27	semua cukup baik semua cukup baik
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah bagus sudah bagus
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok ok
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	materi tersebut sangat membantu kami sebagai advokat dan bisa kami pergunakan dlm praktek beracara di phpkada bravo mkri
33	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	35	3,18	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Ilmu yang sangat berguna dari Ibu Rizki Amalia Terima kasih kami ucapkan MK makin hebat dan maju terus
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Bagus
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah sangat bagus agar lebih ditingkatkan
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Penyanyiannya baik dan menarik kiranya dapat dipertahankan. Terima kasih untuk materinya yang sangat bermanfaat bagi kami.
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah sangat jelas
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	oke
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
48	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3,82	- -
49	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sudah baik
52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mohon ke depan durasi waktu penjelasan untuk ditambah
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
55	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
56	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	41	3,73	Semoga tetap konsisten bahkan menjadi lebih baik lagi
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	37	3,36	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	good
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	40	3,64	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
66	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	37	3,36	- -
67	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	39	3,55	pas
68	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40	3,64	sangat baik sistematis
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	luar biasa
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	BAIK
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ditingkatkan lagi
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat istimewa pelatihannya terimakasih Untuk DPN Indonesia berkenan untuk 100 peserta kedepan
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	kereeen dan luar biasa
78	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	37	3,36	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	terlalu cepat dalam menjelaskan materi
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
83	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	38	3,45	kalaupun bisa di tiap kamar peserta di berikan tv supaya bisa dalam beristirahat sambil nonton tv
84	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	38	3,45	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
85	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	37	3,36	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sukses selalu MKRI Terimakasih ilmu barunya
88	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3,09	sesi tanya jawab ditambah waktunya
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	tidak ada tidak ada
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	37	3,36	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
94	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	39	3,55	
	3,68	3,61	3,66	3,62	3,66	3,61	3,65	3,70	3,64	3,72	3,69			3,66	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024

Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Good Good
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	37	3,36	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Ok gamblang
11	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	41	3,73	penyampaian materi jangan terlalu cepat
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	cukup baik tingkatkan pelayanan yang lebih baik
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	41	3,73	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mencerdaskan peserta, sangat baik agar lebih ditingkatkan kualitas dan kualifikasinya
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
21	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	39	3,55	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	materi cukup clear dan dapat dipahami dgn baik, terima kasih
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat Bagus
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
31	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	40	3,64	- -
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
33	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	37	3,36	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	good
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
36	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
37	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	sangat baik lebih ditingkatkan lagi penyajian pemaparan materi
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Penjelasan sudah baik dan bisa diterima dengan baik, mungkin pendampingan terhadap peserta ditingkatkan dengan sebelum pengerjaan awal ada penjelasan dari pemateri serta diikuti oleh seluruh peserta
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah sangat jelas an komunikatif
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Penjelasan sudah baik tetapi alangkah lebih baiknya sebelum penyusunan ada praktik secara bersama-sama antara pemateri dan peserta sehingga lebih bisa dipahami, serta saya sarankan hukum itu ada untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat bukan mempersulit masyarakat untuk mencari keadilan
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	42	3,82	
44	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	terima kasih atas review hasil praktek yg telah dilaksanakan pada hari sebelumnya rabu 23 desember 2024
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
47	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
49	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	38	3,45	pas
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	42	3,82	sangat baik sistematis
53	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	35	3,18	
54	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	39	3,55	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	BAIK
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Udh bagus smua
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terima kasih Ibu Ria sudah sabar, dan tabah menghadapi kelas 2. semoga para panitia selal dalam keadaan sehat. aamiinn
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ditingkatkan lagi
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
65	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	saya berharap setiap ada PMK yang seyogyanya subtansial dalam sidang di mahkamah Konstitusi, untuk di publikasikan lewat ofline maupun online evaluasi setiap persidangan itu lebih baik daripada mempertahankan aturan
67	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	40	3,64	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Program yang sangat bagus dan berguna, semoga senantiasa memberikan kebaikan bagi kita semua para peserta BIMTEK. BRAVO Pusdik Pancasila dan Konstitusi
69	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	39	3,55	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43	3,91	
75	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	38	3,45	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Jaya terus MKRI Terimakasih atas ilmu barunya
78	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	36	3,27	sesi tanya jawab ditambah waktunya
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	tidak ada tidak ada
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	41	3,73	
85	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	39	3,55	
	3,71	3,68	3,66	3,74	3,66	3,73	3,72	3,69	3,73	3,74	3,71			3,71	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024**

Ria Indriyani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	34	3,09	
6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	37	3,36	- -
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	terimakasih bu ria, penjelasan dan pembimbingan untuk praktiknya sangat baik
	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,86	3,71	3,71	3,86	3,86			3,75	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024

Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	38	3,45	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	oke
3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	35	3,18	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok ok
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
	3,63	3,75	3,75	3,63	3,75	3,63	3,75	3,75	3,75	3,75	3,63			3,70	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024

Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pengajaran sudah sangat baik, semoga bisa tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Terima kasih
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Waktu evaluasi kurang lama
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67			3,67	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR	
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Iida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
2	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Iida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	4	10	4	3	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	78	3,71	sangat rama dan fasilitas baik fasilitas kamar yang bersih kebersihan	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Mastur Afrilidiany Pasaribu	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
5	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	70	3,33		
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Iida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	terimakasih buat MKRI atas ilmu barunya sukses slalu buat MKRI sangat brmanfaat	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	good	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mantapppp kegiatannya dan sangat baik pelayanan Tim Pusdik MKRI, sukses terus utk Pusdik MKRI	
9	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	3	4	3	10	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62		
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Iida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00		
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	semakin sering mengadakan kegiatan bimtek	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Ishah Pumama, S.Kom.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Food Hygiene kurang diperhatikan: Masih ada kucing masuk ke ruang makan saat jam makan. Mohon perbaikan.	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	adakan fitness centre adakan ruang perpustakaan adakan televisi di setiap kamar peserta	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	adanya pasilitas smoking area karena banyak puntung rikok dimana mana jadi area kusus buar para perokok ruang makan kerapihan seetelah peseta makan dirapihkan lagi biar ditingkatkan	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
17	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	70	3,33		
18	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	70	3,33	Peserta dikasih uang saku	
19	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	70	3,33	Peserta dikasih uang saku	
20	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	konsisten melakukan kegiatan serupa	
21	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	70	3,33	Peserta dikasih uang saku	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	AGAR DIPERTAHANKAN DAN DITINGKATKAN KUALITASNYA AGAR ADA AKSES DAN FASILITAS LAIN AGAR ADA KEMAJUAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Berkenan Untuk DPN Indonesia dapat mengikuti semua kegiatan Bimtek di MK terimakasih	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Shower di kamar 234 graha 5 kurang lancar dan sering tersendat, mohon dapat jadi perhatian untuk penyajian materi serta narsum sudah sangat bagus, mohon dapat di pertahankan	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	1	3	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81		
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
27	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	3	7	81	3,86	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Cukup baik Cukup baik Cukup baik	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sangat bermanfaat dan semua fasilitas sangat baik terima kasih untuk seluruh panitia MK	
30	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	perlunya di tingkatkan lagi mutu dalam proses membenkan materi terkait sarana komunikasi, sehingga dapat lebih di dengar dan di cematati materi-materi yang di benkan oleh pemerati dan dapat di terima baik oleh para peserta	
31	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	---	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
32	3	4	4	11	3	4	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
33	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sangat Bagus sangat bagus sangat bagus
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	adakan ruang perpustakaan adakan fitness center sediakan sepeda untuk peserta adakan televisi di setiap kamar peserta buat video tutorial terutama mengenai mekanisme berperkara dan tatacara berperkara dan setiap peserta menerimanya dan dipastikan peserta faham atau tidak
36	3	4	4	11	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	semoga MKRI makin semangat membeikan edukasi buat setiap orang berkepentingan dengan MKRI khusus Pilpres dan Pilkada kata pak nanda yang mimpin oleh raga selepram lokal diganti aja sama arti lokal heheh
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
38	2	3	2	7	3	2	2	7	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	2	2	4	3	3	6	3	3	6	2	3	5	54	2,57	Lebih ditingkatkan untuk metode pelaksanaan bimtek Mahkamah Konstitusi bisa memberikan ruang kepada peserta Bimtek bukan hanya mendapat sertifikat peserta melainkan sertifikasi khusus Ditingkatkan juga untuk kualitas diskusi yang dilakukan
39	3	3	3	9	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	77	3,67	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	1	1	2	4	3	7	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Tolong makan siangnya jangan terlalu asin
42	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Semoga bisa konsisten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran Mungkin dalam masakan bisa lebih diperbaiki rasanya. Terimakasih
43	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi selama pembelajaran dari tgl 21 s/d 24 Oktober 2024 (4 HARI) membuat saya menambah ilmu dan pengalaman yang baik. Luar biasa pokonya pengalaman ini.
44	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	2	2	3	7	3	2	5	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	58	2,76	Ditingkatkan untuk metode pelaksanaan Bimtek supaya lebih informatif dan mampu dipahami oleh peserta Narasumber bisa lebih akomodatif terhadap pertanyaan setiap peserta seyogyanya sertifikasi tidak hanya dalam bentuk keikutsertaan melainkan sertifikasi keahlian khusus
45	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	2	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
46	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	4	7	4	4	8	71	3,38	Dikamar hotel tidak ada tv jadi tertunda nonton bola. secara umum sudah sangat baik. dan kedepannya bisa di tingkatkan dari sisi pemberian tools UU dan Peraturan SK hard Copy atau buku Kursi peserta bisa di rubah / di ganti ganti depan belakan setiap perubahan hari.
47	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	sangat luar biasa kegiatannya, semoga bisa kembali mengikuti setiap acara diklat yang lainnya disini
48	3	4	4	11	4	4	3	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	3	4	4	11	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	0	3	4	4	8	75	3,57	Pertahankan pelayanan yg sdh baik
49	4	4	4	12	3	4	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	0	3	3	74	3,52	1.Gizi makanan lebih ditambah lagi 2.modul hard copy setiap materi waji diberi Uang Saku
50	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	HAMPIR SEMPURNA WAKTU OLAH RAGA DITAMBAH SEHARI
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	HAMPIR SEMPURNA WAKTU OLAH RAGA DITAMBAH SEHARI
52	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	3	7	4	4	8	74	3,52	
53	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kegiatan ini lebih disosialisasikan lagi
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kegiatan ini lebih disosialisasikan lagi

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
56	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Agar kualitas makanan ditingkatkan mengingat terdapat beberapa cemilan yang kesannya sudah diolah berulang, sehingga tampak tidak fresh, untuk makanan berkuah agar dalam posisi dipanaskan, sehingga tidak dingin. - -
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
58	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mastiur Afrildiani Pasaribu	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	2	6	2	4	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Mohon ditingkatkan pemeliharaan gedung terutama di toilet pria lantai 1 Gedung diklat
60	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	fasilitas sangat baik dan peserta merasa banak bermanfaat materi waktu di tambah
61	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
62	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	72	3,43	Sil menjaga dan mempertahankan yg sudah sangat baik
63	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
64	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
66	4	4	4	12	4	4	4	12	Ishak Purnama, S.Kom.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
67	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
69	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
70	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
71	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
72	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	kegiatan BIMTEK ini lebih ditigkatkan lagi supaya yang sudah bagus bisa di pertahankan sesuai yang sudah terlaksana sudah bagus semua
73	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terima kasih buat MK Kami sudah diberikan ilmu pengetahuan yang sangat* penting buat kami sebagai advokat
74	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
75	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
76	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
77	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Di setiap kamar sebaiknya di tambah televisi atau di setiap Lobby. Terimakasih
78	4	4	3	11	3	4	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
79	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
81	3	3	3	9	4	3	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Dah cukup oke semuanya.....
82	3	3	4	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	3	4	7	4	4	3	11	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	71	3,38	
83	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
84	3	4	3	10	3	4	4	11	YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	73	3,48	Kalau bisa alat mandi dan handuk diganti tiap hari Koperasi lebih mempersiapkan merchadise pusediklat MK
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
86	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
87	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
88	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	
89	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
90	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
91	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
92	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	
93	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Mundiri	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
94	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Seluruhnya sudah sangat baik semoga terus dijaga daan semoga dan Bimtek ini akan lahir pengara2 yg handal dan mahir keramahan dari pintu masuk sampai penjagaan sampai pelayanan konsumsi sangat terpui
95	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	3	4	3	10	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	3	6	3	3	6	72	3,43	
96	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
97	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Ada ruang temu bersama para penghuni graha seperti di graha 5, dilengkapi ruang tamu, ruang nonton bersama juga fasilitas hiburan berupa minimal meja ping pong variasi makanan lebih dikontrol citarasanya... kadang rasanya hambar, bahkan kacang rebus yang disajikan rasanya aneh dan basah berwarna ungu....
98	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
99	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	terimakasih atas bantuannya selama bimtek terimakasih atas bantuannya selama bimtek terimakasih atas bantuannya selama bimtek
100	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
101	4	4	3	11	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
102	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri	4	4	8	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	3	7	75	3,57	
103	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
104	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Apresiasi dan Terimakasih kepada Yang Mulia Bapak SUHARTOYO Ketua MK beserta jajarannya, yang telah menyelenggarakan BIMTEK PHPKada 2024 Angkatan I kepada kami para ADVOKAT. Lanjutkan kebaikan, perbaiki yang kurang. Salam Homat kami Anggota ADVOKAT dari PERADIN BPW JATIM CQ DPC SURABAYA
105	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
106	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
107	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Fasilitas kamar sedianya lebih dikondisikan dengan baik terutama sanitasi Walaupun peserta sudah mendapat alat mandi sedianya sabung cair tetap ada dalam dispenser yang menempel ditembok sehingga pihak bisa refill saja Jumlah menu makanan buffet atau snack sedianya dilebihkan agar peserta yang belakangan tidak selalu kehabisan Bahan ajar fasilitas penunjang acara sudah sangat baik para pemberi materi sudah mumpuni semua dalam bidangnya
108	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mungkin untuk kesediaan makanan jika habis bisa langsung di isi ulang
	3,67	3,79	3,72	3,73	3,72	3,72	3,69	3,71			3,80	3,82	3,81	3,78	3,80	3,79	3,79	3,75	3,69	3,72	3,56	3,70	3,63	3,79	3,79	3,79	3,81	3,81	3,81	3,81	3,79	3,80	78,81	3,75	

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”
TAHUN 2024**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

- 16 Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.
- 17 Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.
- 18 Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass carafe into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table with a stack of books on the left and a small container on the right. The background is softly blurred.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Fajar Laksono Suroso

WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

SKLN

PARPOL

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL TENTANG PEMILIHAN UMUM

PHPU

PEMAKZULAN

WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.

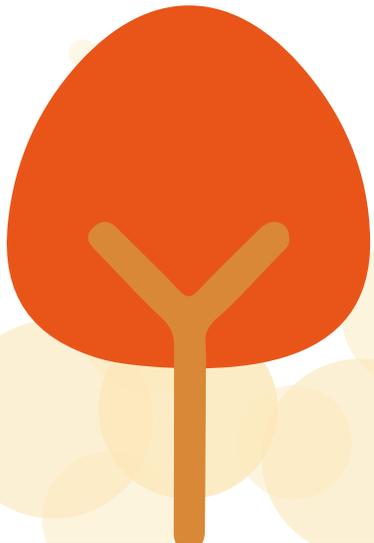
DINAMIKA PENGATURAN UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?

**UU NOMOR 22
TAHUN 1999**
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH

**UU NOMOR 32 TAHUN
2004**
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH

**UU NOMOR 22 TAHUN
2014**
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU





PUTUSAN NOMOR 072- 073 /PUU-II/2004
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN
PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN
PEMILU



UU NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM



UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANGUNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH.



PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:
SENGKETA PILKADA BUKAN
WEWENANG MK



UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UU
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



UU NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU NOMOR PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI
KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK
UNTUK MEMUTUS

PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022

PILKADA = REZIM PEMILU = WEWENANG MK

PHPU

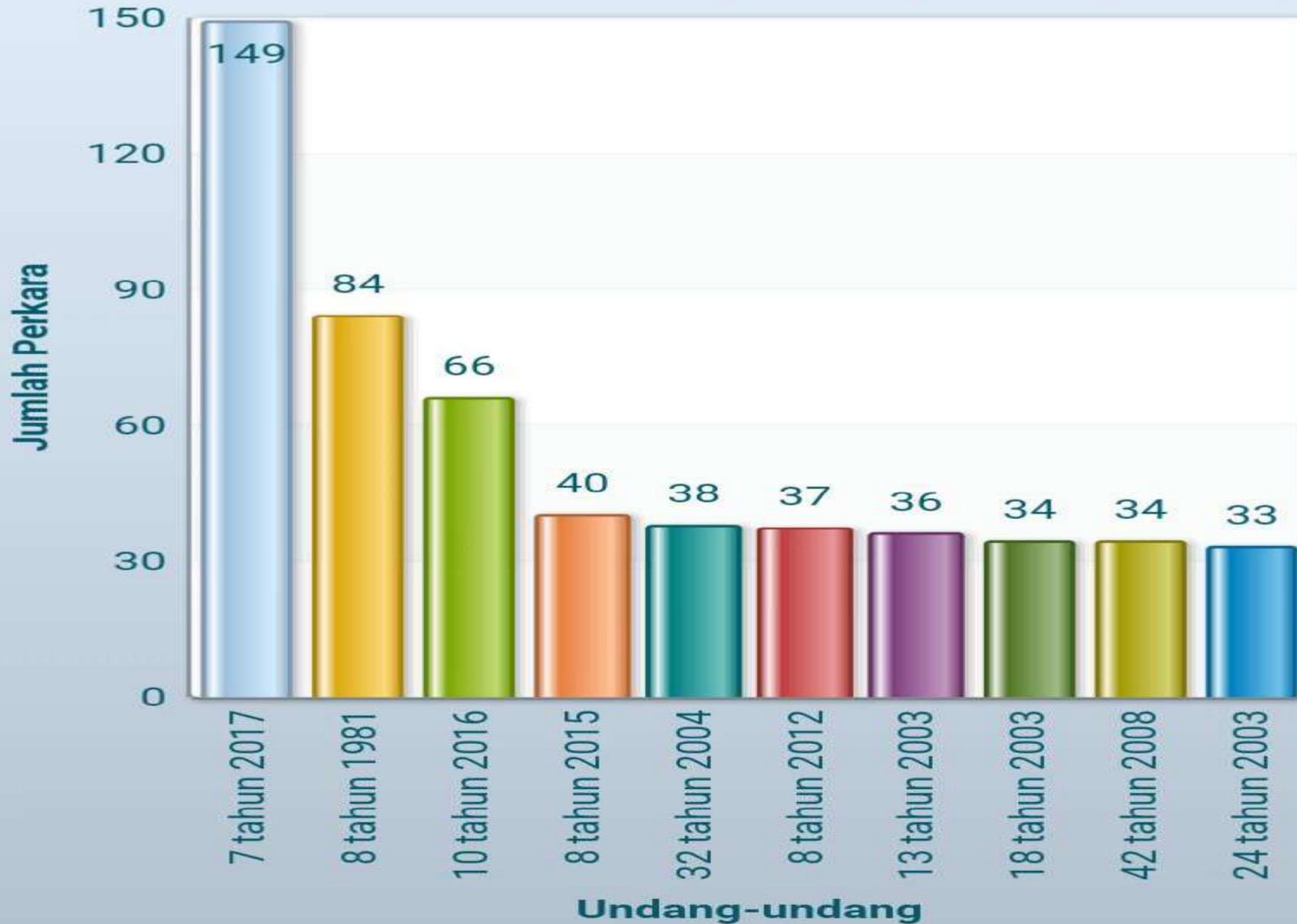
MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL
TENTANG PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- **GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

10 Undang-undang Paling Sering Di Uji



DINAMIKA
PUTUSAN
MK
(PUU DAN
PHP KADA)

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PHP KADA

Chart Putusan PILKADA Berdasarkan Amar (1136)

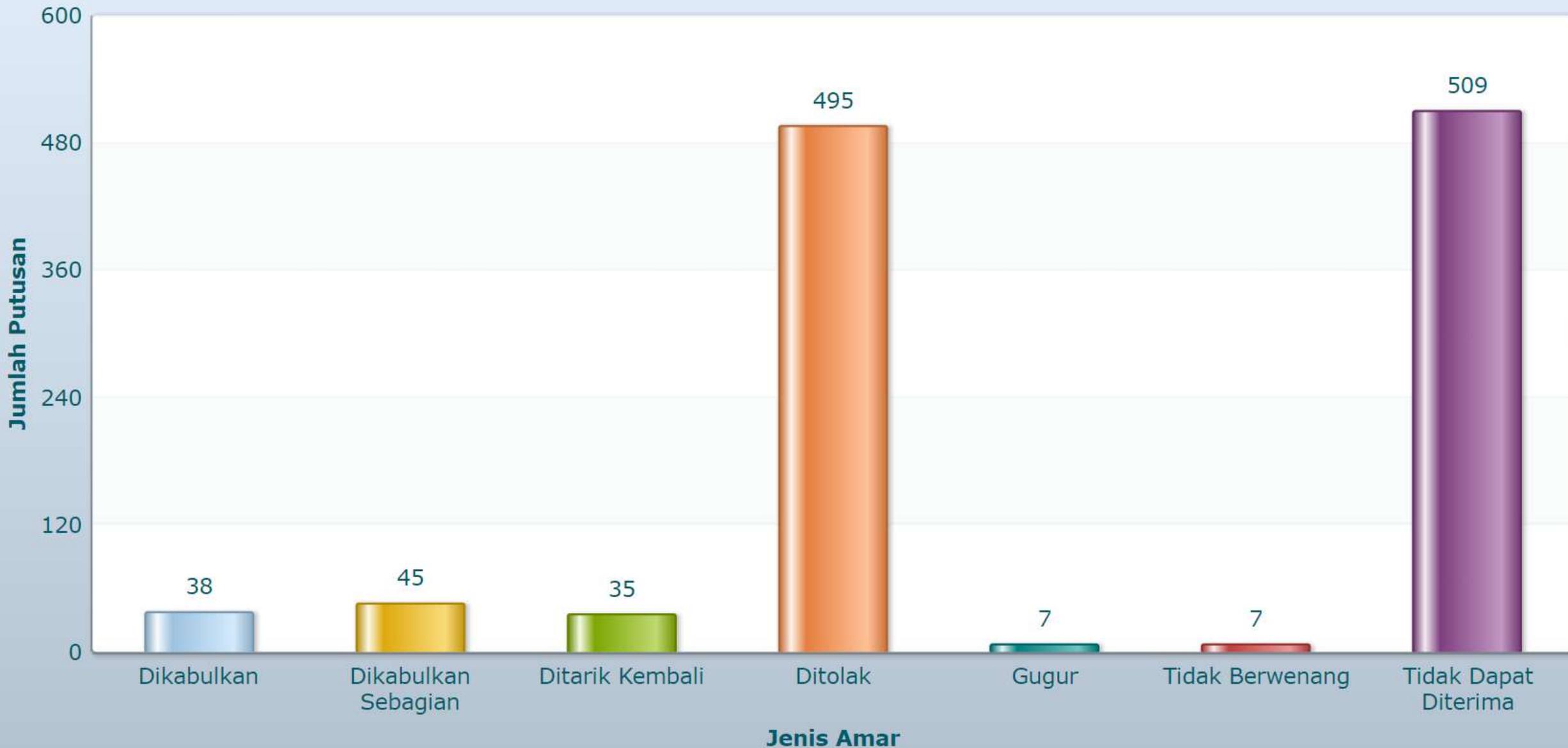
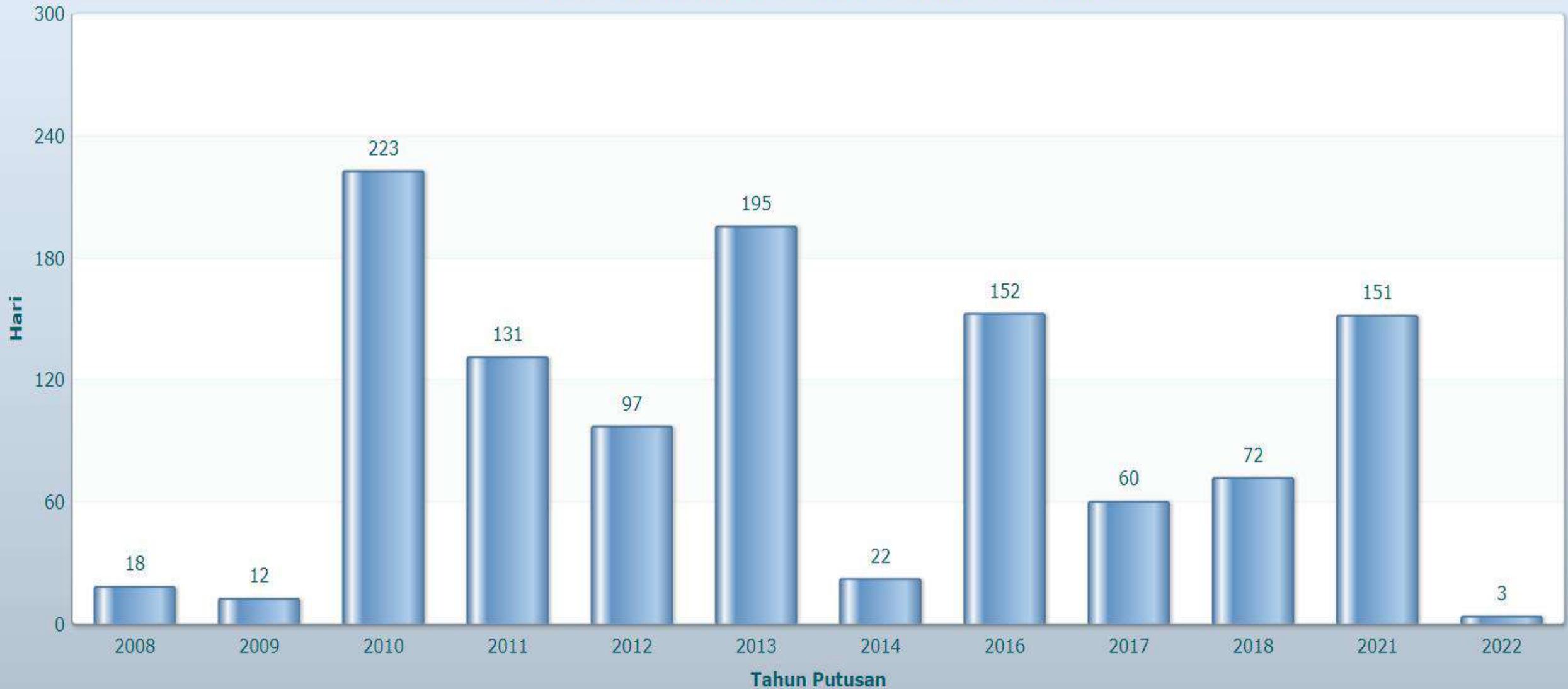


Chart Jumlah Putusan Perkara Pilkada Per Tahun



DALIL PERMOHONAN YANG SERING DIMUNCULKAN



DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19
MARET 2021 (YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19
MARET 2021 (KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22
MARET 2021 (KOTA BANJARMASIN)



TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME, KEGIATAN, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

OLEH:

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Tahun 2024**

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan e-HPKP3;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- o. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- p. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
- q. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
- r. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
- s. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

1. Pengajuan Permohonan Pemohon

- Permohonan dapat diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*)
- Permohonan diajukan paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU (Termohon)
- Permohonan baik secara luring atau secara daring hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan
- Permohonan diajukan sebanyak **4 (empat)** rangkap dan alat bukti **2 (dua)** rangkap
- Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB pada hari kerja
- Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, mulai pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **16.00** WIB pada hari kerja

Catatan:

Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024/2025, Penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah Pengumuman Termohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov – 16 Des 2024

Penetapan: Rabu, 27 November 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu, 27 Nov 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Kamis, 28 Nov 2024
08.00-24.00 WIB**

**Jum'at, 29 Nov 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

** Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

- **Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah pemeriksaan persidangan atau dipertimbangkan setelah pemeriksaan persidangan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan
- Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dengan menghubungkannya pada pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan (lanjutan)

PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon (Paslon 1)	637.200 suara
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	1.837.300 suara

Cara Penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $637.200 - 601.500 = 35.700$ suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3: $637.200 - 598.600 = 38.600$ suara

Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya **e-AP3** oleh Pemohon atau kuasa hukum - **Offline**
- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak dikirimkannya **e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum - **Online**
- Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-HPKP3)

- Perbaikan dan Kelengkapan apabila melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan tercatat di **e-HPKP3**

5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK (registrasi)

- Dilaksanakan secara bertahap
- Penerbitan **e-ARPK**
- Penyampaian **e-ARPK** kepada Pemohon paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

6. Penyampaian Salinan Permohonan

- Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** (sebagai koordinasi) dan **Bawaslu RI**
- Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan sebelum permohonan diputus oleh Mahkamah

7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam **e-BRPK**
- Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan **1 kali** dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait

- Ketetapan menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait disampaikan paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

- Sidang pertama (**Pemeriksaan Pendahuluan**) paling cepat **4 (empat) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum Hari Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**

10. Pemeriksaan Pendahuluan

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon

11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

- Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Sidang Pemeriksaan Persidangan
- Jawaban Termohon baik secara luring maupun secara daring diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan
- Jawaban Termohon sebanyak 4 (empat) rangkap, salah satunya asli ditandatangani Termohon atau Kuasa Hukum
- Termohon menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dibubuhi meterai dan 1 (satu) penggandaan dari berkas asli

12. Pemeriksaan Persidangan

- Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti para pihak

13. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 1)

- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan
- RPH sekurang-kurangnya ditangani oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi

14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 1)

15. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 1)

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan
- Penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)

- Mendengar keterangan saksi/ahli
- Jumlah saksi/ahli ditentukan oleh Mahkamah
- Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangan dan kelengkapannya paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan persidangan dengan acara pembuktian
- Sebelum memberikan keterangan, saksi/ahli diambil sumpah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim Konstitusi
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan sebelum hari sidang untuk pengesahan

17. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 2)

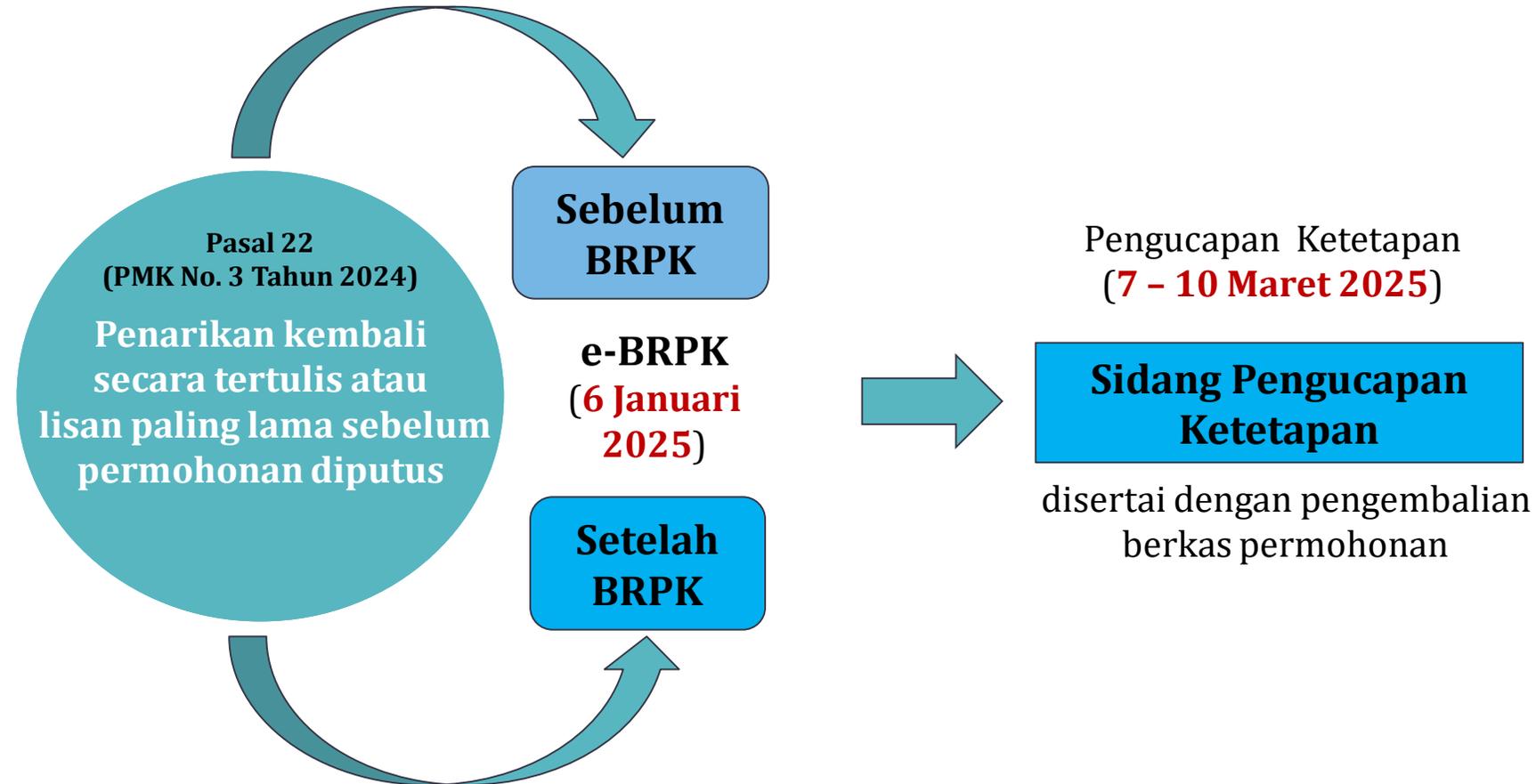
- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan

18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 2)

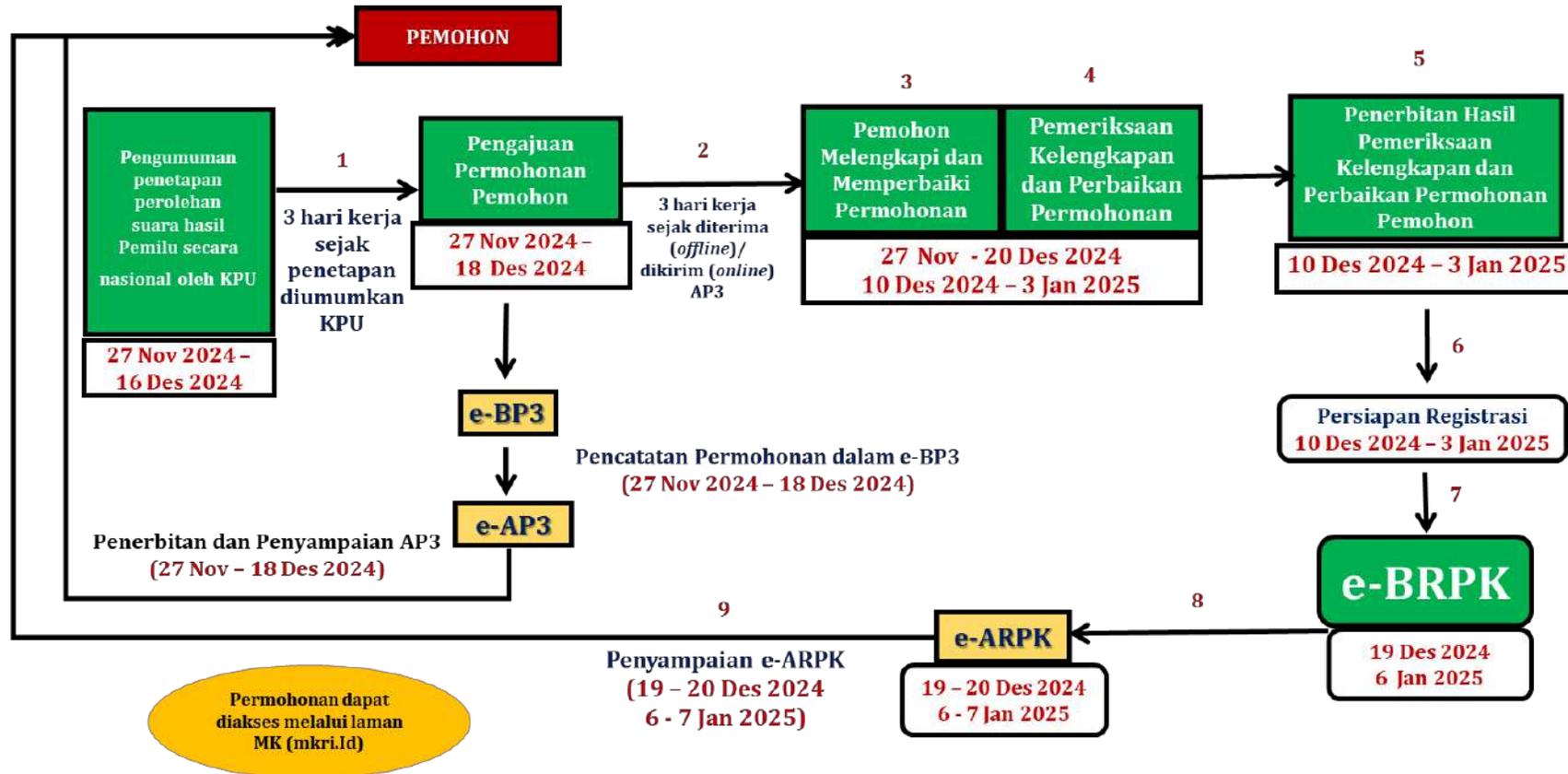
19. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 2)

- Putusan paling lama **45 (tiga) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan

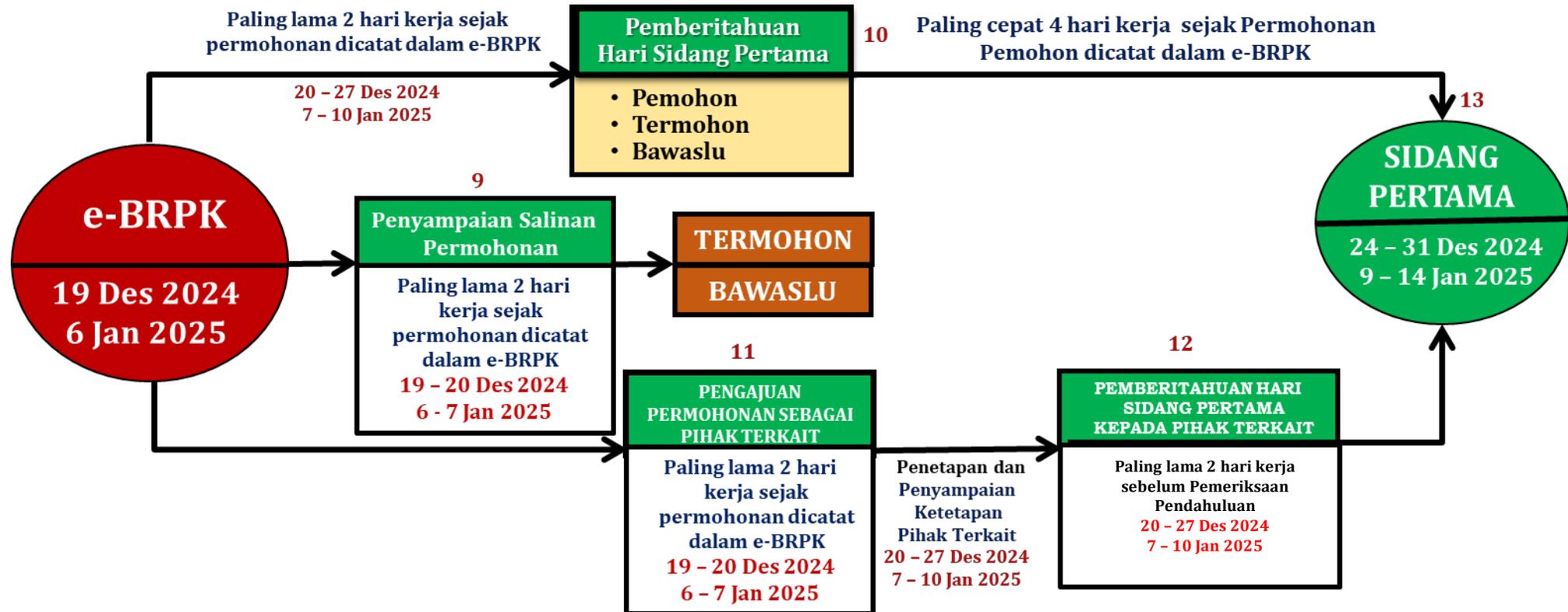
MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



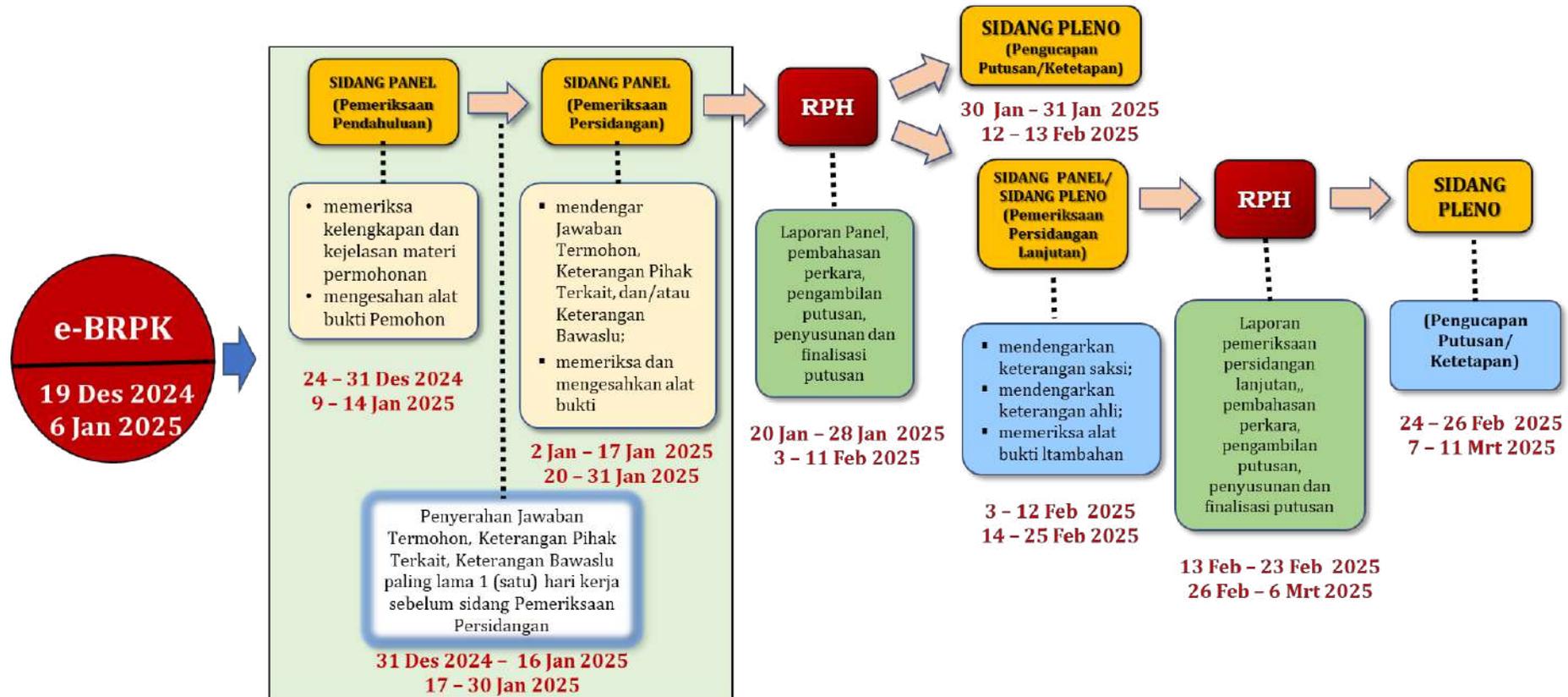
MEKANISME PENGGAJUAN PERMOHONAN



MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



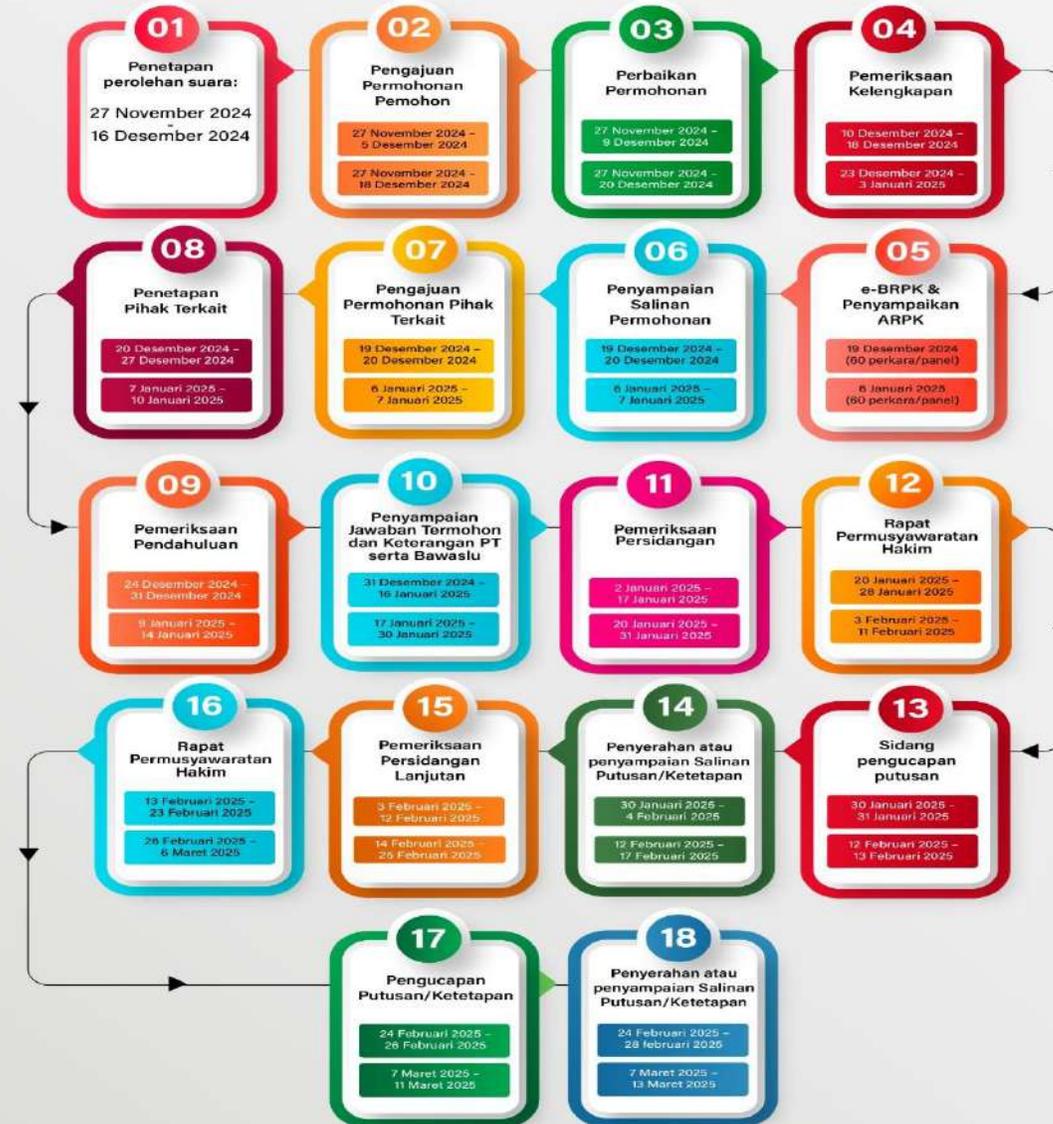
MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN



Catatan: Persidangan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya dengan mengajukan Permohonan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. (Pasal 38, PMK No. 3 Tahun 2024)



Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

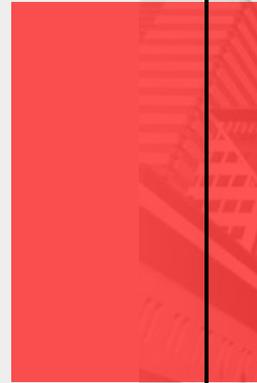
Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **tepercaya**”.

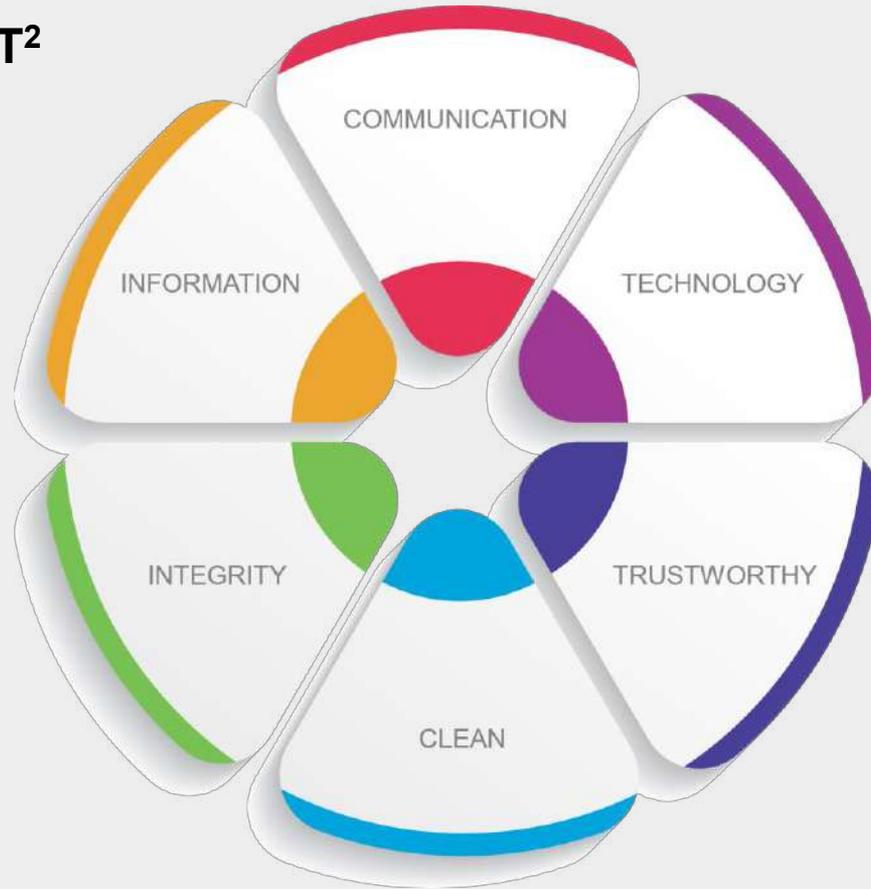




Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

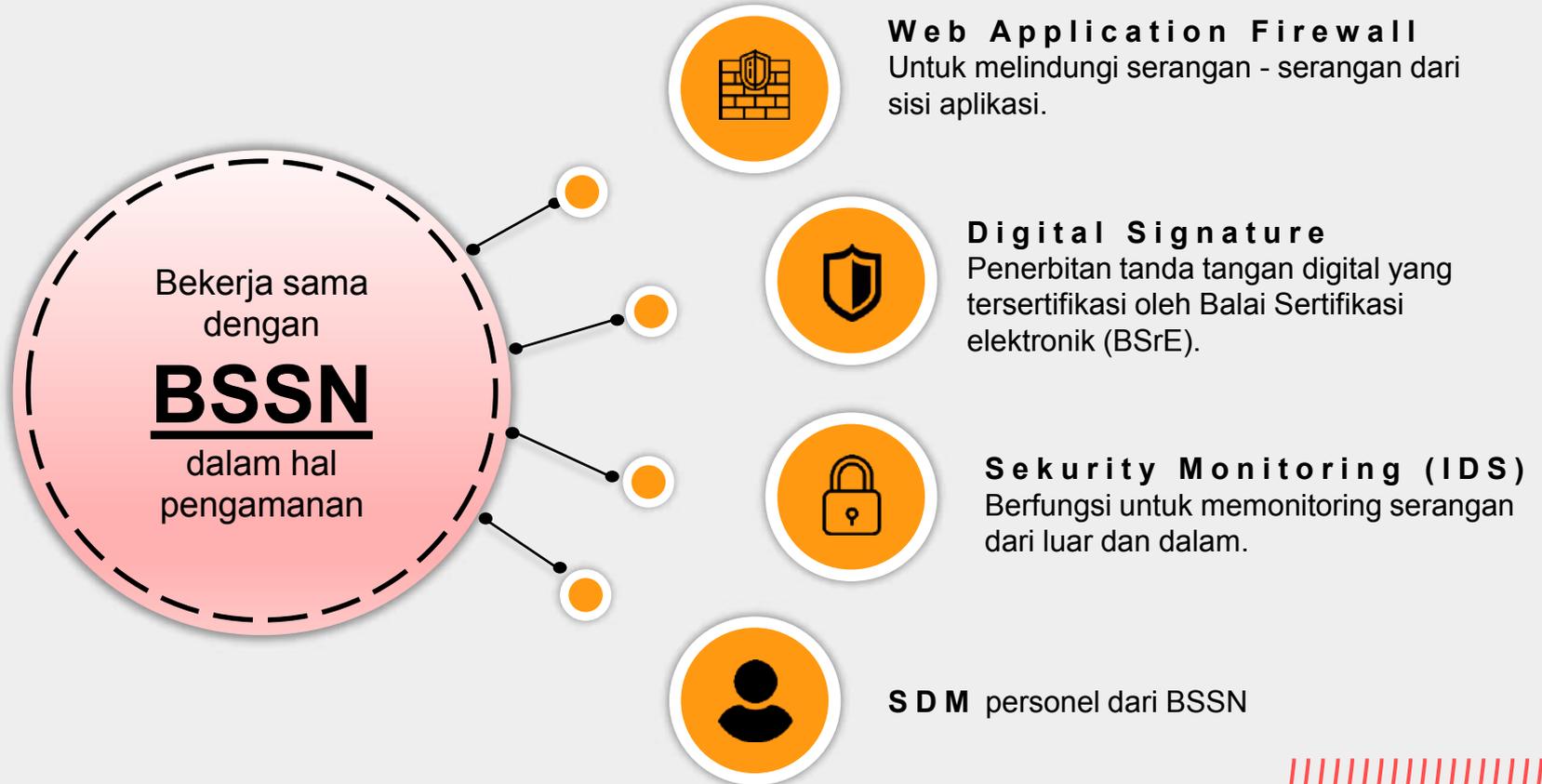


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi



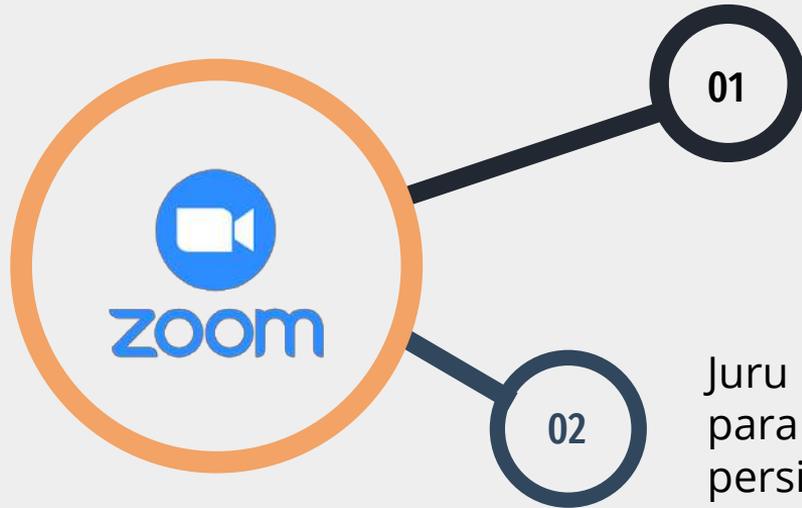
MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



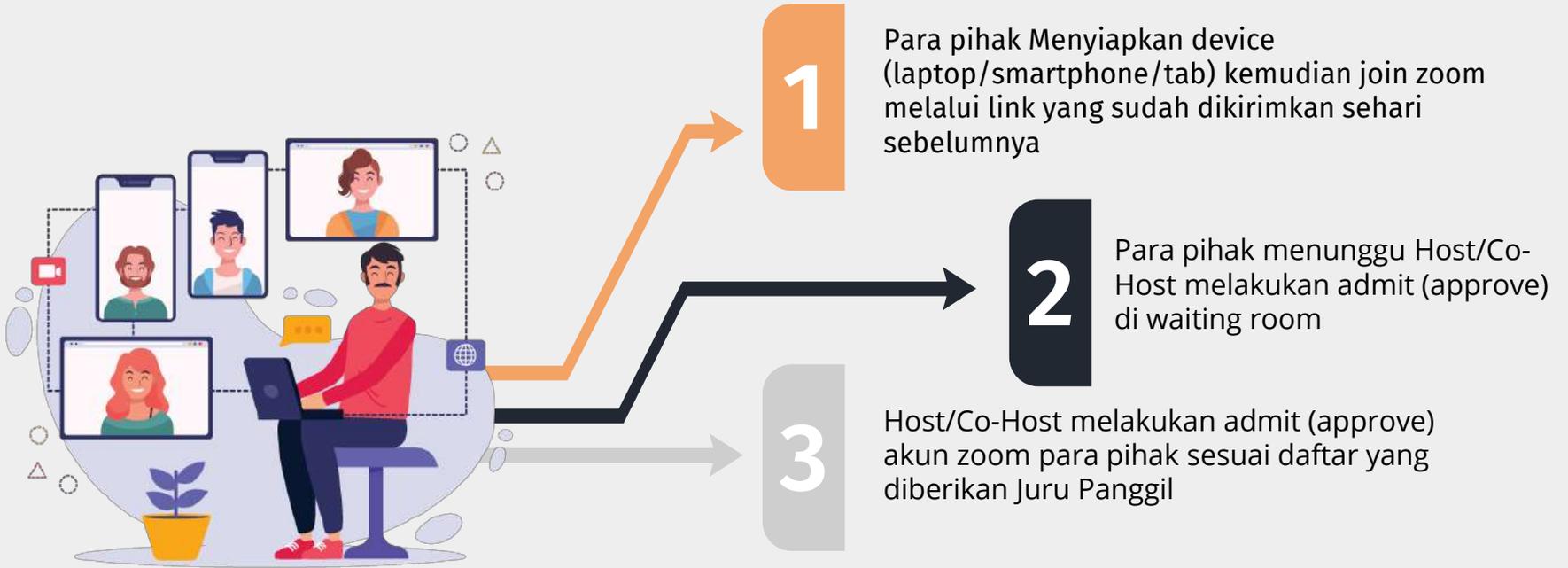
TAHAP PERSIAPAN



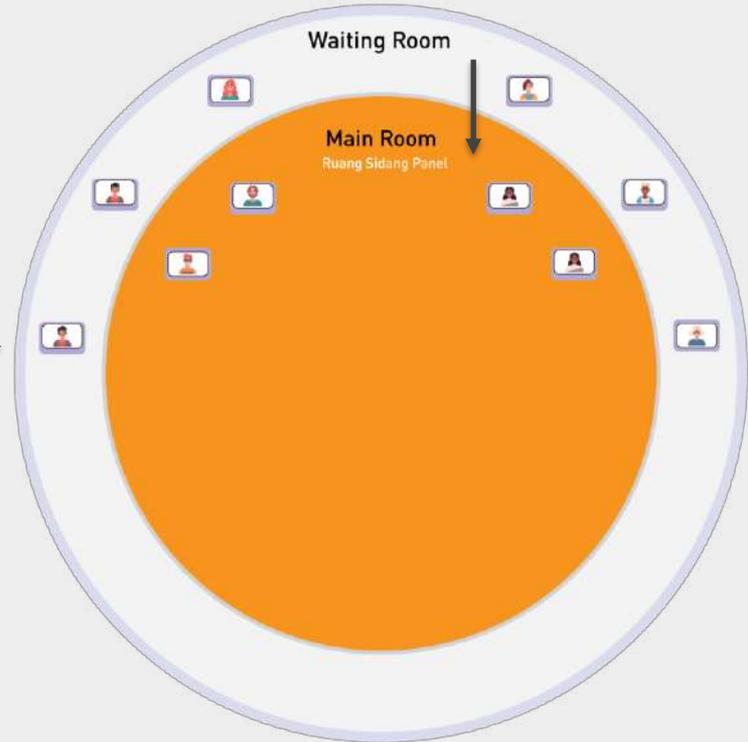
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

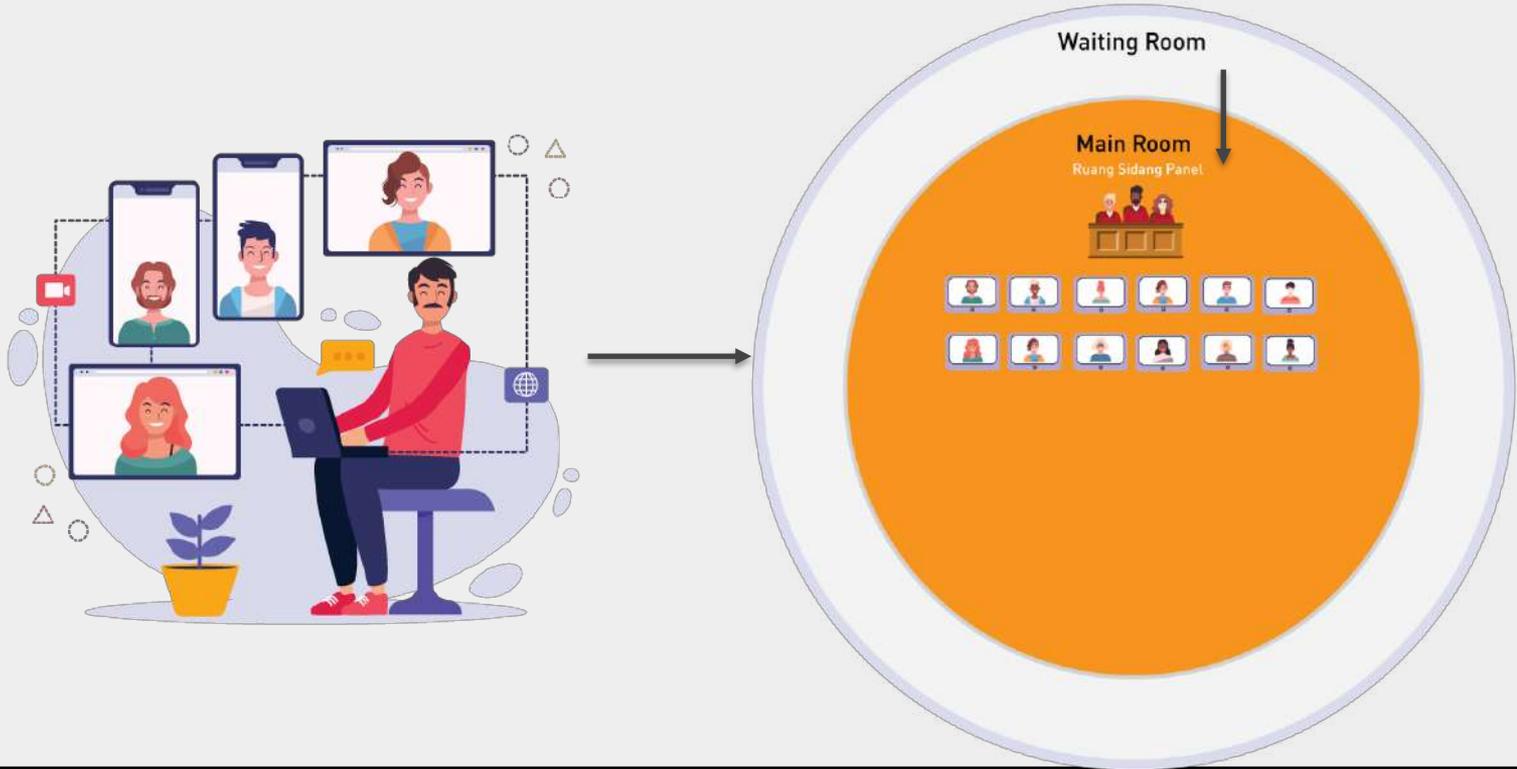
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 68 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

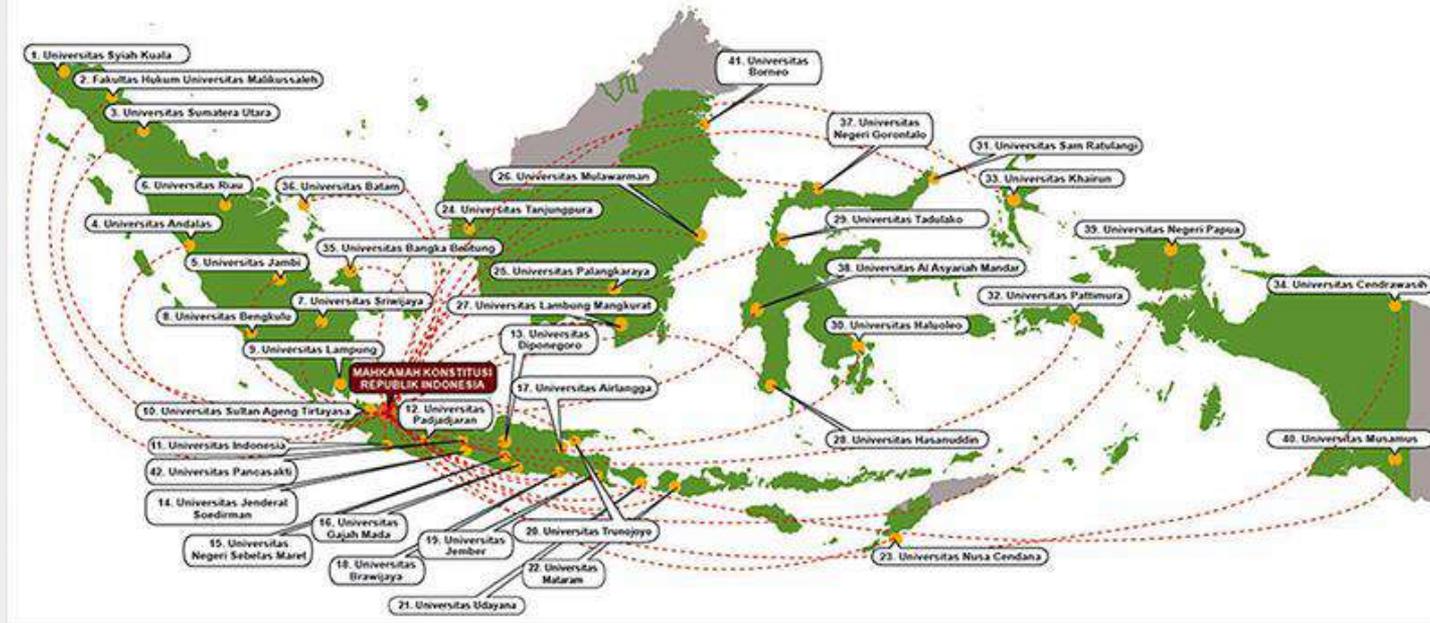


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan
67	Fakulta Hukum Universitas Ahmad Dahlan	598M+M7V, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
68	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Jl. Pegangsaan timur 56 No.1, Denpasar-Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	TEMPAT
1	16-01-2024	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2	23-04-2024	06/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti)	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3	25-04-2024	06/MMK/L/04/2024 07/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4	28-05-2024	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5	29-07-2024	88-89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6	12-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Perbaikan Permohonan (II)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7	20-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.3K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor 1-25:45 Sidang Pengucapan Putusan 3:08:10 Sidang Perkara Nomor 14:15 Sidang Perkara Nomor 19:16 Sidang Perkara Nomor 19:15 Sidang Perkara Nomor 1-41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87lAvqk5LFgxxw/editing/images?url=. Di. Surtanto., Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

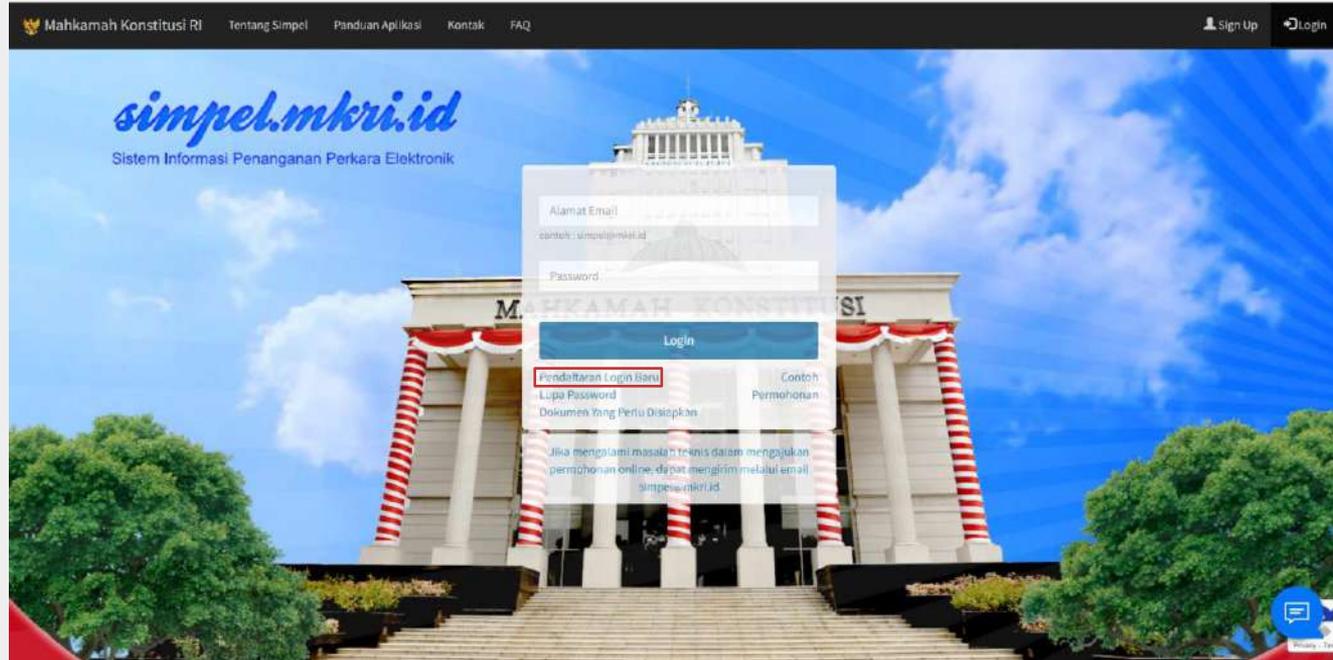
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



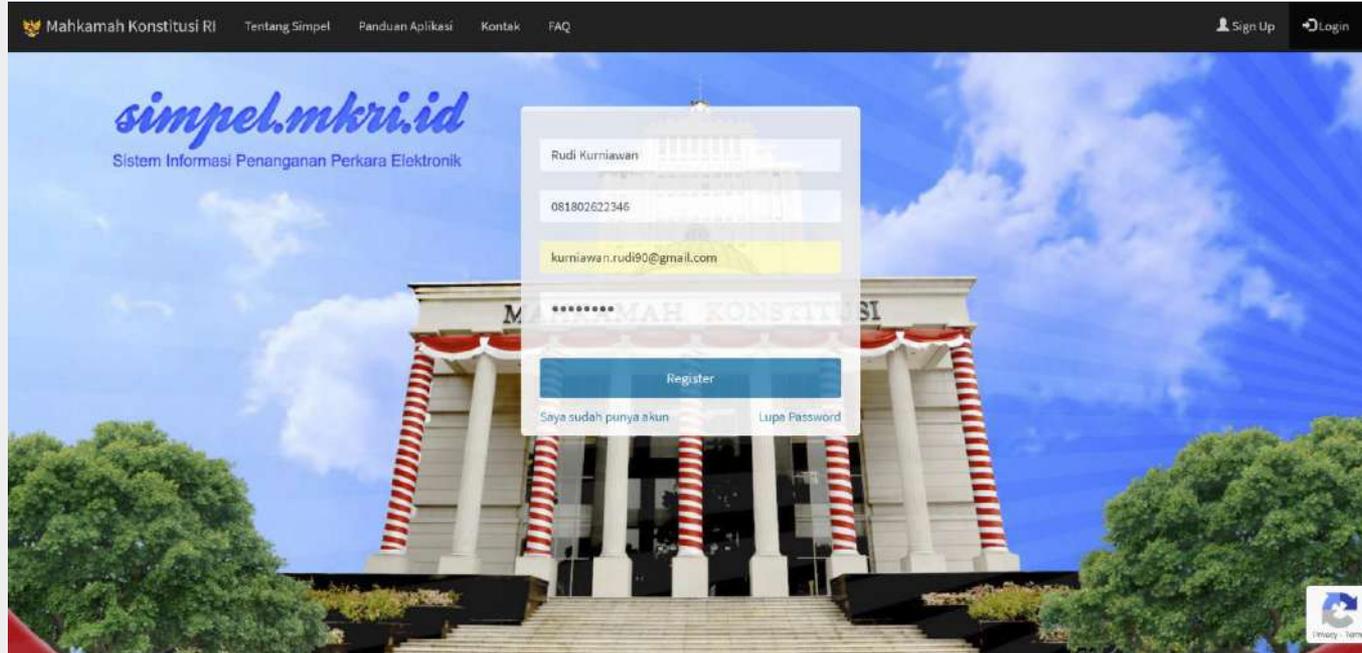
Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



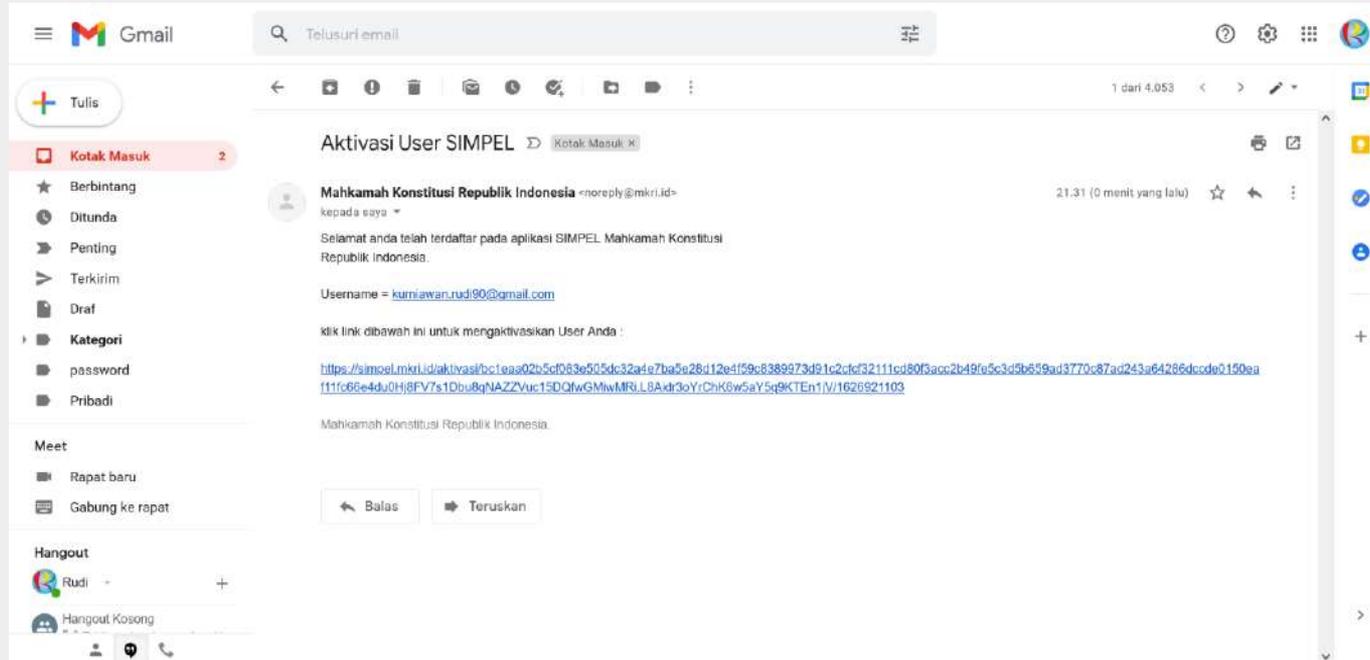
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kumiawan. The page title is "Profile" and the sub-header is "Profile User". The user's name "Rudi Kumiawan" is displayed above a profile picture placeholder. The form contains the following fields:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: kumiawan.rudi90@gmail.com
- Nomor TeleponHP ***: 091902622346
- Nomor KTP ***: 1204507891011121
- File KTP ***: A file upload field with a "Browse" button and a note: "File type harus jpg, gif atau png. Belum ada file KTP".
- Alamat**: A text area with the placeholder text "Alamat".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Simpan" (Save) in green and "Batal" (Cancel) in orange. The footer of the page includes the copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL MKRI.ID dashboard. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'Rudi Kurniawan', and a 'Dashboard' link. The main content area is titled 'Permohonan' and features four large colored cards representing different application types, each with a count and a 'Selengkapnya' link:

- 1** Pengajuan Undang-Undang (PUU) - Selengkapnya
- 0** Serah-serah Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) - Selengkapnya
- 0** Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (PILDA/PPDS/PPROD) - Selengkapnya
- 0** Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPRI/DPRI/DPRI) - Selengkapnya

Below this, there is a section for 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' with a card for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota' showing a count of **0** and a 'Selengkapnya' link.

At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021, showing dates from 1 to 31 with color-coded indicators for 'Sidang' (green), 'Putusan' (blue), and 'Kedua' (purple). A legend at the bottom left of the calendar identifies these colors.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online" (Online Request) for "PUU (Pengujian Undang-Undang)" (Constitutional Review). The interface is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (Request Form Filling), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa" (Applicant and Authority Data Filling), and "Proses Upload Dokumen" (Document Upload). The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, showing a text area for the "Urutan Pokok Permohonan" (Request Form Order) with an example: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945". Below this is a list of required documents: "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) **", "Email Kuasa **", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) **", "File KTA/BAS (bagi advokat) **", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A note states: "Keterangan: ** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom, there are "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save) buttons. The footer includes "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved." and "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online -> Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkr1.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) | Simpan Sementara | Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main menu on the left includes options like Dashboard, Info Permohonan, and Permohonan PUU. The main content area is titled 'Permohonan Online' and shows a progress bar with three stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Permohonan dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The 'Berkas Permohonan' section contains a table with the following data:

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload	Browse... No file selected.
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload	Browse... No file selected.
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload	Browse... No file selected.
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload	Browse... No file selected.
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload	Browse... No file selected.

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Kembali (Edit Permohonan)', 'Batal (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The footer includes the copyright notice 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version number 'Version 2.1'.

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

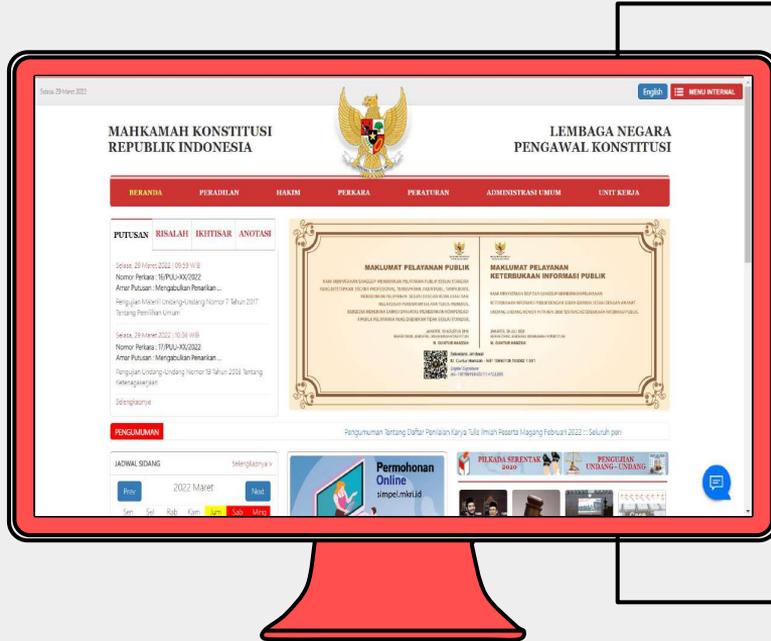
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

PUTUSAN	RISALAH	IKHTISAR	ANOTASI
Selasa, 29 Maret 2022 09:59 WIB Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022 Amar Putusan : Mengembalikan Penarikan ... Pengujian Misteril Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum			
Selasa, 29 Maret 2022 10:06 WIB Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022 Amar Putusan : Mengembalikan Penarikan ... Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan			
Selengkapnya			

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TERBUKA, AMAN, TABEL, TERBUKA, BUKAN, MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN NILAI LUKAS PERSAMAAN SACARA TERBUKA-MEREBUS, BERSEKATA MENEMBAH SAKSI DAN LUKAS PERSEKUTUAN KOMPERGASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
BERKAS DANIB JAMESIAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
Rd. Guruh Manuab - NPT 10087108 10002 1 001
Cipta Digital
021-1107708700420774702355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEMUA BAHASA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 10 JULI 2008
DEKRE TERBUKA-MEREBUS MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per:

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

2022 Maret

Prev Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlanggapan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkr.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendidannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sigran Konstitusi
- Gedung MK
- Mejalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mikri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlanggapan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sigran Konstitusi
- Gedung MK
- Mejalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SR4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpler.mkr.id



Agenda Sidang



Siaran Pts



Berlanggahan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkr - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummt
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Penguian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sgrah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpler.mkr.id

PILKADA SERENTAK 2020 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 



Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan



Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH
Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sjarah Konstitusi Gedung MK
Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SP4N-LAPOR!

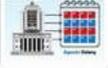


Agenda Sidang Siaran Pts Berlanggaban
ILM Konsultasi Dewan Etik



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



 Agenda Sidang	 Siaran Pers	 Berlangganan	Selasa, 29 Maret 2022 19:35 WIB MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas Miri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-	 Pusdik MKRI	 Perustakaan	 Pusat Sejarah Konstitusi	 Gedung MK
 ILM	 Konsultasi	 Dewan Etik	Selasa, 29 Maret 2022 15:25 WIB Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Miri Mahkamah Konstitusi (MK) Meneqaskan Pendidirinya Bahwa Dewan Kehormatan	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Konstitusi	 Jurnal Consrev	 SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

 Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...	 Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...	 Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...	 Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...
---	---	--	---	--	---

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat,10110
Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mikri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidannya Bahwa Dewan Kehormatan

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sigran Konstitusi

Gedung MK

Mejalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consrev

SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHPGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketidaksihan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

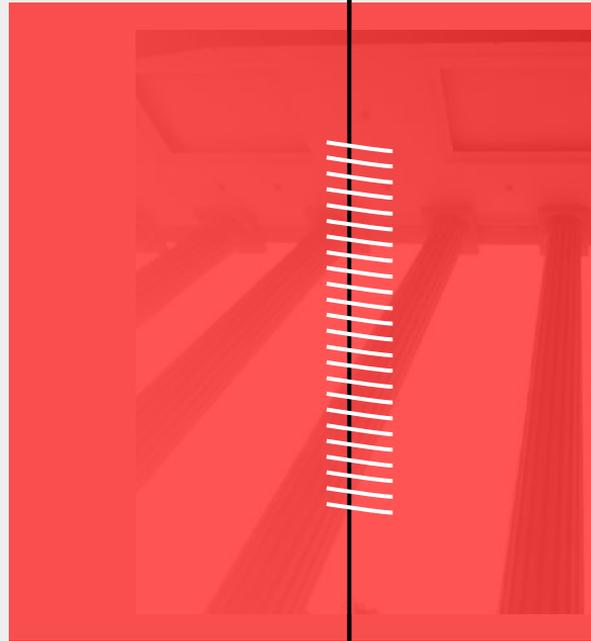
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK



TERIMA KASIH



A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden surface, likely a desk or table, with several books visible in the background. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the wood and the hand.

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)



OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

Antara lain memuat:

- A. Identitas lengkap Pemohon;
- B. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah
 2. Kedudukan hukum Pemohon
 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
 4. Alasan-alasan Permohonan (posita)
 5. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum)

Identitas lengkap Pemohon, paling kurang memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum,
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat.

Selain itu, Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:

- a) nama Termohon
- b) alamat Termohon

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. Kewenangan Mahkamah, memuat:

Penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan

2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat:

Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah

3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat:

Penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon

Lanjutan ...

4. Alasan-alasan Permohonan, antara lain memuat:

- a. Penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. Petitum, memuat antara lain:

- a. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Permintaan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS

Pemohon:

- nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- Email
- Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

Termohon:

nama dan alamat KPU/KIP Provinsi .. KPU/KIP Kabupaten/Kota ...

Lanjutan ...

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan (Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) yang memengaruhi penetapan calon terpilih.
- c. Pernyataan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Lanjutan ...

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Menjelaskan mengenai waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK
- c. Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan

Lanjutan ...

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi;
- b. Pemohon menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
 - 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
 - 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
- c. Pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

Lanjutan ...

4. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Pemohon menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Pemohon menjelaskan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Pemohon dapat menguraikan dalil kualitatif yang dihubungkan dengan kesalahan penghitungan suara.

5. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon

Selain petitum di atas, Pemohon juga dapat meminta petitum alternatif berupa pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait
- c. Petitum

Nama dan alamat Pihak Terkait, memuat:

- 1) Nama dan alamat Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota **atau** Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon dan/atau kuasa hukum,
- 2) Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- 3) Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait, memuat:

Tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita Pemohon, petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon

Petitum Pihak Terkait, memuat:

Mengabulkan eksepsi (jika mengajukan eksepsi)

Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)

PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

- a) nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- b) Email
- c) Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

Lanjutan ...

1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- 2) Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota .

Lanjutan ...

B. Tenggang waktu pengajuan permohonan

- 1) Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon].
- 2) Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Lanjutan ...

C. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;
2. Ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
 - jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
 - maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
3. Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

D. Eksepsi lainnya

Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa

Lanjutan ...

Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil lainnya.

2. PETITUM PIHAK TERKAIT

Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi):

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- 1) Menolak Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass carafe into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table with a stack of books on the left and a small wooden box on the right. The background is a plain wall.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1846/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Oktober 2024

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1689225763241016045127

Lampiran I

Nomor : 1846/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT
ANGKATAN I**

Hari, Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 21 Oktober 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Lampiran II

Nomor : 1846/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematisa Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1845/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Oktober 2024

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1689225763241016045252

Lampiran I

Nomor : 1845/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT
ANGKATAN I**

Hari, Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 21 Oktober 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Lampiran II

Nomor : 1845/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematisa Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1839/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Oktober 2024

**Yth. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.**
di Jakarta

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Ibu Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-1707120307241016043431

Lampiran I

Nomor : 1839/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA TAHUN 2024**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili; b. Pembentukan Mahkamah Konstitusi; c. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi; d. Struktur dan Mekanisme Kerja; e. Asas-asas Hukum Acara MK; f. Dinamika Penanganan PHPU dari tahun 2005 s.d. 2020; e. Landmark Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1850/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Oktober 2024

Kepada Yth.,
Plt. Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk1058195493241016045555

Lampiran I

Nomor : 1850/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 17 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MEKANISME, TAHAPAN DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2024**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024</p> <p>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya.</p> <p>1) Secara Langsung</p> <p>2) Secara Online</p> <p>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</p> <p>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</p> <p>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</p> <p>f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan</p>	2 x 60 menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1834/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Oktober 2024

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.**
- 2. Ishak Purnama, S.Kom.**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1482969282241016045723

Lampiran I

Nomor : 1834/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	2 x 60 menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1861/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

18 Oktober 2024

Kepada Yth,
Saudari Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Plt. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-797804943241018111612

Lampiran I

Nomor : 1861/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 18 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>Penyusunan Permohonan Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohonb. Identitas Lengkap Pemohonc. Uraian yang Jelas Mengenai :<ul style="list-style-type: none">1) Kewenangan Mahkamah2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan4) Pokok Permohonan Pemohon5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohond. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon <p>Penyusunan Keterangan Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait<ul style="list-style-type: none">1) Nama dan Alamat Pihak Terkait2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon :<ul style="list-style-type: none">a) Permohonan Pemohonb) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohonc) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonand) Pokok Permohonan Pemohon3) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkaitb. Contoh Penyusunan Keterangan Pihak Terkait	90 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1854/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Oktober 2024

Kepada Yth. :

- 1. Sdri. Ria Indriyani**
 - 2. Sdri. Dian Chusnul Chatimah**
 - 3. Sdr. Bisariyadi**
 - 4. Sdr. Helmi Kasim**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Rabu, 23 Oktober 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kamis, 24 Oktober 2024	08.00 s.d. 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

- Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Bapak/Ibu Plt. Panitera Muda I, II, dan III;
- Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1659519924241017064754

Lampiran

Nomor : 1854/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 17 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOKBAHASAN	WAKTU
Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Simulasi Penyusunan Permohonan <ol style="list-style-type: none">Sistematika Penyusunan Permohonan PemohonIdentitas Lengkap PemohonUraian yang Jelas Mengenai:<ol style="list-style-type: none">Kewenangan MahkamahKedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) PemohonTenggat Waktu Pengajuan PermohonanPokok Permohonan PemohonPermintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon Simulasi Penyusunan Keterangan Pihak Terkait <ol style="list-style-type: none">Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait<ol style="list-style-type: none">Nama dan Alamat Pihak TerkaitUraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon :<ol style="list-style-type: none">Permohonan PemohonKedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) PemohonTenggat Waktu Pengajuan PermohonanPokok Permohonan PemohonPermintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait	4 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Evaluasi Penyusunan Permohonan <ol style="list-style-type: none">Sistematika Penyusunan Permohonan PemohonIdentitas Lengkap PemohonUraian yang Jelas Mengenai:<ol style="list-style-type: none">Kewenangan MahkamahKedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) PemohonTenggat Waktu Pengajuan PermohonanPokok Permohonan PemohonPermintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon Evaluasi Penyusunan Keterangan Pihak Terkait <ol style="list-style-type: none">Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait<ol style="list-style-type: none">Nama dan Alamat Pihak TerkaitUraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon :<ol style="list-style-type: none">Permohonan PemohonKedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) PemohonTenggat Waktu Pengajuan PermohonanPokok Permohonan PemohonPermintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1837/DK.06.00/10/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

16 Oktober 2024

Kepada Yth.,
Plt. Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Plt. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk1805951086241016050259



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1893/DK.06.00/10/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Sebagai Moderator**

22 Oktober 2024

Kepada Yth.:

Sudari Elin Asrofah Qibtiah, S.Pd, M.Pd

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Rabu, 23 Oktober 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kamis, 24 Oktober 2024	08.00 s.d. 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Inspektur.



Digital Signature
mk-51470747241022094107



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 987/DK.06.00/07/2024

19 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Senin, 29 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk883273709240718010206



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3733/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

20 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 15 Oktober 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1469888074240820012044

Lampiran I

Nomor : 3733/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Perhimpunan Advokat Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- c. DPP Perhimpunan Advokat Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **40 (empat puluh)** orang paling lambat pada tanggal **15 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 3733/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa, 22 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.00 – 16.00 WIB	Penjelasan SIMULTAN dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Rabu, 23 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Kamis, 24 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Jumat, 25 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 11.30 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	11.30 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 3733/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
40										



Lampiran IV

Nomor : 3733/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
40.			

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat
22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Perhimpunan Advokat Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1844/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

16 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-829325102241009034250

Lampiran I

Nomor : 1844/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : **Senin, 21 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 21 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1610/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk890096881240820114538

Lampiran I

Nomor : 1610/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Selasa, 22 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1004/DK.06.00/07/2024

19 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhaki)

Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1592275639240717024354



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3732/DK.06.00/08/2024 20 Agustus 2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhakhi)
Ibu Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Ibu untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 15 Oktober 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk905383693240820011823

Lampiran I

Nomor : 3732/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- c. DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **40 (empat puluh)** orang paling lambat pada tanggal **15 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta diimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 3732/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa, 22 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.00 – 16.00 WIB	Penjelasan SIMULTAN dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Rabu, 23 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Kamis, 24 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Jumat, 25 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 11.30 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	11.30 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 3732/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
40										



Lampiran IV

Nomor : 3732/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
40.			

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat
22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1843/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

16 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhakhi)

Ibu Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-829325102241009034424

Lampiran I

Nomor : 1843/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : **Senin, 21 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 21 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1609/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhakhi)

Ibu Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1912066951240820114550

Lampiran I

Nomor : 1609/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Selasa, 22 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1012/DK.06.00/07/2024

19 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (BPP PERADIN)

Bapak Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1592275639240719025953



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 3731/DK.06.00/08/2024 20 Agustus 2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (BPP PERADIN)
Bapak Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Badan Pengurus Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 15 Oktober 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk905383693240820011913

Lampiran I

Nomor : 3731/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari BPP Persatuan Advokat Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- c. BPP Persatuan Advokat Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **40 (empat puluh)** orang paling lambat pada tanggal **15 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 3731/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa, 22 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.00 – 16.00 WIB	Penjelasan SIMULTAN dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Rabu, 23 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Kamis, 24 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Jumat, 25 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 11.30 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	11.30 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 3731/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
40										



Lampiran IV

Nomor : 3731/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
40.			

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat
22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
BPP Persatuan Advokat Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1842/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

16 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (BPP PERADIN)

Bapak Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-829325102241009034524

Lampiran I

Nomor : 1842/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : **Senin, 21 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 21 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1608/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (BPP PERADIN)

Bapak Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1497710015240820114602

Lampiran I

Nomor : 1608/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Selasa, 22 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1003/DK.06.00/07/2024

19 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia)

Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1592275639240717024508



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 3729/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

20 Agustus 2024

Kepada Yth.

Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia)

Bapak Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 15 Oktober 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk905383693240820012003

Lampiran I

Nomor : 3729/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- c. DPP Dewan Pengacara Nasional Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **40 (empat puluh)** orang paling lambat pada tanggal **15 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 3729/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa, 22 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.00 – 16.00 WIB	Penjelasan SIMULTAN dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Rabu, 23 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Kamis, 24 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Jumat, 25 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 11.30 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	11.30 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 3729/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
40										



Lampiran IV

Nomor : 3729/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Dewan Pengacara Nasional Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
40.			

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat
22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Dewan Pengacara Nasional Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1841/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

16 Oktober 2024

Kepada Yth.

Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia)

Bapak Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-829325102241009034619

Lampiran I

Nomor : 1841/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : **Senin, 21 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 21 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1607/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia)

Bapak Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1189788813240820114613

Lampiran I

Nomor : 1607/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Selasa, 22 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





SUDDING & PARTNERS LAW FIRM

Madalle Graha 5th Floor Jl. Falatehan I No. 1C Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Phone/Fax : +6221 27094501 | E-mail : office@suddinglawfirm.com | www.suddinglawfirm.com

Jakarta, 24 Juni 2024

Nomor : 001/SP/VI/2024
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Permohonan

Yth,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memberikan kesempatan bagi para advokat pada kantor Sudding & Partners yang beralamat di Madalle Graha 3th Floor Jl. Falatehan I No. 1C Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Phone/Fax:+6221 27094501, untuk dapat diikutsertakan pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, nama-nama para advokat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Induk Advokat
1	Delvi, S.H., M.H.	17.02353
2	Khaidir, S.H.	21.10797
3	Moh. Fahrudin, S.H.	012-07025/ADV-KAI/2017

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Hormat Kami,


Fandy Irianto Djurdur, S.H.
(Managing Partner)

Lampiran

1. Delvi, S.H., M.H.



Delvi, S.H.



NIA: 17.02353
DPC Jakarta Utara
Berlaku s.d.: 31-12-2024

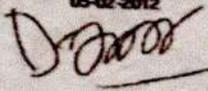
PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA UTARA

NIK : 3172016701920001

Nama : DELVI
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 27-01-1992
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : TELUK GONG BLOK DJI NO.11
RT/RW : 004 / 012
Kel/Desa : PEJAGALAN
Kecamatan : PENJARINGAN
Agama : BUDHA
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 27-01-2017



JAKARTA UTARA
05-02-2012



BERITA ACARA SUMPAH

Pada hari ini **SELASA** tanggal **24 OKTOBER** tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS**, Saya **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan disaksikan oleh Saudara :

1. **JOHANES SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. **MUHAMMAD YUSUF, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

telah mengambil sumpah sebagai advokat menurut agama yang dianut dari Saudara :

DELVI.S.H.

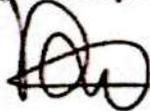
yang terdaftar dalam Buku Register Penyempahan Advokat Nomor :W10-U/123/HK.00 /ADV/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, dengan lafal sumpah telah diucapkan dihadapan kami, sebagai berikut :

"DEMI SANGHYANG ADIBUDHA" :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat;
- "Sadhu, Sadhu, Sadhu".

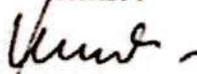
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang bersumpah,



DELVI.S.H.

SAKSI I



JOHANES SUHADI, S.H., M.H.
Nip. 19530413 198503 1 001



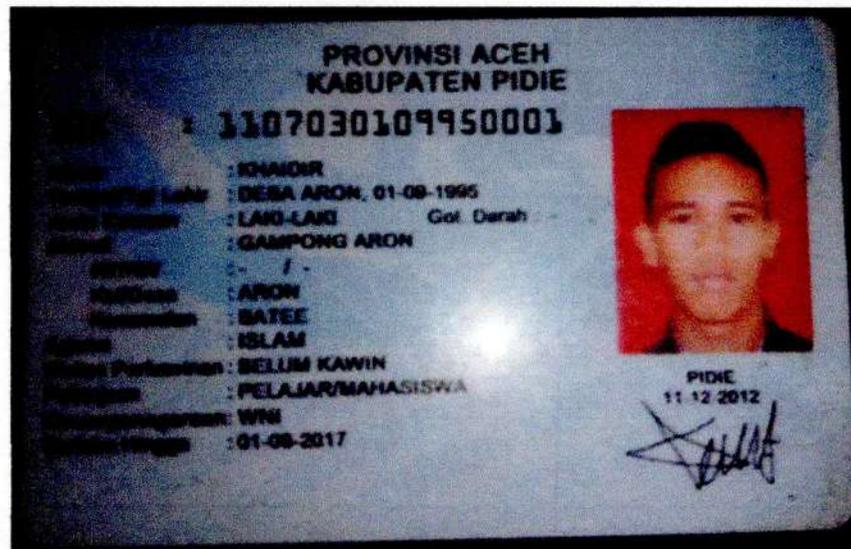
Yang mengambil sumpah,
Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.Hum.
NIP. 19520601 197802 1 001

SAKSI II



MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.
Nip. 19551018 198403 1 001

2. Khaidir, S.H.





PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10 Banda Aceh
Telp. (0651) 635459 Fax. (0651) 22101
Kode Pos 23242

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan disaksikan oleh :

1. **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. **SANUSI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempurnaan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

KHAIDIR, S.H.

Sumpah mana telah diucapkan dihadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

- "DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH/BERJANJI"-----
- "BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA"-----
- "BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN BARANG SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA"-----
- "BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN"-----
- "BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI"-----
- "BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT"-----
- "BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DI DALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI PADA TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT"-----

Demikianlah berita acara ini diperbuat dan ditanda tangani oleh yang mengambil sumpah, yang disumpah dan saksi-saksi.

Yang disumpah,

KHAIDIR, S.H.

SAKSI II

SANUSI, S.H.
NIP. 19610505 198002 1 001



SAKSI-SAKSI

Yang Mengambil Sumpah,
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Ketua,

Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum.
NIP.19580522 198511 1 001

SAKSI I

SYAWALUDDIN, S.H.
NIP. 19610617 198403 1 002

BERITA ACARA SUMPAAH

Pada hari ini **SELASA** tanggal **25 SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, Saya **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan disaksikan oleh Saudara :

- 1. ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 - 2. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- telah mengambil sumpah sebagai advokat menurut agama yang dianut dari Saudara :

MOH. FAHRUDDIN, S.H.

yang terdaftar dalam Buku Register Penyempahan Advokat Nomor :W10-U/765/HK.00 /ADV/9/2018 tanggal 25 September 2018, dengan lafal sumpah telah diucapkan dihadapan kami, sebagai berikut :

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAAH" :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat;

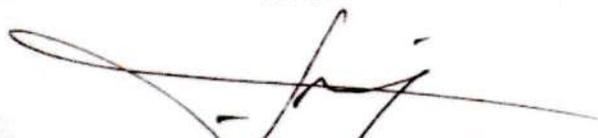
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang bersumpah,

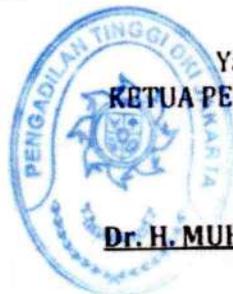


MOH. FAHRUDDIN, S.H.

SAKSI I

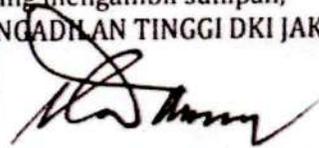


ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.



Yang mengambil sumpah,

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.Hum.

SAKSI II



MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

3. Moh. Fahrudin, S.H.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**
The Congress of Indonesian Advocates

KARTU ADVOKAT
No. 012-07025/ADV-KAI/2017



MOH. FAHRUDDIN, S.H.

berdasarkan SK DPP KAI
No. 07025/012/SK-ADV/KAI/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017,
yang bermaksudkan berhak praktik / menjalankan profesi advokat
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jakarta, 02 Juni 2017
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

  
Siti Josephine Lubis, SH. **Presiden** Agus Haryono, SH. **Sekretaris Jenderal**

Berlaku s.d. tanggal 02 Juni 2027

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**
The Congress of Indonesian Advocates



Rencana Office Park Lt. 1 Ruang 400-01
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp : 021 - 2269 7660 Fax : 021 - 8376 8668
Website : www.kongres-advokat-indonesia.org

E-mail : info@kongres-advokat-indonesia.org

Pemegang kartu ini adalah ADVOKAT menurut Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 3175090404700016

Nama : MOH FAHRUDDIN, SH
Tempat/Tgl Lahir : KALEROANG, 04-04-1970
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : BLOK DUKU
RT/RW : 012/010
Kel/Desa : CIBUBUR
Kecamatan : CIRACAS
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA TIMUR
22-10-2017



4. SURAT KUASA (pernah bersidang di MK)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (The National Mandate Party)

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 062/PAN/B/KU-SJ/IV/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2024, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020, Dalam hal ini, memilih domisili hukum pada alamat kuasanya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemberi Kuasa.**

Dengan ini memberikan Kuasa kepada masing-masing yang disebutkan dibawah ini:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Delvi, S.H., M.H., (17.02353)
8. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
9. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
10. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
11. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
12. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
13. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
14. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
15. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
16. Azham Idham, S.H., (16.02552)
17. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)

18. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
19. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
20. Yusran, S.H., (15.02007)
21. Khaidir, S.H., (21.10797)
22. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)

Para Advokat dan Konsultan Hukum (*berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat terlampir*) yang tergabung pada "**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**", yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **Penerima Kuasa.**

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili dan mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Partai Politik, Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai **Pihak Terkait** dalam Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, atas Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Terhadap **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selaku **Termohon**, untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk **Daerah Pemilihan Papua Pegunungan**, yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat selaku **Pemohon** pada **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, RT/RW 2/3, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk itu Penerima Kuasa berhak dan berwenang menghadiri sidang pendahuluan, menghadiri sidang pemeriksaan dan agenda sidang lainnya dan/atau Penerima kuasa berhak menghadap dalam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Penerima Kuasa berhak dan berwenang membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Keterangan Pihak Terkait dan Eksepsi, Penerima Kuasa berhak dan berwenang mengajukan alat bukti surat-surat maupun elektronik dan alat bukti sah lainnya, berhak mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli, berhak membuat, menandatangani, dan mengajukan surat-surat baik permohonan-permohonan, keberatan-keberatan maupun surat-surat lainnya yang dianggap perlu, berhak menerima dan/atau menolak saksi-saksi Pemohon dan Termohon maupun pihak-pihak Terkait lainnya, berhak membuat, menandatangani dan mengajukan kesimpulan, berhak menghadiri pembacaan putusan, meminta dan/atau menerima salinan putusan dan apabila dianggap perlu Penerima Kuasa berhak menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, Pejabat-pejabat.

Tegasnya, Penerima Kuasa berhak melakukan segala upaya hukum yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan hukum Pemberi Kuasa, Surat Kuasa ini disertai hak pelimpahan (*substitusi*) baik sebagian maupun keseluruhan, disertai hak retensi.

Pemberi Kuasa



Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional

H. EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional

Penerima Kuasa

Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.

Pria Ramadhan Machmud, S.H.

Mohammad Umat Bahauddin, S.H., M.H.

Muhammad Wahyu, S.H.

Nur Fandy Panial, S.H.

Dr. Rahmat, S.H., M.H.

Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.

Fandy Irianto Djudjur, S.H.

Akbar Junaid, S.H.

Azham Idham, S.H.

Muhammad Amril Imran, S.H.

R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.

Delvi, S.H., M.H.

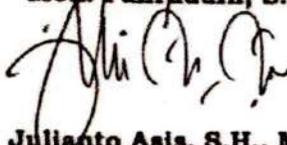
Anggara Suwahju, S.H.

Ramdhany Tri Saputra, S.H.

Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



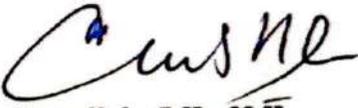
Audy Rahmat, S.H.



Yusran, S.H.



Khaidir, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1510/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

12 September 2024

Kepada Yth.

Managing Partner Sudding & Partners Law Firm

Bapak Fandy Irianto Djudjur, S.H.

di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sudding & Partners Law Firm bernomor 001/SP/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan dimaksud. Kami mengundang para advokat pada kantor Sudding & Partners Law Firm untuk menjadi peserta pada kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **3 (tiga)** orang advokat pada kantor Sudding & Partners Law Firm. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 15 Oktober 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-276548975240912105738

Lampiran I

Nomor : 1510/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 12 September 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **3 (tiga)** orang advokat pada kantor Sudding & Partners Law Firm.
- b. Membawa Surat Tugas dari kantor Sudding & Partners Law Firm yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- c. Sudding & Partners Law Firm memberikan daftar nama peserta sebanyak **3 (tiga)** orang paling lambat pada tanggal **15 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1510/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 12 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa, 22 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.00 – 16.00 WIB	Penjelasan SIMULTAN dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Rabu, 23 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Kamis, 24 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Jumat, 25 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 11.30 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	11.30 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1510/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 12 September 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										



Lampiran IV

Nomor : 1510/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 12 September 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Sudding & Partners Law Firm menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat
22 s.d. 25 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Sudding & Partners Law Firm
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 4526/DK.06.00/10/2024

10 Oktober 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum
Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Daerah

Kepada Yth.

Ketua Tim Hukum SANTRI

Bapak H. Wiyono, S.H.

di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Tim Hukum SANTRI bernomor 03/TIMHUK.SANTRI/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 perihal Permohonan Peserta Bimbték Pilkada serentak Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan dimaksud. Kami mengundang anggota Tim Hukum SANTRI untuk menjadi peserta pada kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **5 (lima)** orang anggota Tim hukum SANTRI sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 14 Oktober 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk17618156342410102410

Lampiran I

Nomor : 4526/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **5 (lima)** orang anggota Tim Hukum SANTRI.
- b. Membawa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen Tim Hukum SANTRI untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- c. Tim Hukum SANTRI memberikan daftar nama peserta sebanyak **5 (lima)** orang paling lambat pada tanggal **14 Oktober 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 4526/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 21 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.00 – 16.00 WIB	Penjelasan SIMULTAN dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 22 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 23 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 24 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 11.30 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	11.30 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 4526/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										



Lampiran IV

Nomor : 4526/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Tim Hukum SANTRI menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
21 s.d. 24 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Tim Hukum SANTRI
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 4510/DK.06.00/10/2024

09 Oktober 2024

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Perubahan Jadwal Kegiatan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

- 1. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)**
 - 2. Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhaki)**
 - 3. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (BPP PERADIN)**
 - 4. Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia)**
 - 5. Managing Partner Sudding & Partners Law Firm**
- di Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya penyesuaian jadwal kegiatan di Mahkamah Konstitusi, bersama surat ini kami sampaikan bahwa kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I** yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2024 berubah menjadi **21 s.d. 24 Oktober 2024**, yang bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk mengirimkan daftar nama peserta paling lambat **tanggal 14 Oktober 2024**. Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2007000282241009033901



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1860/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

18 Oktober 2024

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

(Nama Terlampir)

di Tempat

Dalam rangka evaluasi dan persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I serta persiapan agenda terdekat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
Tempat : Ruang Vicon, Grha Konstitusi 2
Waktu : Pukul 08.30 WIB - selesai
Agenda : 1. Evaluasi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III, Advokat Angkatan V, dan Civitas Akademika FH Univ. Musamus
2. Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri



Digital Signature
mk1654709747241018104545

Lampiran Surat

Nomor : 1860/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 18 Oktober 2024

Daftar Peserta Rapat

1. Mundiri
2. Santhy Kustrihardiani
3. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
4. Nanda Adityansyah
5. Bambang Sukmadi
6. Hadian Taofik Rochman
7. Santi Widiastuti
8. Medi Kurniadi
9. Muhlis Nova
10. Yahya Amarullah Taufik
11. Chafid Sugianto
12. Edwin Rivano
13. Suhardi
14. Angga Putri Gardina
15. Edwin Aditya Irawan
16. Andy Fahri





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1005/DK.06.00/07/2024

19 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin)

Ropaun Rambe M.Ad.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1592275639240717024143



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

19 Juli 2024

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

(Nama Terlampir)

di Tempat

Dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat pembahasan rencana kegiatan dengan target grup pada:

Hari, tanggal : Hari dan tanggal pada jadwal terlampir
Waktu : Waktu pada jadwal terlampir
Tempat : Luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/ Daring di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk331110044240718035631

Lampiran I

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

Daftar Peserta Rapat

1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Ardiansyah Salim
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Santhy Kustrihardiani
7. Nanda Adytiansyah
8. Andy Fahri
9. Angga Putri Gardina
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Edwin Rivano
13. Muhlis Nova
14. Suhardi
15. Yahya Amarullah Taufik



Lampiran II

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

Jadwal Rapat Koordinasi Bimtek PHP Kepala Daerah dengan Target Grup

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Peserta Rapat Eksternal
1	Senin, 22 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi KPU dan Bawaslu	1. KPU 2. Bawaslu
2		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Wartawan dan Akademisi	1. Achmad Dodi Haryadi (Kasubbag Humas) 2. FH IKA UNAND
3	Selasa, 23 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan I	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4. Partai Golongan Karya (Golkar) 5. Partai Nanggroe Aceh (PNA) 6. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat)
4		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan II	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Partai Demokrat 5. Partai Darul Aceh 6. Partai Aceh



No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Peserta Rapat Eksternal
5	Rabu, 24 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Buruh 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 5. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 6. Partai Bulan Bintang (PBB) 7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 8. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10. Partai Adil Sejahtera Aceh 11. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia 12. Partai Ummat
6		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peradi Otto 2. Perhakhi 3. Peradin 4. DPN Ind
7	Senin, 29 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan II	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAI SJL 2. Ferari 3. Peradan 4. Peradi Luhut
8		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan III	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAI TSH 2. Peradi Juniver 3. IKADIN 4. DPP ABI
9	Selasa, 30 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengacara MK 2. FPK 3. IPHI 4. Serikat Pengacara Indonesia 5. BPP PAI 6. KAI Erman
10		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Jawa Tengah





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 665/ST.SPD/2000/10/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 21 Oktober 2024
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1354146493241021100100

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 665/ST.SPD/2000/10/2024

Tanggal : 21 Oktober 2024

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	21 Oktober 2024
2.	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	21 Oktober 2024
3.	Fajar Laksono	Narasumber	22 Oktober 2024
4.	Ida Ria Tambunan	Narasumber	22 Oktober 2024
5.	Triyono Edy Budhiarto	Narasumber	24 Oktober 2024
6.	Rizki Amalia	Narasumber	23 Oktober 2024
7.	Ria Indriyani	Narasumber	23 dan 24 Oktober 2024
8.	Dian Chusnul Chatimah	Narasumber	23 dan 24 Oktober 2024
9.	Bisariyadi	Narasumber	23 dan 24 Oktober 2024
10.	Helmi Kasim	Narasumber	23 dan 24 Oktober 2024
11.	Nanda Adytiansyah	Narasumber	22 Oktober 2024
12.	Ishak Purnama	Narasumber	22 Oktober 2024





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 47/ST.SPD/2600/10/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi dan PT Sigma Cipta Caraka, Jakarta

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai pendukung pada persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 20 s.d. 24 Oktober 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Oktober 2024
an. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk182354854241023075316

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 47/ST.SPD/2600/10/2024

Tanggal : 18 Oktober 2024

**PENDUKUNG KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Elin Asrofah Qibtiah	Moderator	23 s.d. 24 Oktober 2024
2	Teguh Birawa Putra	Penata Desain Grafis	20 s.d. 24 Oktober 2024
3	Ilham Wiryadi Muhammad	Pranata Humas	20 s.d. 24 Oktober 2024
4	Roy Setiana	Teknisi Videotron	20 s.d. 24 Oktober 2024
5	Rizky Pangkualam	Driver Karo HAK	22 Oktober 2024
6	Romadhany Sofyan	Driver Panmud III	22 Oktober 2024
7	Imam Suryadi	Driver Panmud I	24 Oktober 2024



SURAT TUGAS

Nomor : 001/PERADI-DPN/ST/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Perhimpunan Advokat Indonesia menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Asal DPD/DPC
1	H. Edy Rudyanto, S.H.	Ketua DPC PERADI Sidoarjo	DPC Sidoarjo
2	Erwin Romel Sinaga, S.H., M.H.	Wakil Ketua Organisasi DPN PERADI	DPN PERADI
3	Heri Susanto, S.H., M.H.	Sekretaris DPC PERADI Bogor Raya	DPC Bogor Raya
4	Romeo Varry Tumbel, S.H.	Sekretaris DPC PERADI Manado	DPC Manado
5	Ana Sofa Yuki, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Pendidikan Lanjutan DPN PERADI	DPN Pusat
6	Indra Rinaldy Isman, S.H.	Anggota DPC PERADI Sukabumi	DPC Sukabumi
7	Dendi Mulyadi, S.H.	Anggota DPC PERADI Sukabumi	DPC Sukabumi
8	Fajar Shiddieq, S.H., M.H.	Anggota DPC PERADI Sukabumi	DPC Sukabumi

9	Sofyan Syahputra, S.H.	Sekretaris DPC PERADI Deli Serdang	DPC Deli Serdang
10	Diana Prima Penyami, S.H., M.H.	Wakil Bendahara Umum DPN PERADI	DPN PERADI
11	Ratih Mutiara Louk Fanggi, SH.,MH.	Wakil Ketua II DPC PERADI Mataram	DPC Mataram
12	Mila damayanti, S.H.	Anggota DPC PERADI Mataram	DPC Mataram
13	Suryanto, S.H., M.H.	Bendahara DPC PERADI Kediri Raya	DPC Kediri Raya
14	Teguh Kayen, S.H.	Humas DPC PERADI Salatiga	DPC Salatiga
15	Wawan Sugiarto, S.H., M.H.	Sekretaris DPC PERADI Madiun Raya	DPC Madiun Raya
16	Arista Hidayatul Rahmansyah, S.H., M.H.	Anggota DPC PERADI Madiun Raya	DPC Madiun Raya
17	Agus Widodo, S.H.,	Anggota DPC PERADI Madiun Raya	DPC Madiun Raya
18	Dr. Ramdhan Kasim, S.H.	Ketua DPC PERADI Gorontalo	DPC Gorontalo
19	Atmowicahya D. Virgito, SH,MH.	Anggota DPC PERADI Gorontalo	DPC Gorontalo
20	Muhammad Furqon, S.H., M.H.	Anggota DPC PERADI Gorontalo	DPC Gorontalo
21	Arteria Dahlan, S.T., S.H.,M.H.	Anggota DPC Peradi Jakarta Selatan	DPC Jakarta Selatan
22	Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H.	Ketua Komite PKPA dan UPA DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo

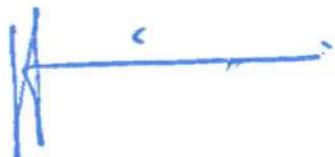
23	Martono, S.H., M.H.	Ketua Komite UPA DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo
24	Purwanto, S.H.	Bendahara DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo
25	Susanto, S.H., M.H.	Anggota Posbakum DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo
26	Ainun Abror, S.H.	Anggota DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo
27	Eko Susiati, S.H., M.H.	Wakil Bendahara DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo
28	Eko Arief Cahyono, S.H., M.H.	Anggota DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo
29	Pandu Adie Wijaya, S.H.	Ketua Komite PKPA DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo
30	Hartono, S.H.	Ketua Dewan Pakar DPC Peradi Sidoarjo	DPC Sidoarjo

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis**
21 s.d. 24 Oktober 2024

Tempat : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,**
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPN PERADI


Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Ketua Umum




Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.
Sekretaris Jenderal

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Jeanette Rugebregt, SH. MH	Ambon	10/10/1967	Perempuan	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Depok	081382466161	jeanetterugebregt@yahoo.com
2	Jeanne Jolanda Loppies, SH	Ambon	6/13/1967	Perempuan	S1	DPD Maluku	Anggota	Jl. Sirimau No 63, Bere Bere, Ambon	082160456084	enollawattimena26@gmail.com
3	Siti Khatijah, M.SH	Jakarta	3/24/1967	Perempuan	S1	DPD DKI Jakarta	Anggota	Tanjung Priok	08129050682	tjahmalawat@gmail.com
4	Sudiyono Akbar, S.H. M.H, M.A.P.	Lok Werin	11/10/1967	Laki-laki	S2	DPC Cirebon	Ketua DPC	KP. Poncol, Bekasi Selatan	081314284418	akbaradvocaten@gmail.com
5	Dasu Susilo, SH	Salatiga	10/10/1969	Laki-laki	S1	DPC Bekasi	Anggota	Kemang Irfi Graha D6/16, Jati Asih, Bekasi	081288407459	susilodasa@gmail.com
6	Dewi Wiwiek, SH. Mkn	Sragen	12/28/1978	Perempuan	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jakarta Selatan	085959282812	adindaintan09@gmail.com
7	Dr. N. R. Indriati, SH. SE. MH. Mkn.	Gorontalo	5/28/1964	Perempuan	S3	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jl. Pulomas Barat X No. 11, Jakarta Timur	0811503726	indriatirusiana@gmail.com
8	Sri Widoyanti, SH	Jakarta	25-03-19969	Perempuan	S1	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jakarta Selatan	085780367088	sriwidoyanti145@gmail.com
9	Jacob Resimau SH	Ambon	2/26/1967	Laki-laki	S1	DPC Bekasi	Pengurus DPC	KP. Rawa Aren, Bekasi timur	081319160726	biacob20222@gmail.com
10	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang, SH	Barus	10/5/1974	Laki-laki	S1	DPC Depok	Anggota	Depok	087877659460	ahmadkamalarifin61@gmail.com
11	Dr. Robby Dareho, S.H, M. Th	Enemawira	9/18/1951	Laki-laki	S3	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jl. Central Park 3 No. 51, Grand Galaxy City, Bekasi	081212898222	robbydareho1951@gmail.com
12	Sandra Tetelepta SH	Ambon	1/9/1968	Perempuan	S1	DPD Maluku	Anggota	Jl. Wolter Monginsidi, Ambon	081270785291	rensasan6@gmail.com
13	Ade Salamah, SH. MH	Jakarta	1/29/1977	Perempuan	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jl. Gondangdia Baru No 2, Bekasi	0817744156	mynamesade77@yahoo.co.id
14	Marc Duphariandi, SH	Makassar	3/15/1987	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Anggota	Ujung Pandang, Makassar	081282363447	dupduph@gmail.com
15	Dr. Kurnia Zakaria, SH. MS	Serang	10/25/1972	Laki-laki	S3	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPC	Duren Sawit, Jakarta Timur	0818912707	kurniazakaria.jacklawyer@gmail.com
16	Rina Tauran, SH. MH	Ambon	7/9/1966	Perempuan	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Cipayung, Jakarta Timur	081110097999	rinatauran@yahoo.com
17	Elianta Ginting, SH. MH	Medan	8/20/1972	Perempuan	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Gg. Buni, Jakarta Selatan	085217172905	elianta.ginting20@gmail.com
18	Deasy Anna Victorina S, SH	Jakarta	9/30/1982	Perempuan	S1	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jl. Raya Poncol, Jakarta Timur	081908237377	deasylawyer@gmail.com
19	Jeffry Palijama, SH	Ambon	10/20/1962	Laki-laki	S1	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Depok	081617431686	jeffpal2010@gmail.com
20	Lenarki Latupeirissa, SH. MH	Pulau Osi	11/21/1969	Laki-laki	S2	DPC Bekasi	Anggota	Bekasi	081310152466	ekilatuz1@gmail.com
21	Leonora Siruang, SH	Ambon	10/9/1966	Perempuan	S1	DPD Maluku	Anggota	Rumah Tiga, Ambon	081247941118	siruung.noor@gmail.com
22	Prihatin Kusdini, SH. MH	Palembang	8/2/1965	Perempuan	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jl. Karet Belakang, Jakarta Selatan	087889181645	kusdini1965@gmail.com
23	Anugrah Yanuar Riswandi, SH	Jakarta	1/29/1982	Perempuan	S1	DPC Bekasi	Ketua DPC	Graha Indah A8/6B, Jati Asih	081282067166	nanda29011982@gmail.com
24	Azimatus, SH	Tegal	12/28/1965	Perempuan	S1	DPD DKI Jakarta	Anggota	Jl. Kesatrian IX Blok K/2, Jakarta Timur	085215307398	azimatus.afrizon@gmail.com
25	Martiniingsih, SH, MH.	Jakarta	3/25/1962	Perempuan	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Komp. Pwi Blok F-92, Jakarta Timur	082112596069	ningmartini@gmail.com
26	Georgian Obertha, S.H.	Jakarta	08/10/1981	Laki-laki	S1	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan	0818897986	georgian.obertha@gmail.com
27	Sapto Wibowo Sutanto, S.H	Jakarta	10/7/1984	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Ketua	Jakarta	081385827172	wibenkfachriwibenkfachri@gmail.com
28	Ruben fritson, SH	Jakarta	8/14/1997	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Pengurus DPD DKI	Jl. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	087881440586	rubenfritson148@gmail.com
29	Robert Suradi, SH	Jakarta	6/11/1963	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Anggota	Sukamaju, Cilandong	087882857228	robertsuradi6@gmail.com
30	Ir. H. Vidi Galenso Syarif, SH. M.H. CMLC. CCD	Tegal	6/12/1965	Laki-laki	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	Jakarta	0811846021	vigalsya126@gmail.com
31	Dwi Nofitanti, SM, ANZIF (Assoc) CIP, SH., M.H., C	Jakarta	11/3/1979	Perempuan	S2	DPP DKI Jakarta	Anggota	APT. GREEN PRAMUKA CITY	08118838838	dwinofitanti2@gmail.com
32	Taufik Hidayat, SH	Jakarta	4/22/1983	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Anggota	Bendungan Udik	082112345545	vandamme_indo@yahoo.com
33	Agung M. Akbar Gunawan, SH	Bulukumba	11/23/1994	Laki-laki	S1	DPP DKI Jakarta	Anggota	Kembangan, Jakarta Barat	088295570420	Agungakbargunawan@gmail.com
34	Moh Mahdi, SH.	Jakarta	9/3/1963	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Anggota	Kampung Melayu, Jatinegara	0818476217	mahdimadali8@gmail.com
35	A. Bashar, SH. MH	Ujung Pandang	12/21/1977	Laki-laki	S2	DPP DKI Jakarta	Waketum DPP	Tebet, Jakarta Selatan	08111977254	aurorathalia@yahoo.com
36	Tuti Susilawati, SH	Jakarta	1/18/1983	Perempuan	S1	DPP DKI Jakarta	Anggota	Kalideres	087866139457	email.tsadanrekan@gmail.com
37	Ikhsyan Suprasetia, SH	Jakarta	9/29/1990	Laki-laki	S1	DPC DKI Jakarta	Anggota	Cipayung, Jakarta Timur	087877444286	suprasetva@gmail.com
38	Bayu. Propesta, SH	Cirebon	9/9/1990	Laki-laki	S1	DPC Cirebon	Anggota	Arjawanangun, Cirebon	081324644770	bayupropesta0909@gmail.com
39	Yudha Adhi Oetomo, SH	Bandung	5/4/1979	Laki-laki	S2	DPP DKI Jakarta	Pengurus DPP	KP. Poncol, Tanggerang	081310008179	yudha.adhi.oetomo@gmail.com
40	Indra Kusuma, SH	Jakarta	9/30/1961	Laki-laki	S1	DPC Depok	Pengurus DPC	Vila Pertiwi, Cilandong, Depok	081994993087	bovnurdin30@gmail.com

No.	Nama Lengkap (beserta Gelar Akademik)	Asal BPP / BPW Provinsi	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat Domisili Lengkap (sesuai Tempat Tinggal saat ini)	No HP	Email
1	Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.	BPP	Probolinggp	12/02/69	Pria	S2	Ketua Umum	Jakarta	0812-1989-1969	sekretariat.peradin@gmail.com
2	Tina Haryaningsih Tamher, S.H.,M.H.	BPP	Surabaya	25/02/70	Wanita	S2	Staff	Jl. H. Mahdi No. 107 RT 008/005	0811963003	firmanwijayaandpartners@gmail.com
3	Dr. Hendrik Eddy Pumomo, S.H., M.H., ACIArb., C.Med.	BPP	Balikpapan	20/05/55	Pria	S3	Sekretaris Jenderal	Jakarta	0811-192-352	hendrik.ep@gmail.com
4	EDISON, S.H.	BPP	Lampung	26/02/71	Pria	S1	Wasekjen	Cipayung Girang,, kec Megamendung kab.bogo	0811260271	edi.sonys26@gmail.com
5	Stefani Widayastuti	BPP	Surabaya	06/06/84	Wanita	S1	Sekretariat	Jakarta	0811-865-6677	stewidy.stewidy@gmail.com
6	Abdul Majid, S.Pi., M.H.	BPP	Tegal	06/10/89	Pria	S2	Sekretariat	Bogor	0822-2022-3576	info.gha@gmail.com
7	Ridwan Syahbani Tamher	BPP	Bekasi	10/11/01	Pria	S1	Staff	Jl Danita 2 Blok D14 Kelurahan Bekasi Jaya Kec	081290309838	ridwansyahbani10@gmail.com
8	Rezzy Akbar Yudoprakoso	BPP	Surabaya	26/06/97	Pria	S1	Staff	Horison Suites & Residences, Jln. HR Rasuna S.	08118840527	rezzyakbar@gmail.com
9	Daniel Mubarach	BPP	Jakarta	02/05/97	Pria	S1	Staff	Jl. Kayu Jati IV No. 24 RT. 009/ RW. 004, Kecar	08118493900	dnimubarach@gmail.com
10	Sindya A.M.	BPP	Jakarta	17/07/03	Wanita	S1	Staff	Jl. Pasir No. 17, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Se	085159240407	sindyamatta@gmail.com
11	Jasmine Salsabila Mulya	BPP	Jakarta	22/08/03	Wanita	S1	Staff	Jalan Alle Raya No.21A, Rempoa	085716524118	jasmine.salsabilah22@gmail.com
12	ALI MUKTHAMAR, S.H	BPW Lampung	Karang Anyar	01/10/86	Pria	S1	Ketua	Dusun Banyumas RT 04 RW 01 Desa Tanjung S	082114091273	alimukthamar@gmail.com
13	Basharuddin., S.H	BPW Lampung	Telukbetung	02/06/71	Pria	S1	Sekretaris	Perum. Pesona Alam Jln. Karya Bakti Gg. Jasen	082179319232	bustambasharuddin@gmail.com
14	Rizal Aprian Syarif, SH	BPW Sumatera Selatan	Palembang	05/04/79	Pria	S1	Anggota	Jl langgar RT 44 RW 06 Kel Sukamaju kec SA	081367273829	rizaladvokat@gmail.com
15	SUPENDI,SH,MH,CLA	BPW Sumatera Selatan	Palembang	27/11/80	Pria	S3	Ketua BPC Kota Palembang	Jalan suka bangun II komplek Arisma Sejahtera	085386681222	kantorhukumsupendi@gmail.com
16	MUHAMMAD RAMDHAN ULAYO	BPW Banten	Ambon	7/3/0087	Pria	S2	Anggota	Serpong Jaya Cluster The Groove Blok N 15	0811111590	lawfirmulayo@gmail.com
17	Nurchayo Dwi Haryanto, S.S., S.H.	BPW Banten	Jakarta	14/08/84	Pria	S1	Anggota	JL. Rusa III No.8 RT.003/RW.009, Kelurahan Cil	0818695557	nurchayo.haryanto@gmail.com
18	Yanti Widianti, S.H., M.H	BPW Banten	Jakarta	07/09/68	Wanita	S2	Kabid Pendidikan	Cluster Pamulang Asri 2 Blok B-2 RT.14/08 Pon	082124877585	y730750@gmail.com
19	Yayan Susianto., S. H.	BPW Banten	Indramayu	09/12/83	Pria	S1	Anggota	Desa. Juntiweden Rt. 01 Rw. 02 Kec. Juntinyua	085769186667	yayan.Susiantotrans7@gmail.com
20	ADV. Dr (C) Muhamad Zarkasih,SH.,MH.,MSi,	BPW DKI Jakarta	Jakarta	16/08/61	Pria	S3	KETUA BPW PERADIN JKT	Legenda Wisata , Cibubur	08120312039	zakadilaga@gmail.com
21	Firdaus, S.H	BPW DKI Jakarta	Jakarta	30/09/71	Pria	S1	Wakil Ketua 1	JL. GILIMANUK I NO. 5 TAMAN LEMBAH HIJAU	085851579568	paradisegel@gmail.com
22	Anang Susanto	BPW DKI Jakarta	Semarang	10/21/1060	Pria	S1	Komite PPA	Pondok Surya Mandala Blok Q1 No.15 Rt.06 Ru	082110211960	Anangsusanto960@gmail.com
23	Mulih,SH	BPW DKI Jakarta	Jakarta	16/02/80	Pria	S1	Pengurus	Kavling dki blok 137 no 32 meruya selatan jakar	081254005800	mobiplasindo@gmail.com
24	Septinur dadang S.H	BPW DKI Jakarta	Bintuhan	06/09/70	Pria	S1	Pengurus	Jln pule kav. H. Ishak rt 13/04 no 60.kelurahan	081287550135	nur.hayati.fad@gmail.com
25	ACHMAD TRISANA MARSEDA, SH	BPW Jawa Barat	Tasikmalaya	22/04/65	Pria	S1	Anggota Bidang Hukum Paslon	Jl. Ligar Mayang No. 36 Bukit Ligar - Bandung	082115229136	marseha.adv@gmail.com
26	H. AMIR AMIRULOH, S.H.	BPW Jawa Barat	TASIKMALAYA	11/02/70	Pria	S1	ANGGOTA	Jl.Bersih Kampung Cipayung No.53 RT 001 RW	087873322331	h.amirulohh@gmail.com
27	Hendri Dama Putra, S.H., M.H.	BPW Jawa Barat	Sungai Penuh	24/06/72	Pria	S2	Sekretaris BPC Kota Bandung	Jl. Kemakmuran II No. 364 Rt 05 RW 11 Kel. De	0811230311	hendridamputra10@gmail.com
28	Kevin Fauzi Abdul Fiqor, S.H	BPW Jawa Barat	Karawang	27/02/01	Pria	S1	Anggota	Jl. Paledang Gg. Ramayana III, RT 009 RW 017	083130272001	kevinfauzi46@gmail.com
29	SUTAN SYAHRUDIN, S.H	BPW Jawa Barat	Bogor	30/05/95	Pria	S1	Anggota	Jl. Sukasari I No. 47, RT 2 RW 2 Kel. Sukasari, h	08176668884	sutansyahrudinlawyer@gmail.com
30	Ega Battista, S.H.	BPW Jawa Tengah	Jakarta	16/05/86	Pria	S1	Partner	Jalan Pondok Bandung, RT 014/ RW 002, Kota	085697772187	egarockz16@gmail.com
31	Marselinus Edwin Hardhian, S.H., CMLC.	BPW Jawa Tengah	Surakarta	24/03/94	Pria	S1	Partner	Jalan Budi Swadaya Nomor 51, RT 015/RW 004	089601930499	edwinlawfirm24@gmail.com
32	Selmi Afif	BPW Jawa Tengah	Jakarta	24/04/94	Pria	S1	Partner	Jalan Jati Bunder VII, RT 016/RW 009, Kebon K	08111877750	selmiaff094@gmail.com
33	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN, A.Md.T., S.H.	BPW Jawa Timur	Ponorogo	28/06/00	Pria	S1	Anggota	Jalan Danau Bratan Timur H5 No. A1, Kota Malé	082332914889	agungrizkhi@gmail.com
34	Dr. Ir. HADI PRAJOKO, S.H., M.H.	BPW Jawa Timur	Sidoarjo	21/02/63	Pria	S3	Pengurus BPP	Jalan Danau Bratan Timur H5 A2, Sawo Jajar, K	085100555339	advokathadiprajoko@gmail.com
35	NURUL HUDAH., S. E., S. H., M. H.	BPW Jawa Timur	JOMBANG	06/02/79	Pria	S2	KETUA KOMISI PERBANKAN BPW	Pondok karang indah 3/U-4 Dsn. Tanggal pager	081225484179	hdwahyu16@gmail.com
36	HASRAN, S.H., M.Hum	BPW Jawa Timur	MAKASSAR	19/05/66	Pria	S2	ANGGOTA	PERUMAHAN GUNUNGSARI INDAH AA.12 KEL	081235550287	hasrancobra86@gmail.com
37	Ronald Budi Laksmna, S.H., M.H.	BPW Jawa Timur	Surabaya	15/04/75	Pria	S2	Ketua BPC Malang	Jalan Bromo No 445 RT 19 RW 05, Kelurahan N	082141092455	Ronaldbudilaksmna45@gmail.com
38	SUBALI, SH, MH	BPW Jawa Timur	Kalijati	26/05/57	Pria	S2	ADVOKAT	JL. KAHAYAN NO. 18 KEL. RANDUAGUNG, KE	082141373494	kantorhukum.kahayan18@gmail.com
39	Wimbo Bintoro, SH.	BPW Jawa Timur	Purworejo	14/10/24	Pria	S1	Komisi perbankanq peradin anggota	Perum GKGA Blok DD no 1 Kedayang keborr	085704473250	wimbisonoraharjo@gmail.com
40	Supardi,SH.,MH.	BPW Kalimantan Timur	Labokong	15/06/68	Pria	S2	Ketua BPC Peradin Samarinda	Jln A Samad gg Kenari RT 28 Kel Pelita Kec Sa	08125500722	jalanbugis49@gmail.com
41	Sapandun, S.H., M.H.	BPW Kalimantan Timur	Ngadang	22/12/80	Pria	S1	Anggota	Jalan Melak I RT/RW 024/000 kel/Desa Loa Iput	081385715718	-
42	Muhammad Dziquillah	BPW Sumatera Selatan	Kayu Agung	05/05/99	Pria	S1	Komite PPA	Jalan Mapalus C 11, Pegangsaan Dua, Kelapa	88287154997	muhammaddziquillah39@gmail.com

SURAT TUGAS

No. .../ST-BMK/DPNI/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Presiden dan Sekretaris Jendral Dewan Pengacara Nasional Indonesia menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW
1.	Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.	Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
2.	Faris Elhaq Sukrisman, S.H.	Sekretaris Jendral Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
3.	Faiz Fikry, S.H.	Bendahara Umu Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
4.	Faruqi Robbani, S.H., M.Kn.	Managing Direktur LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
5.	M. Fauzul Adzim, S.H., M.H	Direktur Pidana LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
6.	Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H.	Direktur Perdata LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
7.	Zevi, S.H.	Direktur Magang dan Keanggotaan LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI

8.	Sherena Octaria, S.H.	Ketua Kartini Advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
9.	Delvina Marferita, S.H.	Kartini Advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
10.	Ririen Aryani, S.H., M.H.	Direktur Kurikulum FHP Mediasi Indonesia	DPNI
11.	Miftachul Isti Almaidhah, S.H.	Kartini Advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
12.	Vania Devi Novitasari, S.H.	Kartini Advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia	DPNI
13.	Ihsan Firmansyah, S.H.	Anggota	DPNI
14.	Hendrik Ruben Gelong, S.H., M.H.	Anggota	DPNI
15.	Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M., M.I.Kom	Anggota	DPNI
16.	Debora Anggie Noviana, S.H.	Anggota	DPNI
17.	Sunny Shilby, S.H.	Anggota	DPNI

18.	Glory M.M Marbun, S.H.	Anggota	DPNI
19.	Febrina Aulya Rabbani, S.H., M.Kn., CTL., C.SH., C.NSP	Anggota	DPNI
20.	Haerul Kusuma, S.H.	Anggota	DPNI
21.	Sarah Kamila Elislamy, S.H.	Anggota	DPNI
22.	Maya Mey Sindy, S.H.	Anggota	DPNI
23.	Arnold Pohan, S.H.	Anggota	DPNI
24.	Febrina Anggi Nurrahmadani, S.H.	Anggota	DPNI
25.	Lisa Rochmilayali, S.H.	Anggota	DPNI
26.	Saupi Hasbi, S.H., C.Med.	Anggota	DPNI
27.	Ito Lawputra, S.H., S.I.Kom., M.H.	Anggota	DPNI

28.	Tiko Wahyudi, S.H.	Anggota	DPNI
29.	Rohadi, S.H.	Anggota	DPNI
30.	Rifyan Ridwan Saleh, S.H., M.H.	Anggota	DPNI
31.	Arif Rahman Hakim, S.H.	Anggota	DPNI
32.	Sahrul Hikam, S.H.	Anggota	DPNI
33.	Muhammad Faisal Akbar, S.H., M.Kn.	Anggota	DPNI
34.	Abraham Yesaya Runtu, S.H.	Anggota	DPNI
35.	Yosef Exel Pinondang Hutajulu, S.H.	Anggota	DPNI
36.	Arni Juniasti, S.H.	Anggota	DPNI
37.	Reizal Norman Mustamu, S.H.	Anggota	DPNI



38.	Yusron Hidayat, S.H.	Anggota	DPNI
39.	Paulus Yohanes Lendes, S.H.	Anggota	DPNI
40.	Syafuruddin, S.T., S.H.	Anggota	DPNI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis**
21 s.d. 24 Oktober 2024

Tempat : **Pusat Pendidikan Pancasila dan**
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83,
Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPN Indonesia

Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.
Presiden

Faris Elhaq Sukrisman, S.H.
Sekretaris Jenderal



SUDDING & PARTNERS LAW FIRM

Madalle Graha 3th Floor Jl. Falatehan I No. 1, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Phone/Fax : +6221 27094501 | Email : suddinglawfirm@gmail.com | www.suddinglawfirm.com

SURAT TUGAS

Nomor: 001/MK-S&P/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Managing Partner Sudding & Partners Law Firm menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Kantor Law Firm
1.	RAHMANSYAH FIKRIADIN, S.H.	Advokat	Sudding & Partners
2.	YUSRIL, S.H.	Paralegal	Sudding & Partners
3.	TAUFIK HUSAIN, S.H.	Paralegal	Sudding & Partners

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat

21 s.d. 24 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Sudding & Partners Law Firm

Fandy Arianto Djujur, S.H.
Managing Partner

SURAT TUGAS

NOMOR: 07/TIMHUK.SANTRI/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Tim Hukum SANTRI menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.	Ahmad Triswadi S.E., S.H., M.H	Wakil Ketua	Tim Hukum Santri Kudus Jawa Tengah
2.	Naskan S.Hi., M.H	Sekretaris	Tim Hukum Santri Kudus Jawa Tengah
3.	Agung Siswanto S.H	Wakil Sekretaris	Tim Hukum Santri Kudus Jawa Tengah

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
21 s.d. 24 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Tim Hukum SANTRI


Ketua
H Wiyono S.H.


Sekretaris
Naskan S.Hi., M.H



Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Debora Anggie Noviana	21-10-2024 14:35:14 WIB
	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	21-10-2024 14:35:45 WIB
	Glory M.M Marbun	21-10-2024 14:35:49 WIB
	Abraham Yesaya Runtu	21-10-2024 14:36:17 WIB
	Hendri Darma Putra	21-10-2024 14:36:55 WIB
	ACHMAD TRISANA MARSEDA	21-10-2024 14:37:05 WIB
	Muhamad Zarkasih	21-10-2024 14:37:36 WIB
	Parlin Silitonga	21-10-2024 14:38:00 WIB
	ALI MUKTHAMAR	21-10-2024 14:39:03 WIB
0	Ratih Mutiara Louk Fanggi	21-10-2024 14:39:04 WIB
1	Yayan Susianto	21-10-2024 14:39:24 WIB

IO	NAME	TTD
2	Ito Lawputra	21-10-2024 14:40:03 WIB
3	Sunny Shilby	21-10-2024 14:42:28 WIB
4	Dendi Mulyadi	21-10-2024 14:42:39 WIB
5	Yanti Widiyanti	21-10-2024 14:43:20 WIB
6	Ronald Budi Laksmna	21-10-2024 14:43:24 WIB
7	Ridwan Syahbani Tamher	21-10-2024 14:43:25 WIB
8	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	21-10-2024 14:44:19 WIB
9	Purwanto	21-10-2024 14:44:43 WIB
0	Sahrul Hikam	21-10-2024 14:45:30 WIB
1	HADI PRAJOKO	21-10-2024 14:45:59 WIB
2	Maya Mey Sindy	21-10-2024 14:46:03 WIB
3	Martono	21-10-2024 14:46:13 WIB
4	Saupi Hasbi	21-10-2024 14:46:34 WIB

IO	NAME	TTD
5	Syamsul Jahidin	21-10-2024 14:46:36 WIB
6	Diana Prima Penyami	21-10-2024 14:46:38 WIB
7	Miftachul Isti Almaidhah	21-10-2024 14:46:45 WIB
8	Delvina Marferita	21-10-2024 14:46:51 WIB
9	Zevi	21-10-2024 14:48:13 WIB
0	Indra Rinaldy Isman	21-10-2024 14:50:38 WIB
1	Fajar Shiddieq	21-10-2024 14:50:53 WIB
2	ARNI JUNIASTI ARAS	21-10-2024 14:51:06 WIB
3	Suryanto	21-10-2024 14:51:07 WIB
4	Septinur Dadang	21-10-2024 14:51:09 WIB
5	Atmowicahya D. Virgito	21-10-2024 14:51:22 WIB
6	Vania Devi Novitasari	21-10-2024 14:51:36 WIB
7	Ainun Abror	21-10-2024 14:51:37 WIB

IO	NAME	TTD
8	Febrina Anggi Nurrahmadani	21-10-2024 14:51:39 WIB
9	Haerul Kusuma	21-10-2024 14:52:32 WIB
0	AMIR AMIRULOH	21-10-2024 14:56:02 WIB
1	AMIR AMIRULOH	21-10-2024 14:56:03 WIB
2	Moch. Choirul Hamsyah	21-10-2024 14:56:10 WIB
3	Marselinus Edwin Hardhian	21-10-2024 14:56:51 WIB
4	Pandu Adie Wijaya	21-10-2024 14:58:02 WIB
5	Muhamad Fauzul Adzim	21-10-2024 14:59:11 WIB
6	Sofyan Syahputra	21-10-2024 14:59:13 WIB
7	Tiko Wahyudi	21-10-2024 14:59:34 WIB
8	Selmi Afif	21-10-2024 15:01:36 WIB
9	Sarah Kamila El Islamy	21-10-2024 15:01:53 WIB
0	Eko Susiati	21-10-2024 15:02:10 WIB

IO	NAME	TTD
1	Suryanto	21-10-2024 15:03:19 WIB
2	HASRAN	21-10-2024 15:03:52 WIB
3	Ega Battista	21-10-2024 15:04:22 WIB
4	Abdul Majid	21-10-2024 15:04:43 WIB
5	EKA SUSOPRANININGSIH PUTRI TRISNAWATI	21-10-2024 15:04:52 WIB
6	Eko Arief Cahyono	21-10-2024 15:05:58 WIB
7	REIZAL NORMAN MUSTAMU	21-10-2024 15:07:06 WIB
8	Lisa Rochmilayali	21-10-2024 15:09:23 WIB
9	Ary Fiermawan	21-10-2024 15:10:03 WIB
0	Georgian Obertha	21-10-2024 15:10:57 WIB
1	Ade Salamah	21-10-2024 15:12:08 WIB
2	Edy Rudyanto	21-10-2024 15:14:09 WIB
3	Wawan Sugiarto	21-10-2024 15:14:44 WIB

IO	NAME	TTD
4	SUSANTO	21-10-2024 15:15:24 WIB
5	DODI WINARDI	21-10-2024 15:15:40 WIB
6	RISKAL M. YAKUB	21-10-2024 15:17:30 WIB
7	HERLIN BALI MURYANTI	21-10-2024 15:18:59 WIB
8	Hartono	21-10-2024 15:21:28 WIB
9	Anugrah Yanuar Riswandani	21-10-2024 15:21:31 WIB
0	Muhammad Faisal Akbar	21-10-2024 15:21:33 WIB
1	YUSRIL	21-10-2024 15:21:33 WIB
2	Arista Hidayatul Rahmansyah	21-10-2024 15:21:34 WIB
3	Ihsan Firmansyah	21-10-2024 15:21:34 WIB
4	Ririen Aryani	21-10-2024 15:21:36 WIB
5	SUTAN SYAHRUDIN	21-10-2024 15:21:40 WIB
6	Agus Widodo	21-10-2024 15:21:45 WIB

IO	NAME	TTD
7	PAULUS Y. LENDES	21-10-2024 15:21:52 WIB
8	PAULUS Y. LENDES	21-10-2024 15:21:53 WIB
9	MUHAMMAD RAMDHAN ULAYO	21-10-2024 15:21:53 WIB
0	Charles M. Tampubolon	21-10-2024 15:22:05 WIB
1	Reta Novita Sari	21-10-2024 15:22:17 WIB
2	RAHMANSYAH FIKRIADIN	21-10-2024 15:22:20 WIB
3	TAUFIK HUSAIN	21-10-2024 15:22:52 WIB
4	Jacob Resimau	21-10-2024 15:23:01 WIB
5	Hendrik Ruben Gelong	21-10-2024 15:23:12 WIB
6	HERI SUSANTO	21-10-2024 15:23:17 WIB
7	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	21-10-2024 15:23:26 WIB
8	Rifyan Ridwan Saleh	21-10-2024 15:23:45 WIB
9	Saparudin	21-10-2024 15:23:45 WIB

IO	NAME	TTD
0	Erwin Romel Sinaga	21-10-2024 15:25:10 WIB
1	Faruqi Robbani	21-10-2024 15:25:45 WIB
2	Arif Rahman Hakim	21-10-2024 15:28:02 WIB
3	Indriati	21-10-2024 15:29:01 WIB
4	Romeo Varry Tumbel	21-10-2024 15:33:38 WIB
5	Wiwik Winarsih	21-10-2024 15:35:56 WIB
6	Wimbo Bintoro	21-10-2024 15:37:10 WIB
7	Bayu Propesta	21-10-2024 15:37:49 WIB
8	Dasa Susilo	21-10-2024 15:38:24 WIB
9	Sudiyono Akbar	21-10-2024 15:42:07 WIB
00	RATNA HERLINA SURYANA	21-10-2024 15:46:34 WIB
01	Febrina Aulya Rabbani	21-10-2024 15:50:40 WIB
02	Martiningsih	21-10-2024 15:51:01 WIB

IO	NAME	TTD
03	Yudha Adhi Oetomo	21-10-2024 15:54:18 WIB
04	Azimatun	21-10-2024 15:55:19 WIB
05	Supardi	21-10-2024 15:59:50 WIB
06	Faris Elhaq Sukrisman	21-10-2024 16:07:34 WIB
07	Prihatin Kusdini	21-10-2024 16:15:21 WIB
08	Daniel Mubarach	21-10-2024 16:17:34 WIB
09	Sindya A.M.	21-10-2024 16:22:26 WIB
10	Kurnia Zakaria	21-10-2024 16:22:31 WIB
11	Rezzy Akbar Yudoprakoso	21-10-2024 16:22:51 WIB
12	Jasmine Salsabila Mulya	21-10-2024 16:23:02 WIB
13	Deasy Anna Victorina	21-10-2024 16:24:41 WIB
14	Indra Kusuma	21-10-2024 16:28:54 WIB
15	Arteria Dahlan	21-10-2024 16:29:45 WIB

IO	NAME	TTD
16	Agung M. Akbar Gunawan	21-10-2024 16:35:54 WIB
17	Ikhsyan Suprasetya	21-10-2024 16:54:42 WIB
18	Ikhsyan Suprasetya	21-10-2024 16:54:43 WIB
19	Marc Duphariandi	21-10-2024 16:55:00 WIB
20	Agung Siswanto	21-10-2024 16:55:24 WIB
21	Naskan	21-10-2024 16:56:37 WIB
22	DENI MUNAWAR	21-10-2024 16:57:27 WIB
23	Jeffry Palijama	21-10-2024 16:57:42 WIB
24	Ahmad Triswadi	21-10-2024 17:00:43 WIB
25	Elianta Ginting	21-10-2024 17:08:17 WIB
26	Siti Khatijah	21-10-2024 17:08:41 WIB
27	Ana Sofa Yuking	21-10-2024 17:22:00 WIB
28	Sapto Wibowo Sutanto	21-10-2024 17:23:11 WIB

IO	NAME	TTD
29	Angga Dwi Prasetyo	21-10-2024 17:23:54 WIB
30	Moh Mahdi	21-10-2024 17:27:45 WIB
31	Faizal Hafied	21-10-2024 17:32:24 WIB
32	Stefani Widyastuti	21-10-2024 17:44:52 WIB
33	PITRA ROMADONI NASUTION	21-10-2024 18:56:35 WIB
34	RAMADANI RAHMAN	21-10-2024 18:59:15 WIB
35	Ruben Fritson	21-10-2024 19:15:32 WIB
36	Rohadi	21-10-2024 19:16:37 WIB
37	Taufik Hidayat	21-10-2024 19:16:40 WIB
38	Hendrik Eddy Purnomo	21-10-2024 19:21:30 WIB
39	Edison	21-10-2024 19:26:45 WIB
40	Sherena Octaria	21-10-2024 19:31:17 WIB
41	Muhammad Dziqirullah	21-10-2024 19:32:13 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Muhamad Zarkasih	21-10-2024 16:30:17 WIB
	Indriati	21-10-2024 16:30:49 WIB
	Arteria Dahlan	21-10-2024 16:30:50 WIB
	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	21-10-2024 16:41:36 WIB
	HADI PRAJOKO	21-10-2024 16:41:52 WIB
	Dasa Susilo	21-10-2024 16:42:30 WIB
	Hendrik Ruben Gelong	21-10-2024 16:54:44 WIB
	Jacob Resimau	21-10-2024 16:54:49 WIB
	PAULUS Y. LENDES	21-10-2024 16:54:49 WIB
0	PAULUS Y. LENDES	21-10-2024 16:54:49 WIB
1	Haerul Kusuma	21-10-2024 16:54:49 WIB

IO	NAME	TTD
2	Parlin Silitonga	21-10-2024 16:54:51 WIB
3	Ikhsyan Suprasetya	21-10-2024 16:54:51 WIB
4	Ikhsyan Suprasetya	21-10-2024 16:54:52 WIB
5	Georgian Obertha	21-10-2024 16:54:57 WIB
6	Bayu Propesta	21-10-2024 16:54:58 WIB
7	Marc Duphariandi	21-10-2024 16:55:04 WIB
8	Muhamad Fauzul Adzim	21-10-2024 16:55:05 WIB
9	Agus Widodo	21-10-2024 16:55:08 WIB
0	Tiko Wahyudi	21-10-2024 16:55:10 WIB
1	HASRAN	21-10-2024 16:55:11 WIB
2	Yayan Susianto	21-10-2024 16:55:12 WIB
3	Wawan Sugiarto	21-10-2024 16:55:12 WIB
4	Ito Lawputra	21-10-2024 16:55:13 WIB

IO	NAME	TTD
5	Purwanto	21-10-2024 16:55:20 WIB
6	YUSRIL	21-10-2024 16:55:23 WIB
7	Ratih Mutiara Louk Fanggi	21-10-2024 16:55:33 WIB
8	Agung Siswanto	21-10-2024 16:55:37 WIB
9	RAHMANSYAH FIKRIADIN	21-10-2024 16:55:53 WIB
0	Hartono	21-10-2024 16:55:53 WIB
1	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	21-10-2024 16:56:07 WIB
2	Naskan	21-10-2024 16:56:40 WIB
3	Yanti Widiyanti	21-10-2024 16:56:44 WIB
4	Dendi Mulyadi	21-10-2024 16:56:45 WIB
5	Sudiyono Akbar	21-10-2024 16:56:45 WIB
6	Arista Hidayatul Rahmansyah	21-10-2024 16:56:45 WIB
7	ALI MUKTHAMAR	21-10-2024 16:56:51 WIB

IO	NAME	TTD
8	ACHMAD TRISANA MARSEDA	21-10-2024 16:57:01 WIB
9	Syamsul Jahidin	21-10-2024 16:57:07 WIB
0	Sarah Kamila El Islamy	21-10-2024 16:57:09 WIB
1	Wimbo Bintoro	21-10-2024 16:57:16 WIB
2	DENI MUNAWAR	21-10-2024 16:57:29 WIB
3	Indra Rinaldy Isman	21-10-2024 16:57:37 WIB
4	Sofyan Syahputra	21-10-2024 16:57:39 WIB
5	Jeffry Palijama	21-10-2024 16:57:49 WIB
6	HERLIN BALI MURYANTI	21-10-2024 16:58:01 WIB
7	Charles M. Tampubolon	21-10-2024 16:58:04 WIB
8	Siti Khatijah	21-10-2024 16:58:39 WIB
9	Siti Khatijah	21-10-2024 16:58:40 WIB
0	Debora Anggie Noviana	21-10-2024 16:59:49 WIB

IO	NAME	TTD
1	TAUFIK HUSAIN	21-10-2024 16:59:52 WIB
2	Diana Prima Penyami	21-10-2024 16:59:54 WIB
3	Glory M.M Marbun	21-10-2024 17:00:03 WIB
4	Ahmad Triswadi	21-10-2024 17:00:47 WIB
5	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	21-10-2024 17:00:55 WIB
6	Sunny Shilby	21-10-2024 17:01:14 WIB
7	Fajar Shiddieq	21-10-2024 17:01:24 WIB
8	Saupi Hasbi	21-10-2024 17:01:31 WIB
9	AMIR AMIRULOH	21-10-2024 17:01:43 WIB
0	Reta Novita Sari	21-10-2024 17:01:51 WIB
1	Ihsan Firmansyah	21-10-2024 17:02:12 WIB
2	Maya Mey Sindy	21-10-2024 17:02:47 WIB
3	Eko Susiati	21-10-2024 17:03:22 WIB

IO	NAME	TTD
4	Saparudin	21-10-2024 17:06:10 WIB
5	Ronald Budi Laksana	21-10-2024 17:07:04 WIB
6	Wiwik Winarsih	21-10-2024 17:07:24 WIB
7	Muhammad Faisal Akbar	21-10-2024 17:07:48 WIB
8	Elianta Ginting	21-10-2024 17:08:21 WIB
9	Hendri Darma Putra	21-10-2024 17:08:38 WIB
0	REIZAL NORMAN MUSTAMU	21-10-2024 17:08:49 WIB
1	Atmowicahya D. Virgito	21-10-2024 17:10:30 WIB
2	Ainun Abror	21-10-2024 17:11:09 WIB
3	Ade Salamah	21-10-2024 17:11:30 WIB
4	Suryanto	21-10-2024 17:11:33 WIB
5	Erwin Romel Sinaga	21-10-2024 17:11:37 WIB
6	Sahrul Hikam	21-10-2024 17:11:46 WIB

IO	NAME	TTD
7	Lisa Rochmilayali	21-10-2024 17:15:19 WIB
8	Febrina Anggi Nurrahmadani	21-10-2024 17:18:18 WIB
9	RATNA HERLINA SURYANA	21-10-2024 17:18:36 WIB
0	Ririen Aryani	21-10-2024 17:21:31 WIB
1	Edy Rudyanto	21-10-2024 17:21:53 WIB
2	Ana Sofa Yukung	21-10-2024 17:22:12 WIB
3	Sapto Wibowo Sutanto	21-10-2024 17:23:14 WIB
4	Angga Dwi Prasetyo	21-10-2024 17:23:58 WIB
5	Martono	21-10-2024 17:24:10 WIB
6	Abdul Majid	21-10-2024 17:24:19 WIB
7	DODI WINARDI	21-10-2024 17:24:59 WIB
8	Agung M. Akbar Gunawan	21-10-2024 17:25:11 WIB
9	RISKAL M. YAKUB	21-10-2024 17:25:29 WIB

IO	NAME	TTD
0	SUTAN SYAHRUDIN	21-10-2024 17:25:55 WIB
1	Faruqi Robbani	21-10-2024 17:27:34 WIB
2	Moh Mahdi	21-10-2024 17:27:48 WIB
3	Faris Elhaq Sukrisman	21-10-2024 17:28:41 WIB
4	Sindya A.M.	21-10-2024 17:29:23 WIB
5	Indra Kusuma	21-10-2024 17:29:51 WIB
6	Martiningsih	21-10-2024 17:32:19 WIB
7	Faizal Hafied	21-10-2024 17:32:26 WIB
8	Eko Arief Cahyono	21-10-2024 17:34:01 WIB
9	Marselinus Edwin Hardhian	21-10-2024 17:36:59 WIB
00	Rifyan Ridwan Saleh	21-10-2024 17:37:54 WIB
01	Stefani Widyastuti	21-10-2024 17:44:57 WIB
02	Yudha Adhi Oetomo	21-10-2024 17:45:57 WIB

IO	NAME	TTD
03	Selmi Afif	21-10-2024 17:54:21 WIB
04	Ega Battista	21-10-2024 17:54:30 WIB
05	Romeo Varry Tumbel	21-10-2024 18:09:38 WIB
06	Miftachul Isti Almaidhah	21-10-2024 18:31:32 WIB
07	Zevi	21-10-2024 18:31:48 WIB
08	PITRA ROMADONI NASUTION	21-10-2024 18:57:06 WIB
09	Febrina Aulya Rabbani	21-10-2024 18:59:57 WIB
10	RAMADANI RAHMAN	21-10-2024 19:00:13 WIB
11	Abraham Yesaya Runtu	21-10-2024 19:00:53 WIB
12	HERI SUSANTO	21-10-2024 19:02:43 WIB
13	ARNI JUNIASTI ARAS	21-10-2024 19:03:44 WIB
14	Ary Fiermawan	21-10-2024 19:04:57 WIB
15	Rezzy Akbar Yudoprakoso	21-10-2024 19:12:44 WIB

IO	NAME	TTD
16	Daniel Mubarach	21-10-2024 19:13:33 WIB
17	Ruben Fritson	21-10-2024 19:15:34 WIB
18	Rohadi	21-10-2024 19:16:42 WIB
19	Taufik Hidayat	21-10-2024 19:16:44 WIB
20	Ridwan Syahbani Tamher	21-10-2024 19:17:58 WIB
21	Jasmine Salsabila Mulya	21-10-2024 19:19:56 WIB
22	Anugrah Yanuar Riswandani	21-10-2024 19:20:28 WIB
23	Hendrik Eddy Purnomo	21-10-2024 19:21:32 WIB
24	Vania Devi Novitasari	21-10-2024 19:22:47 WIB
25	Edison	21-10-2024 19:26:52 WIB
26	Sherena Octaria	21-10-2024 19:31:19 WIB
27	Muhammad Dziqirullah	21-10-2024 19:32:19 WIB
28	Anang Susanto	21-10-2024 19:44:27 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	RAMADANI RAHMAN	21-10-2024 19:00:28 WIB
	Georgian Obertha	21-10-2024 19:00:48 WIB
	Ito Lawputra	21-10-2024 19:00:57 WIB
	Abraham Yesaya Runtu	21-10-2024 19:00:58 WIB
	Parlin Silitonga	21-10-2024 19:00:59 WIB
	Agung Siswanto	21-10-2024 19:00:59 WIB
	REIZAL NORMAN MUSTAMU	21-10-2024 19:01:08 WIB
	HERLIN BALI MURYANTI	21-10-2024 19:01:16 WIB
	Erwin Romel Sinaga	21-10-2024 19:01:28 WIB
0	PAULUS Y. LENDES	21-10-2024 19:01:28 WIB

IO	NAME	TTD
1	PAULUS Y. LENDES	21-10-2024 19:01:29 WIB
2	Febrina Anggi Nurrahmadani	21-10-2024 19:01:37 WIB
3	PITRA ROMADONI NASUTION	21-10-2024 19:01:38 WIB
4	Sarah Kamila El Islamy	21-10-2024 19:01:48 WIB
5	Maya Mey Sindy	21-10-2024 19:02:04 WIB
6	Diana Prima Penyami	21-10-2024 19:02:06 WIB
7	Yanti Widiyanti	21-10-2024 19:02:16 WIB
8	Charles M. Tampubolon	21-10-2024 19:02:24 WIB
9	Dendi Mulyadi	21-10-2024 19:02:26 WIB
0	Muhamad Zarkasih	21-10-2024 19:02:39 WIB
1	Ana Sofa Yuking	21-10-2024 19:02:40 WIB
2	Indriati	21-10-2024 19:02:42 WIB
3	HERI SUSANTO	21-10-2024 19:02:48 WIB

IO	NAME	TTD
4	HASRAN	21-10-2024 19:02:52 WIB
5	Sofyan Syahputra	21-10-2024 19:02:53 WIB
6	Suryanto	21-10-2024 19:02:56 WIB
7	Atmowicahya D. Virgito	21-10-2024 19:02:56 WIB
8	Edy Rudyanto	21-10-2024 19:03:00 WIB
9	Saupi Hasbi	21-10-2024 19:03:02 WIB
0	Hartono	21-10-2024 19:03:02 WIB
1	Wawan Sugiarto	21-10-2024 19:03:09 WIB
2	Suryanto	21-10-2024 19:03:10 WIB
3	Tiko Wahyudi	21-10-2024 19:03:13 WIB
4	Elianta Ginting	21-10-2024 19:03:50 WIB
5	ARNI JUNIASTI ARAS	21-10-2024 19:03:52 WIB
6	Ronald Budi Laksana	21-10-2024 19:04:07 WIB

IO	NAME	TTD
7	Sunny Shilby	21-10-2024 19:04:07 WIB
8	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	21-10-2024 19:04:12 WIB
9	Martono	21-10-2024 19:04:22 WIB
0	Fajar Shiddieq	21-10-2024 19:04:25 WIB
1	Wiwik Winarsih	21-10-2024 19:04:28 WIB
2	Arista Hidayatul Rahmansyah	21-10-2024 19:04:32 WIB
3	Purwanto	21-10-2024 19:04:34 WIB
4	Hendri Darma Putra	21-10-2024 19:04:59 WIB
5	Ary Fiermawan	21-10-2024 19:05:02 WIB
6	RATNA HERLINA SURYANA	21-10-2024 19:05:10 WIB
7	Jeffry Palijama	21-10-2024 19:05:14 WIB
8	Indra Rinaldy Isman	21-10-2024 19:05:29 WIB
9	AMIR AMIRULOH	21-10-2024 19:05:32 WIB

IO	NAME	TTD
0	Yayan Susianto	21-10-2024 19:05:35 WIB
1	Muhammad Faisal Akbar	21-10-2024 19:06:04 WIB
2	Syamsul Jahidin	21-10-2024 19:06:30 WIB
3	HADI PRAJOKO	21-10-2024 19:06:40 WIB
4	Glory M.M Marbun	21-10-2024 19:07:11 WIB
5	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	21-10-2024 19:07:15 WIB
6	ACHMAD TRISANA MARSEDA	21-10-2024 19:07:48 WIB
7	Debora Anggie Noviana	21-10-2024 19:08:05 WIB
8	Ahmad Triswadi	21-10-2024 19:08:27 WIB
9	Haerul Kusuma	21-10-2024 19:08:46 WIB
0	Indra Kusuma	21-10-2024 19:09:10 WIB
1	Sapto Wibowo Sutanto	21-10-2024 19:09:54 WIB
2	Muhamad Fauzul Adzim	21-10-2024 19:11:15 WIB

IO	NAME	TTD
3	Sahrul Hikam	21-10-2024 19:11:44 WIB
4	Selmi Afif	21-10-2024 19:11:59 WIB
5	Ade Salamah	21-10-2024 19:12:06 WIB
6	Rifyan Ridwan Saleh	21-10-2024 19:12:10 WIB
7	Naskan	21-10-2024 19:12:15 WIB
8	Ihsan Firmansyah	21-10-2024 19:12:21 WIB
9	RISKAL M. YAKUB	21-10-2024 19:12:39 WIB
0	RISKAL M. YAKUB	21-10-2024 19:12:40 WIB
1	RISKAL M. YAKUB	21-10-2024 19:12:40 WIB
2	Rezzy Akbar Yudoprakoso	21-10-2024 19:12:50 WIB
3	Daniel Mubarach	21-10-2024 19:13:38 WIB
4	Arteria Dahlan	21-10-2024 19:13:52 WIB
5	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	21-10-2024 19:14:35 WIB

IO	NAME	TTD
6	Febrina Aulya Rabbani	21-10-2024 19:14:39 WIB
7	Marselinus Edwin Hardhian	21-10-2024 19:15:14 WIB
8	Ruben Fritson	21-10-2024 19:15:37 WIB
9	SUTAN SYAHRUDIN	21-10-2024 19:15:45 WIB
0	Saparudin	21-10-2024 19:16:00 WIB
1	Ega Battista	21-10-2024 19:16:01 WIB
2	Eko Arief Cahyono	21-10-2024 19:16:11 WIB
3	Hendrik Ruben Gelong	21-10-2024 19:16:13 WIB
4	Sudiyono Akbar	21-10-2024 19:16:23 WIB
5	Dasa Susilo	21-10-2024 19:16:32 WIB
6	Faris Elhaq Sukrisman	21-10-2024 19:16:41 WIB
7	Rohadi	21-10-2024 19:16:45 WIB
8	ALI MUKTHAMAR	21-10-2024 19:16:50 WIB

ID	NAME	TTD
9	Taufik Hidayat	21-10-2024 19:16:50 WIB
0	Ridwan Syahbani Tamher	21-10-2024 19:18:04 WIB
1	YUSRIL	21-10-2024 19:18:20 WIB
2	Jacob Resimau	21-10-2024 19:18:34 WIB
3	TAUFIK HUSAIN	21-10-2024 19:18:53 WIB
4	Yudha Adhi Oetomo	21-10-2024 19:19:14 WIB
5	Ainun Abror	21-10-2024 19:19:35 WIB
6	Jasmine Salsabila Mulya	21-10-2024 19:20:15 WIB
7	Bayu Propesta	21-10-2024 19:20:18 WIB
8	Anugrah Yanuar Riswandani	21-10-2024 19:20:32 WIB
9	DENI MUNAWAR	21-10-2024 19:20:53 WIB
00	Ratih Mutiara Louk Fanggi	21-10-2024 19:21:29 WIB
01	Hendrik Eddy Purnomo	21-10-2024 19:21:37 WIB

ID	NAME	TTD
02	Vania Devi Novitasari	21-10-2024 19:22:50 WIB
03	Reta Novita Sari	21-10-2024 19:23:03 WIB
04	Eko Susiati	21-10-2024 19:24:08 WIB
05	Marc Duphariandi	21-10-2024 19:24:57 WIB
06	Ikhsyan Suprasetya	21-10-2024 19:25:14 WIB
07	RAHMANSYAH FIKRIADIN	21-10-2024 19:26:11 WIB
08	Edison	21-10-2024 19:27:02 WIB
09	Sherena Octaria	21-10-2024 19:31:22 WIB
10	Muhammad Dziqirullah	21-10-2024 19:32:25 WIB
11	Agung M. Akbar Gunawan	21-10-2024 19:33:02 WIB
12	Stefani Widyastuti	21-10-2024 19:35:22 WIB
13	Abdul Majid	21-10-2024 19:36:00 WIB
14	Yusron Hidayat	21-10-2024 19:36:04 WIB

IO	NAME	TTD
15	Anang Susanto	21-10-2024 19:44:34 WIB
16	Mulih	21-10-2024 19:45:15 WIB
17	Mulih	21-10-2024 19:45:16 WIB
18	Delvina Marferita	21-10-2024 19:48:31 WIB
19	Yuda Aditia Ma Atfa	21-10-2024 19:51:47 WIB
20	Ririen Aryani	21-10-2024 19:54:25 WIB
21	Lisa Rochmilayali	21-10-2024 19:57:36 WIB
22	Angga Dwi Prasetyo	21-10-2024 20:05:31 WIB
23	Faruqi Robbani	21-10-2024 20:06:23 WIB
24	Faizal Hafied	21-10-2024 20:07:14 WIB
25	Zevi	21-10-2024 20:42:45 WIB
26	Miftachul Isti Almaidhah	21-10-2024 20:53:00 WIB

BELUM ABSEN

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Elianta Ginting	22-10-2024 07:30:48 WIB
	Abraham Yesaya Runtu	22-10-2024 07:31:45 WIB
	Syafruddin	22-10-2024 07:32:47 WIB
	Atmowicahya D. Virgito	22-10-2024 07:32:53 WIB
	Eko Arief Cahyono	22-10-2024 07:33:17 WIB
	Jeffry Palijama	22-10-2024 07:33:55 WIB
	Muhamad Zarkasih	22-10-2024 07:35:00 WIB
	Parlin Silitonga	22-10-2024 07:35:24 WIB
	ACHMAD TRISANA MARSEDA	22-10-2024 07:35:30 WIB
0	Sofyan Syahputra	22-10-2024 07:35:44 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ana Sofa Yuking	22-10-2024 07:35:46 WIB
2	Wiwik Winarsih	22-10-2024 07:35:49 WIB
3	Haerul Kusuma	22-10-2024 07:35:56 WIB
4	Taufik Hidayat	22-10-2024 07:35:56 WIB
5	Indriati	22-10-2024 07:36:16 WIB
6	Ito Lawputra	22-10-2024 07:36:40 WIB
7	Georgian Obertha	22-10-2024 07:36:41 WIB
8	AMIR AMIRULOH	22-10-2024 07:36:49 WIB
9	Debora Anggie Noviana	22-10-2024 07:36:57 WIB
0	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	22-10-2024 07:37:10 WIB
1	HERI SUSANTO	22-10-2024 07:37:13 WIB
2	Reta Novita Sari	22-10-2024 07:37:42 WIB
3	HASRAN	22-10-2024 07:37:46 WIB

IO	NAME	TTD
4	HADI PRAJOKO	22-10-2024 07:37:48 WIB
5	Sunny Shilby	22-10-2024 07:37:55 WIB
6	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	22-10-2024 07:37:58 WIB
7	YUSRIL	22-10-2024 07:38:00 WIB
8	Febrina Anggi Nurrahmadani	22-10-2024 07:38:07 WIB
9	Diana Prima Penyami	22-10-2024 07:38:11 WIB
0	ALI MUKTHAMAR	22-10-2024 07:38:23 WIB
1	Anugrah Yanuar Riswandani	22-10-2024 07:38:23 WIB
2	Glory M.M Marbun	22-10-2024 07:38:32 WIB
3	RAHMANSYAH FIKRIADIN	22-10-2024 07:38:36 WIB
4	Angga Dwi Prasetyo	22-10-2024 07:38:43 WIB
5	Saparudin	22-10-2024 07:38:52 WIB
6	Tiko Wahyudi	22-10-2024 07:39:02 WIB

IO	NAME	TTD
7	Hartono	22-10-2024 07:39:09 WIB
8	Naskan	22-10-2024 07:39:10 WIB
9	Siti Khatijah	22-10-2024 07:39:17 WIB
0	Faizal Hafied	22-10-2024 07:39:32 WIB
1	Erwin Romel Sinaga	22-10-2024 07:39:41 WIB
2	TAUFIK HUSAIN	22-10-2024 07:39:57 WIB
3	Marc Duphariandi	22-10-2024 07:40:06 WIB
4	HERLIN BALI MURYANTI	22-10-2024 07:40:08 WIB
5	Ratih Mutiara Louk Fanggi	22-10-2024 07:40:59 WIB
6	Saupi Hasbi	22-10-2024 07:41:02 WIB
7	Agung M. Akbar Gunawan	22-10-2024 07:41:11 WIB
8	ARNI JUNIASTI ARAS	22-10-2024 07:41:13 WIB
9	Yayan Susianto	22-10-2024 07:41:27 WIB

IO	NAME	TTD
0	Hendrik Ruben Gelong	22-10-2024 07:41:30 WIB
1	Ronald Budi Laksana	22-10-2024 07:41:31 WIB
2	Ihsan Firmansyah	22-10-2024 07:41:42 WIB
3	Septinur Dadang	22-10-2024 07:41:42 WIB
4	Ary Fiermawan	22-10-2024 07:41:43 WIB
5	Dendi Mulyadi	22-10-2024 07:41:49 WIB
6	Maya Mey Sindy	22-10-2024 07:42:41 WIB
7	Agung Siswanto	22-10-2024 07:42:49 WIB
8	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	22-10-2024 07:43:49 WIB
9	Sapto Wibowo Sutanto	22-10-2024 07:45:05 WIB
0	Yanti Widiyanti	22-10-2024 07:45:30 WIB
1	Ahmad Triswadi	22-10-2024 07:45:46 WIB
2	Purwanto	22-10-2024 07:46:13 WIB

IO	NAME	TTD
3	Ainun Abror	22-10-2024 07:46:18 WIB
4	Charles M. Tampubolon	22-10-2024 07:46:19 WIB
5	EKA SUSOPRANININGSIH PUTRI TRISNAWATI	22-10-2024 07:46:19 WIB
6	Dasa Susilo	22-10-2024 07:46:20 WIB
7	RISKAL M. YAKUB	22-10-2024 07:46:22 WIB
8	Edison	22-10-2024 07:46:24 WIB
9	SUTAN SYAHRUDIN	22-10-2024 07:46:34 WIB
0	DODI WINARDI	22-10-2024 07:46:45 WIB
1	Syamsul Jahidin	22-10-2024 07:46:46 WIB
2	Edy Rudyanto	22-10-2024 07:46:58 WIB
3	Muhammad Dziqirullah	22-10-2024 07:47:07 WIB
4	Ririen Aryani	22-10-2024 07:47:11 WIB
5	Wawan Sugiarto	22-10-2024 07:47:13 WIB

IO	NAME	TTD
6	Sarah Kamila El Islamy	22-10-2024 07:47:19 WIB
7	Indra Kusuma	22-10-2024 07:47:55 WIB
8	Eko Susiati	22-10-2024 07:48:03 WIB
9	Faruqi Robbani	22-10-2024 07:48:09 WIB
0	Vania Devi Novitasari	22-10-2024 07:48:38 WIB
1	REIZAL NORMAN MUSTAMU	22-10-2024 07:48:40 WIB
2	Kurnia Zakaria	22-10-2024 07:48:41 WIB
3	Teguh Kayen	22-10-2024 07:48:41 WIB
4	Sahrul Hikam	22-10-2024 07:48:43 WIB
5	Ruben Fritson	22-10-2024 07:48:47 WIB
6	Fajar Shiddieq	22-10-2024 07:48:47 WIB
7	Abdul Majid	22-10-2024 07:48:53 WIB
8	Yusron Hidayat	22-10-2024 07:49:14 WIB

IO	NAME	TTD
9	PAULUS Y. LENDES	22-10-2024 07:49:16 WIB
0	Wimbo Bintoro	22-10-2024 07:49:25 WIB
1	Faris Elhaq Sukrisman	22-10-2024 07:49:27 WIB
2	Hendri Darma Putra	22-10-2024 07:49:47 WIB
3	Arista Hidayatul Rahmansyah	22-10-2024 07:50:19 WIB
4	Suryanto	22-10-2024 07:50:39 WIB
5	Romeo Varry Tumbel	22-10-2024 07:50:46 WIB
6	RAMADANI RAHMAN	22-10-2024 07:51:00 WIB
7	Indra Rinaldy Isman	22-10-2024 07:51:10 WIB
8	Azimatun	22-10-2024 07:51:48 WIB
9	Hendrik Eddy Purnomo	22-10-2024 07:51:59 WIB
00	Martiningsih	22-10-2024 07:52:00 WIB
01	Jacob Resimau	22-10-2024 07:52:01 WIB

IO	NAME	TTD
02	Stefani Widyastuti	22-10-2024 07:52:35 WIB
03	DENI MUNAWAR	22-10-2024 07:52:42 WIB
04	Arif Rahman Hakim	22-10-2024 07:53:22 WIB
05	Sudiyono Akbar	22-10-2024 07:53:27 WIB
06	Bayu Propesta	22-10-2024 07:53:55 WIB
07	Ade Salamah	22-10-2024 07:54:19 WIB
08	Yudha Adhi Oetomo	22-10-2024 07:54:42 WIB
09	Agus Widodo	22-10-2024 07:55:03 WIB
10	Rohadi	22-10-2024 07:55:24 WIB
11	Muhammad Faisal Akbar	22-10-2024 07:56:00 WIB
12	Firdaus	22-10-2024 07:56:16 WIB
13	Ikhsyan Suprasetya	22-10-2024 07:57:21 WIB
14	Arteria Dahlan	22-10-2024 07:59:49 WIB

IO	NAME	TTD
15	Martono	22-10-2024 08:01:56 WIB
16	Selmi Afif	22-10-2024 08:03:02 WIB
17	Ega Battista	22-10-2024 08:04:48 WIB
18	Febrina Aulya Rabbani	22-10-2024 08:08:11 WIB
19	Pandu Adie Wijaya	22-10-2024 08:08:12 WIB
20	Marselinus Edwin Hardhian	22-10-2024 08:09:43 WIB
21	Ridwan Syahbani Tamher	22-10-2024 08:09:52 WIB
22	RATNA HERLINA SURYANA	22-10-2024 08:10:23 WIB
23	Deasy Anna Victorina	22-10-2024 08:15:36 WIB
24	Muhamad Fauzul Adzim	22-10-2024 08:16:13 WIB
25	Rifyan Ridwan Saleh	22-10-2024 08:16:19 WIB
26	Delvina Marferita	22-10-2024 08:19:51 WIB
27	Delvina Marferita	22-10-2024 08:19:52 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Fajar Shiddieq	22-10-2024 10:01:54 WIB
	Febrina Anggi Nurrahmadani	22-10-2024 10:02:02 WIB
	Syafruddin	22-10-2024 10:02:39 WIB
	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	22-10-2024 10:03:01 WIB
	HASRAN	22-10-2024 10:03:17 WIB
	Debora Anggie Noviana	22-10-2024 10:03:22 WIB
	HADI PRAJOKO	22-10-2024 10:03:32 WIB
	Muhamad Zarkasih	22-10-2024 10:03:45 WIB
	Sunny Shilby	22-10-2024 10:03:57 WIB
0	Glory M.M Marbun	22-10-2024 10:04:02 WIB

IO	NAME	TTD
1	Georgian Obertha	22-10-2024 10:04:06 WIB
2	Faizal Hafied	22-10-2024 10:04:28 WIB
3	YUSRIL	22-10-2024 10:04:29 WIB
4	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	22-10-2024 10:04:37 WIB
5	Angga Dwi Prasetyo	22-10-2024 10:05:09 WIB
6	Ito Lawputra	22-10-2024 10:05:22 WIB
7	Martiningsih	22-10-2024 10:05:31 WIB
8	Elianta Ginting	22-10-2024 10:05:44 WIB
9	Agung Siswanto	22-10-2024 10:05:58 WIB
0	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	22-10-2024 10:06:12 WIB
1	Jeffry Palijama	22-10-2024 10:06:24 WIB
2	Naskan	22-10-2024 10:06:27 WIB
3	Rohadi	22-10-2024 10:06:31 WIB

IO	NAME	TTD
4	Wiwik Winarsih	22-10-2024 10:06:34 WIB
5	HERI SUSANTO	22-10-2024 10:06:37 WIB
6	Hendrik Ruben Gelong	22-10-2024 10:06:50 WIB
7	Sofyan Syahputra	22-10-2024 10:06:52 WIB
8	Yanti Widiyanti	22-10-2024 10:06:54 WIB
9	Erwin Romel Sinaga	22-10-2024 10:06:58 WIB
0	Ainun Abror	22-10-2024 10:07:01 WIB
1	Maya Mey Sindy	22-10-2024 10:07:02 WIB
2	Atmowicahya D. Virgito	22-10-2024 10:07:07 WIB
3	Ruben Fritson	22-10-2024 10:07:13 WIB
4	Ririen Aryani	22-10-2024 10:07:16 WIB
5	Abraham Yesaya Runtu	22-10-2024 10:07:29 WIB
6	Septinur Dadang	22-10-2024 10:07:38 WIB

IO	NAME	TTD
7	Edy Rudyanto	22-10-2024 10:07:39 WIB
8	Hendri Darma Putra	22-10-2024 10:07:43 WIB
9	Deasy Anna Victorina	22-10-2024 10:08:10 WIB
0	Ronald Budi Laksana	22-10-2024 10:08:32 WIB
1	Wawan Sugiarto	22-10-2024 10:08:32 WIB
2	Hartono	22-10-2024 10:08:34 WIB
3	Muhamad Fauzul Adzim	22-10-2024 10:08:40 WIB
4	ACHMAD TRISANA MARSEDA	22-10-2024 10:08:45 WIB
5	Muhammad Dziqirullah	22-10-2024 10:09:06 WIB
6	Azimatun	22-10-2024 10:09:08 WIB
7	Saparudin	22-10-2024 10:09:09 WIB
8	Taufik Hidayat	22-10-2024 10:09:15 WIB
9	Charles M. Tampubolon	22-10-2024 10:09:20 WIB

IO	NAME	TTD
0	Haerul Kusuma	22-10-2024 10:09:23 WIB
1	Ana Sofa Yuking	22-10-2024 10:09:27 WIB
2	Ratih Mutiara Louk Fanggi	22-10-2024 10:09:38 WIB
3	Rifyan Ridwan Saleh	22-10-2024 10:09:39 WIB
4	Eko Arief Cahyono	22-10-2024 10:09:53 WIB
5	Arista Hidayatul Rahmansyah	22-10-2024 10:09:57 WIB
6	Suryanto	22-10-2024 10:09:58 WIB
7	Eko Susiati	22-10-2024 10:10:07 WIB
8	TAUFIK HUSAIN	22-10-2024 10:10:24 WIB
9	AMIR AMIRULOH	22-10-2024 10:10:31 WIB
0	Sapto Wibowo Sutanto	22-10-2024 10:10:36 WIB
1	Teguh Kayen	22-10-2024 10:10:45 WIB
2	Diana Prima Penyami	22-10-2024 10:10:49 WIB

IO	NAME	TTD
3	Robby Dareho	22-10-2024 10:10:52 WIB
4	DODI WINARDI	22-10-2024 10:10:53 WIB
5	Pandu Adie Wijaya	22-10-2024 10:10:56 WIB
6	PAULUS Y. LENDES	22-10-2024 10:10:57 WIB
7	Moch. Choirul Hamsyah	22-10-2024 10:11:39 WIB
8	Jacob Resimau	22-10-2024 10:11:42 WIB
9	Dasa Susilo	22-10-2024 10:11:42 WIB
0	RAHMANSYAH FIKRIADIN	22-10-2024 10:11:58 WIB
1	Saupi Hasbi	22-10-2024 10:12:01 WIB
2	DENI MUNAWAR	22-10-2024 10:12:24 WIB
3	Ihsan Firmansyah	22-10-2024 10:12:30 WIB
4	Martono	22-10-2024 10:13:13 WIB
5	Reta Novita Sari	22-10-2024 10:13:17 WIB

IO	NAME	TTD
6	Purwanto	22-10-2024 10:13:18 WIB
7	Kurnia Zakaria	22-10-2024 10:13:32 WIB
8	SUTAN SYAHRUDIN	22-10-2024 10:13:37 WIB
9	Selmi Afif	22-10-2024 10:13:40 WIB
0	Indra Kusuma	22-10-2024 10:13:44 WIB
1	Ikhsyan Suprasetya	22-10-2024 10:13:59 WIB
2	Anang Susanto	22-10-2024 10:14:05 WIB
3	ARNI JUNIASTI ARAS	22-10-2024 10:14:12 WIB
4	Hendrik Eddy Purnomo	22-10-2024 10:14:28 WIB
5	Rezzy Akbar Yudoprakoso	22-10-2024 10:14:33 WIB
6	Firdaus	22-10-2024 10:14:35 WIB
7	Vania Devi Novitasari	22-10-2024 10:14:37 WIB
8	Mulih	22-10-2024 10:14:37 WIB

IO	NAME	TTD
9	Sudiyono Akbar	22-10-2024 10:14:56 WIB
0	REIZAL NORMAN MUSTAMU	22-10-2024 10:15:15 WIB
1	HERLIN BALI MURYANTI	22-10-2024 10:15:27 WIB
2	Ega Battista	22-10-2024 10:15:37 WIB
3	Arteria Dahlan	22-10-2024 10:16:03 WIB
4	RATNA HERLINA SURYANA	22-10-2024 10:16:16 WIB
5	Faruqi Robbani	22-10-2024 10:16:38 WIB
6	Jeance Jolanda Loppies	22-10-2024 10:16:49 WIB
7	Tiko Wahyudi	22-10-2024 10:17:09 WIB
8	Ary Fiermawan	22-10-2024 10:17:33 WIB
9	Muhammad Faisal Akbar	22-10-2024 10:17:38 WIB
00	Sri Widoyanti	22-10-2024 10:17:39 WIB
01	Faris Elhaq Sukrisman	22-10-2024 10:17:43 WIB

IO	NAME	TTD
02	Jasmine Salsabila Mulya	22-10-2024 10:18:05 WIB
03	Daniel Mubarach	22-10-2024 10:18:17 WIB
04	Anugrah Yanuar Riswandani	22-10-2024 10:18:35 WIB
05	Agus Widodo	22-10-2024 10:19:37 WIB
06	ALI MUKTHAMAR	22-10-2024 10:19:52 WIB
07	Sindya A.M.	22-10-2024 10:20:04 WIB
08	Yudha Adhi Oetomo	22-10-2024 10:20:06 WIB
09	Agung M. Akbar Gunawan	22-10-2024 10:23:32 WIB
10	RISKAL M. YAKUB	22-10-2024 10:23:35 WIB
11	Marc Duphariandi	22-10-2024 10:23:41 WIB
12	Parlin Silitonga	22-10-2024 10:23:52 WIB
13	Stefani Widyastuti	22-10-2024 10:26:11 WIB
14	Moh Mahdi	22-10-2024 10:26:52 WIB

IO	NAME	TTD
15	Ade Salamah	22-10-2024 10:26:54 WIB
16	Sarah Kamila El Islamy	22-10-2024 10:26:57 WIB
17	Delvina Marferita	22-10-2024 10:28:39 WIB
18	Indra Rinaldy Isman	22-10-2024 10:32:28 WIB
19	Bayu Propesta	22-10-2024 10:32:58 WIB
20	Sherena Octaria	22-10-2024 10:33:06 WIB
21	Febrina Aulya Rabbani	22-10-2024 10:36:01 WIB
22	PITRA ROMADONI NASUTION	22-10-2024 10:38:42 WIB
23	Lisa Rochmilayali	22-10-2024 10:44:23 WIB
24	Prija Aji Satriaji	22-10-2024 10:49:01 WIB
25	SUSANTO	22-10-2024 10:55:06 WIB
26	Zevi	22-10-2024 11:17:52 WIB
27	Miftachul Isti Almaidhah	22-10-2024 11:32:12 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Zevi	22-10-2024 13:02:14 WIB
	Fajar Shiddieq	22-10-2024 13:02:43 WIB
	Ridwan Syahbani Tamher	22-10-2024 13:05:49 WIB
	RATNA HERLINA SURYANA	22-10-2024 13:06:22 WIB
	Jeffry Palijama	22-10-2024 13:07:41 WIB
	Yuda Aditia Ma Atfa	22-10-2024 13:09:10 WIB
	Glory M.M Marbun	22-10-2024 13:09:14 WIB
	Sudiyono Akbar	22-10-2024 13:10:31 WIB
	SUTAN SYAHRUDIN	22-10-2024 13:11:45 WIB
0	Ito Lawputra	22-10-2024 13:12:34 WIB
1	Deasy Anna Victorina	22-10-2024 13:12:38 WIB

ID	NAME	TTD
2	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	22-10-2024 13:12:53 WIB
3	Sunny Shilby	22-10-2024 13:13:14 WIB
4	Tiko Wahyudi	22-10-2024 13:13:24 WIB
5	Ronald Budi Laksana	22-10-2024 13:13:30 WIB
6	Ronald Budi Laksana	22-10-2024 13:13:30 WIB
7	Ronald Budi Laksana	22-10-2024 13:13:30 WIB
8	Faizal Hafied	22-10-2024 13:13:35 WIB
9	Syafruddin	22-10-2024 13:13:44 WIB
0	Teguh Kayen	22-10-2024 13:13:48 WIB
1	Indra Kusuma	22-10-2024 13:14:01 WIB
2	Angga Dwi Prasetyo	22-10-2024 13:14:12 WIB
3	Yayan Susianto	22-10-2024 13:14:21 WIB
4	Abraham Yesaya Runtu	22-10-2024 13:14:45 WIB

IO	NAME	TTD
5	Naskan	22-10-2024 13:15:01 WIB
6	Wawan Sugiarto	22-10-2024 13:15:06 WIB
7	REIZAL NORMAN MUSTAMU	22-10-2024 13:15:25 WIB
8	Agung Siswanto	22-10-2024 13:15:42 WIB
9	YUSRIL	22-10-2024 13:16:12 WIB
0	Arteria Dahlan	22-10-2024 13:16:26 WIB
1	Sofyan Syahputra	22-10-2024 13:16:34 WIB
2	Eko Arief Cahyono	22-10-2024 13:17:07 WIB
3	Hartono	22-10-2024 13:17:10 WIB
4	Agung M. Akbar Gunawan	22-10-2024 13:17:11 WIB
5	Ary Fiermawan	22-10-2024 13:17:11 WIB
6	AMIR AMIRULOH	22-10-2024 13:17:16 WIB
7	Sapto Wibowo Sutanto	22-10-2024 13:17:46 WIB

IO	NAME	TTD
8	HASRAN	22-10-2024 13:17:47 WIB
9	TAUFIK HUSAIN	22-10-2024 13:17:48 WIB
0	Ana Sofa Yuking	22-10-2024 13:18:02 WIB
1	Georgian Obertha	22-10-2024 13:18:05 WIB
2	HADI PRAJOKO	22-10-2024 13:18:26 WIB
3	Hendri Darma Putra	22-10-2024 13:18:27 WIB
4	Muhamad Zarkasih	22-10-2024 13:18:30 WIB
5	Charles M. Tampubolon	22-10-2024 13:18:39 WIB
6	SUSANTO	22-10-2024 13:18:40 WIB
7	Diana Prima Penyami	22-10-2024 13:18:50 WIB
8	HERLIN BALI MURYANTI	22-10-2024 13:18:57 WIB
9	Dasa Susilo	22-10-2024 13:18:57 WIB
0	Rifyan Ridwan Saleh	22-10-2024 13:19:01 WIB

ID	NAME	TTD
1	Wiwik Winarsih	22-10-2024 13:20:04 WIB
2	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	22-10-2024 13:20:14 WIB
3	Ikhsyan Suprasetya	22-10-2024 13:20:28 WIB
4	Agus Widodo	22-10-2024 13:20:42 WIB
5	Jeance Jolanda Loppies	22-10-2024 13:20:47 WIB
6	Mulih	22-10-2024 13:21:12 WIB
7	Ainun Abror	22-10-2024 13:21:26 WIB
8	Firdaus	22-10-2024 13:21:57 WIB
9	Suryanto	22-10-2024 13:22:29 WIB
0	ARNI JUNIASTI ARAS	22-10-2024 13:22:34 WIB
1	Indriati	22-10-2024 13:22:48 WIB
2	HERI SUSANTO	22-10-2024 13:22:55 WIB
3	Hendrik Ruben Gelong	22-10-2024 13:23:04 WIB

IO	NAME	TTD
4	Edy Rudyanto	22-10-2024 13:23:37 WIB
5	Anugrah Yanuar Riswandani	22-10-2024 13:23:39 WIB
6	PAULUS Y. LENDES	22-10-2024 13:23:43 WIB
7	Saupi Hasbi	22-10-2024 13:23:47 WIB
8	Muhamad Fauzul Adzim	22-10-2024 13:24:00 WIB
9	Ratih Mutiara Louk Fanggi	22-10-2024 13:24:05 WIB
0	Ihsan Firmansyah	22-10-2024 13:24:17 WIB
1	Indra Rinaldy Isman	22-10-2024 13:24:25 WIB
2	Muhammad Dziqirullah	22-10-2024 13:25:01 WIB
3	Febrina Anggi Nurrahmadani	22-10-2024 13:25:05 WIB
4	Sarah Kamila El Islamy	22-10-2024 13:25:28 WIB
5	Sherena Octaria	22-10-2024 13:25:35 WIB
6	Rohadi	22-10-2024 13:26:18 WIB

IO	NAME	TTD
7	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	22-10-2024 13:26:24 WIB
8	ACHMAD TRISANA MARSEDA	22-10-2024 13:26:58 WIB
9	Elianta Ginting	22-10-2024 13:27:01 WIB
0	Maya Mey Sindy	22-10-2024 13:27:05 WIB
1	Jacob Resimau	22-10-2024 13:27:05 WIB
2	Arista Hidayatul Rahmansyah	22-10-2024 13:27:39 WIB
3	Sahrul Hikam	22-10-2024 13:27:44 WIB
4	Erwin Romel Sinaga	22-10-2024 13:27:57 WIB
5	Septinur Dadang	22-10-2024 13:28:01 WIB
6	DODI WINARDI	22-10-2024 13:28:04 WIB
7	Martono	22-10-2024 13:28:33 WIB
8	RISKAL M. YAKUB	22-10-2024 13:28:41 WIB
9	Febrina Aulya Rabbani	22-10-2024 13:29:07 WIB

IO	NAME	TTD
0	Syamsul Jahidin	22-10-2024 13:29:15 WIB
1	Purwanto	22-10-2024 13:29:15 WIB
2	Hendrik Eddy Purnomo	22-10-2024 13:29:20 WIB
3	Sri Widoyanti	22-10-2024 13:30:07 WIB
4	Parlin Silitonga	22-10-2024 13:30:44 WIB
5	Stefani Widyastuti	22-10-2024 13:31:21 WIB
6	Moch. Choirul Hamsyah	22-10-2024 13:31:45 WIB
7	Saparudin	22-10-2024 13:32:31 WIB
8	Delvina Marferita	22-10-2024 13:32:35 WIB
9	Robby Dareho	22-10-2024 13:34:32 WIB
00	Azimatun	22-10-2024 13:34:34 WIB
01	Reta Novita Sari	22-10-2024 13:34:48 WIB
02	Yanti Widiyanti	22-10-2024 13:35:00 WIB

IO	NAME	TTD
03	DENI MUNAWAR	22-10-2024 13:35:17 WIB
04	Romeo Varry Tumbel	22-10-2024 13:35:49 WIB
05	Siti Khatijah	22-10-2024 13:36:00 WIB
06	Eko Susiati	22-10-2024 13:36:20 WIB
07	Lisa Rochmilayali	22-10-2024 13:36:21 WIB
08	Vania Devi Novitasari	22-10-2024 13:37:25 WIB
09	Selmi Afif	22-10-2024 13:37:34 WIB
10	Sandra Tetelepta	22-10-2024 13:37:34 WIB
11	Yudha Adhi Oetomo	22-10-2024 13:38:06 WIB
12	Marselinus Edwin Hardhian	22-10-2024 13:38:21 WIB
13	Ega Battista	22-10-2024 13:39:01 WIB
14	Debora Anggie Noviana	22-10-2024 13:39:23 WIB
15	Atmowicahya D. Virgito	22-10-2024 13:39:48 WIB

IO	NAME	TTD
16	Haerul Kusuma	22-10-2024 13:41:24 WIB
17	Ade Salamah	22-10-2024 13:41:26 WIB
18	Faris Elhaq Sukrisman	22-10-2024 13:41:39 WIB
19	Bayu Propesta	22-10-2024 13:42:01 WIB
20	Abdul Majid	22-10-2024 13:42:01 WIB
21	ALI MUKTHAMAR	22-10-2024 13:42:53 WIB
22	Pandu Adie Wijaya	22-10-2024 13:45:13 WIB
23	Taufik Hidayat	22-10-2024 13:45:41 WIB
24	Muhammad Faisal Akbar	22-10-2024 13:46:21 WIB
25	Yusron Hidayat	22-10-2024 13:50:09 WIB
26	Edison	22-10-2024 13:54:06 WIB
27	Ririen Aryani	22-10-2024 13:54:12 WIB
28	Ruben Fritson	22-10-2024 13:57:04 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Anugrah Yanuar Riswandani	23-10-2024 08:31:09 WIB
	Yanti Widiyanti	23-10-2024 08:31:55 WIB
	REIZAL NORMAN MUSTAMU	23-10-2024 08:32:46 WIB
	Ito Lawputra	23-10-2024 08:32:47 WIB
	Debora Anggie Noviana	23-10-2024 08:32:55 WIB
	EKA SUSOPRANININGSIH PUTRI TRISNAWATI	23-10-2024 08:33:01 WIB
	Ridwan Syahbani Tamher	23-10-2024 08:33:05 WIB
	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	23-10-2024 08:33:39 WIB
	RATNA HERLINA SURYANA	23-10-2024 08:33:39 WIB
0	Glory M.M Marbun	23-10-2024 08:33:42 WIB

IO	NAME	TTD
1	Jasmine Salsabila Mulya	23-10-2024 08:33:53 WIB
2	Sindya A.M.	23-10-2024 08:33:55 WIB
3	Ana Sofa Yuking	23-10-2024 08:34:44 WIB
4	Hendrik Eddy Purnomo	23-10-2024 08:34:48 WIB
5	Diana Prima Penyami	23-10-2024 08:34:59 WIB
6	Fajar Shiddieq	23-10-2024 08:35:03 WIB
7	Jacob Resimau	23-10-2024 08:35:04 WIB
8	Sahrul Hikam	23-10-2024 08:35:38 WIB
9	HASRAN	23-10-2024 08:35:43 WIB
0	Rezzy Akbar Yudoprakoso	23-10-2024 08:36:10 WIB
1	Jeffry Palijama	23-10-2024 08:36:13 WIB
2	Dasa Susilo	23-10-2024 08:36:44 WIB
3	HERLIN BALI MURYANTI	23-10-2024 08:36:49 WIB

IO	NAME	TTD
4	Eko Susiati	23-10-2024 08:37:12 WIB
5	Sofyan Syahputra	23-10-2024 08:37:13 WIB
6	Georgian Obertha	23-10-2024 08:37:20 WIB
7	Ronald Budi Laksana	23-10-2024 08:37:21 WIB
8	Indriati	23-10-2024 08:37:25 WIB
9	Martono	23-10-2024 08:37:25 WIB
0	Hartono	23-10-2024 08:37:29 WIB
1	Ary Fiermawan	23-10-2024 08:37:36 WIB
2	Edison	23-10-2024 08:37:43 WIB
3	PAULUS Y. LENDES	23-10-2024 08:37:54 WIB
4	Ruben Fritson	23-10-2024 08:38:00 WIB
5	Febrina Anggi Nurrahmadani	23-10-2024 08:38:05 WIB
6	Atmowicahya D. Virgito	23-10-2024 08:38:25 WIB

IO	NAME	TTD
7	Agung Siswanto	23-10-2024 08:38:26 WIB
8	Tiko Wahyudi	23-10-2024 08:38:44 WIB
9	Yayan Susianto	23-10-2024 08:38:52 WIB
0	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	23-10-2024 08:38:55 WIB
1	HADI PRAJOKO	23-10-2024 08:38:58 WIB
2	Muhamad Fauzul Adzim	23-10-2024 08:39:03 WIB
3	Naskan	23-10-2024 08:39:15 WIB
4	Dendi Mulyadi	23-10-2024 08:39:22 WIB
5	Sudiyono Akbar	23-10-2024 08:39:28 WIB
6	Suryanto	23-10-2024 08:39:35 WIB
7	Taufik Hidayat	23-10-2024 08:39:35 WIB
8	AMIR AMIRULOH	23-10-2024 08:39:36 WIB
9	Edy Rudyanto	23-10-2024 08:39:41 WIB

IO	NAME	TTD
0	Ririen Aryani	23-10-2024 08:39:44 WIB
1	ALI MUKTHAMAR	23-10-2024 08:39:54 WIB
2	Sunny Shilby	23-10-2024 08:39:58 WIB
3	Erwin Romel Sinaga	23-10-2024 08:39:58 WIB
4	HERI SUSANTO	23-10-2024 08:40:02 WIB
5	Charles M. Tampubolon	23-10-2024 08:40:07 WIB
6	Robby Dareho	23-10-2024 08:40:18 WIB
7	Faizal Hafied	23-10-2024 08:40:20 WIB
8	Maya Mey Sindy	23-10-2024 08:40:27 WIB
9	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	23-10-2024 08:40:42 WIB
0	Kurnia Zakaria	23-10-2024 08:40:50 WIB
1	Saparudin	23-10-2024 08:40:57 WIB
2	Angga Dwi Prasetyo	23-10-2024 08:40:59 WIB

IO	NAME	TTD
3	Stefani Widyastuti	23-10-2024 08:41:09 WIB
4	ARNI JUNIASTI ARAS	23-10-2024 08:41:15 WIB
5	DODI WINARDI	23-10-2024 08:41:28 WIB
6	Muhamad Zarkasih	23-10-2024 08:41:31 WIB
7	Sapto Wibowo Sutanto	23-10-2024 08:41:36 WIB
8	Sri Widoyanti	23-10-2024 08:41:42 WIB
9	Vania Devi Novitasari	23-10-2024 08:42:04 WIB
0	Saupi Hasbi	23-10-2024 08:42:05 WIB
1	Bayu Propesta	23-10-2024 08:42:09 WIB
2	SUTAN SYAHRUDIN	23-10-2024 08:42:11 WIB
3	Moch. Choirul Hamsyah	23-10-2024 08:42:14 WIB
4	Agus Widodo	23-10-2024 08:42:18 WIB
5	RISKAL M. YAKUB	23-10-2024 08:42:42 WIB

IO	NAME	TTD
6	Wiwik Winarsih	23-10-2024 08:42:48 WIB
7	Elianta Ginting	23-10-2024 08:42:58 WIB
8	Teguh Kayen	23-10-2024 08:43:06 WIB
9	DENI MUNAWAR	23-10-2024 08:43:10 WIB
0	Ratih Mutiara Louk Fanggi	23-10-2024 08:43:30 WIB
1	Firdaus	23-10-2024 08:43:35 WIB
2	Arista Hidayatul Rahmansyah	23-10-2024 08:44:04 WIB
3	Hendri Darma Putra	23-10-2024 08:44:08 WIB
4	Rifyan Ridwan Saleh	23-10-2024 08:44:11 WIB
5	Hendrik Ruben Gelong	23-10-2024 08:44:15 WIB
6	Romeo Varry Tumbel	23-10-2024 08:44:25 WIB
7	Haerul Kusuma	23-10-2024 08:44:25 WIB
8	SUPENDI	23-10-2024 08:44:25 WIB

IO	NAME	TTD
9	Parlin Silitonga	23-10-2024 08:44:55 WIB
0	Muhammad Dziqirullah	23-10-2024 08:44:57 WIB
1	Arif Rahman Hakim	23-10-2024 08:45:00 WIB
2	Purwanto	23-10-2024 08:45:09 WIB
3	Yusron Hidayat	23-10-2024 08:45:14 WIB
4	Syafruddin	23-10-2024 08:45:25 WIB
5	TAUFIK HUSAIN	23-10-2024 08:45:31 WIB
6	Eko Arief Cahyono	23-10-2024 08:45:32 WIB
7	Anang Susanto	23-10-2024 08:45:32 WIB
8	Mulih	23-10-2024 08:45:36 WIB
9	Marc Duphariandi	23-10-2024 08:45:38 WIB
00	YUSRIL	23-10-2024 08:45:46 WIB
01	Rohadi	23-10-2024 08:46:26 WIB

IO	NAME	TTD
02	Indra Kusuma	23-10-2024 08:47:20 WIB
03	Syamsul Jahidin	23-10-2024 08:47:36 WIB
04	Lisa Rochmilayali	23-10-2024 08:47:48 WIB
05	ACHMAD TRISANA MARSEDA	23-10-2024 08:47:56 WIB
06	Faris Elhaq Sukrisman	23-10-2024 08:48:04 WIB
07	Ikhsyan Suprasetya	23-10-2024 08:49:25 WIB
08	Ainun Abror	23-10-2024 08:49:44 WIB
09	Indra Rinaldy Isman	23-10-2024 08:50:07 WIB
10	Ade Salamah	23-10-2024 08:50:13 WIB
11	Moh Mahdi	23-10-2024 08:50:22 WIB
12	Septinur Dadang	23-10-2024 08:50:29 WIB
13	Siti Khatijah	23-10-2024 08:50:48 WIB
14	Sarah Kamila El Islamy	23-10-2024 08:51:00 WIB

IO	NAME	TTD
15	Muhammad Faisal Akbar	23-10-2024 08:51:57 WIB
16	SUSANTO	23-10-2024 08:52:21 WIB
17	Yudha Adhi Oetomo	23-10-2024 08:52:35 WIB
18	MUHAMMAD RAMDHAN ULAYO	23-10-2024 08:52:54 WIB
19	Reta Novita Sari	23-10-2024 08:54:57 WIB
20	Jeance Jolanda Loppies	23-10-2024 08:55:21 WIB
21	RAHMANSYAH FIKRIADIN	23-10-2024 08:56:12 WIB
22	Azimatun	23-10-2024 08:56:33 WIB
23	Wawan Sugiarto	23-10-2024 08:56:35 WIB
24	Arteria Dahlan	23-10-2024 08:58:37 WIB
25	Prihatin Kusdini	23-10-2024 08:59:08 WIB
26	Pandu Adie Wijaya	23-10-2024 09:01:49 WIB
27	Faruqi Robbani	23-10-2024 09:02:06 WIB

IO	NAME	TTD
28	Sandra Tetelepta	23-10-2024 09:03:03 WIB
29	Agung M. Akbar Gunawan	23-10-2024 09:07:58 WIB
30	Marselinus Edwin Hardhian	23-10-2024 09:10:39 WIB
31	Delvina Marferita	23-10-2024 09:10:56 WIB
32	Sherena Octaria	23-10-2024 09:11:07 WIB
33	Selmi Afif	23-10-2024 09:11:10 WIB
34	Ega Battista	23-10-2024 09:12:15 WIB
35	Febrina Aulya Rabbani	23-10-2024 09:13:20 WIB
36	Angelieke Jeanette	23-10-2024 09:23:46 WIB
37	Deasy Anna Victorina	23-10-2024 09:24:37 WIB
38	Miftachul Isti Almaidhah	23-10-2024 09:30:08 WIB
39	Ahmad Triswadi	23-10-2024 09:35:28 WIB
40	Zevi	23-10-2024 09:37:58 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Georgian Obertha	23-10-2024 10:00:19 WIB
	Ito Lawputra	23-10-2024 10:00:41 WIB
	Purwanto	23-10-2024 10:00:45 WIB
	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	23-10-2024 10:00:49 WIB
	Sri Widoyanti	23-10-2024 10:00:55 WIB
	Fajar Shiddieq	23-10-2024 10:00:59 WIB
	Yusron Hidayat	23-10-2024 10:01:04 WIB
	Taufik Hidayat	23-10-2024 10:01:10 WIB
	Diana Prima Penyami	23-10-2024 10:01:11 WIB
0	Septinur Dadang	23-10-2024 10:01:25 WIB

IO	NAME	TTD
1	Sunny Shilby	23-10-2024 10:01:43 WIB
2	Teguh Kayen	23-10-2024 10:01:50 WIB
3	Faizal Hafied	23-10-2024 10:02:08 WIB
4	Sudiyono Akbar	23-10-2024 10:02:10 WIB
5	Muhammad Dziqirullah	23-10-2024 10:02:12 WIB
6	Sofyan Syahputra	23-10-2024 10:02:14 WIB
7	Abdul Majid	23-10-2024 10:02:17 WIB
8	PAULUS Y. LENDES	23-10-2024 10:02:18 WIB
9	Stefani Widyastuti	23-10-2024 10:02:18 WIB
0	Ririen Aryani	23-10-2024 10:02:19 WIB
1	Ana Sofa Yukung	23-10-2024 10:02:26 WIB
2	Dasa Susilo	23-10-2024 10:02:28 WIB
3	Indra Kusuma	23-10-2024 10:02:31 WIB

IO	NAME	TTD
4	HADI PRAJOKO	23-10-2024 10:02:31 WIB
5	Jeffry Palijama	23-10-2024 10:02:32 WIB
6	Marselinus Edwin Hardhian	23-10-2024 10:02:35 WIB
7	Angga Dwi Prasetyo	23-10-2024 10:02:41 WIB
8	Eko Susiati	23-10-2024 10:02:42 WIB
9	Martiningsih	23-10-2024 10:02:47 WIB
0	Tiko Wahyudi	23-10-2024 10:02:48 WIB
1	Martono	23-10-2024 10:02:50 WIB
2	Hartono	23-10-2024 10:02:52 WIB
3	Rina Tauran	23-10-2024 10:03:02 WIB
4	AMIR AMIRULOH	23-10-2024 10:03:08 WIB
5	AMIR AMIRULOH	23-10-2024 10:03:09 WIB
6	Sahrul Hikam	23-10-2024 10:03:09 WIB

IO	NAME	TTD
7	DODI WINARDI	23-10-2024 10:03:34 WIB
8	Naskan	23-10-2024 10:03:54 WIB
9	HERLIN BALI MURYANTI	23-10-2024 10:04:04 WIB
0	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	23-10-2024 10:04:08 WIB
1	Marc Duphariandi	23-10-2024 10:04:09 WIB
2	Ainun Abror	23-10-2024 10:04:10 WIB
3	YUSRIL	23-10-2024 10:04:11 WIB
4	Febrina Anggi Nurrahmadani	23-10-2024 10:04:11 WIB
5	Febrina Aulya Rabbani	23-10-2024 10:04:13 WIB
6	Sarah Kamila El Islamy	23-10-2024 10:04:13 WIB
7	Ronald Budi Laksmana	23-10-2024 10:04:14 WIB
8	ARNI JUNIASTI ARAS	23-10-2024 10:04:19 WIB
9	Saparudin	23-10-2024 10:04:19 WIB

IO	NAME	TTD
0	Suryanto	23-10-2024 10:04:19 WIB
1	Muhamad Fauzul Adzim	23-10-2024 10:04:20 WIB
2	HERI SUSANTO	23-10-2024 10:04:21 WIB
3	Lenarki Latupeirissa	23-10-2024 10:04:27 WIB
4	Haerul Kusuma	23-10-2024 10:04:30 WIB
5	Yayan Susianto	23-10-2024 10:04:32 WIB
6	Firdaus	23-10-2024 10:04:36 WIB
7	Azimatun	23-10-2024 10:04:37 WIB
8	Arteria Dahlan	23-10-2024 10:04:44 WIB
9	Debora Anggie Noviana	23-10-2024 10:05:04 WIB
0	Agung Siswanto	23-10-2024 10:05:10 WIB
1	Supardi	23-10-2024 10:05:29 WIB
2	Zevi	23-10-2024 10:06:06 WIB

IO	NAME	TTD
3	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	23-10-2024 10:06:09 WIB
4	Saupi Hasbi	23-10-2024 10:06:09 WIB
5	MUHAMMAD RAMDHAN ULAYO	23-10-2024 10:06:12 WIB
6	Agung M. Akbar Gunawan	23-10-2024 10:06:13 WIB
7	Ade Salamah	23-10-2024 10:06:16 WIB
8	Pandu Adie Wijaya	23-10-2024 10:06:17 WIB
9	Ega Battista	23-10-2024 10:06:20 WIB
0	Hendrik Ruben Gelong	23-10-2024 10:06:21 WIB
1	Sherena Octaria	23-10-2024 10:06:22 WIB
2	Eko Arief Cahyono	23-10-2024 10:06:27 WIB
3	Vania Devi Novitasari	23-10-2024 10:07:14 WIB
4	Mulih	23-10-2024 10:07:44 WIB
5	Jasmine Salsabila Mulya	23-10-2024 10:07:46 WIB

IO	NAME	TTD
6	Sindya A.M.	23-10-2024 10:07:50 WIB
7	Syamsul Jahidin	23-10-2024 10:08:02 WIB
8	Moh Mahdi	23-10-2024 10:09:04 WIB
9	Wimbo Bintoro	23-10-2024 10:09:07 WIB
0	Sapto Wibowo Sutanto	23-10-2024 10:10:51 WIB
1	Robby Dareho	23-10-2024 10:11:22 WIB
2	SUTAN SYAHRUDIN	23-10-2024 10:12:56 WIB
3	Jacob Resimau	23-10-2024 10:16:06 WIB
4	Lisa Rochmilayali	23-10-2024 10:16:50 WIB
5	Muhammad Faisal Akbar	23-10-2024 10:19:53 WIB
6	Wiwik Winarsih	23-10-2024 10:20:09 WIB
7	Faruqi Robbani	23-10-2024 10:22:14 WIB
8	Faris Elhaq Sukrisman	23-10-2024 10:28:26 WIB

IO	NAME	TTD
9	Rezzy Akbar Yudoprakoso	23-10-2024 10:36:16 WIB
0	TAUFIK HUSAIN	23-10-2024 10:36:54 WIB
1	Daniel Mubarach	23-10-2024 10:37:54 WIB
2	Atmowicahya D. Virgito	23-10-2024 10:39:02 WIB
3	Ikhsyan Suprasetya	23-10-2024 11:05:59 WIB
4	RAMADANI RAHMAN	23-10-2024 11:19:26 WIB
5	Yuda Aditia Ma Atfa	23-10-2024 11:25:16 WIB
6	Deasy Anna Victorina	23-10-2024 11:31:51 WIB
7	EKA SUSOPRANININGSIH PUTRI TRISNAWATI	23-10-2024 11:48:24 WIB
8	Yanti Widiyanti	23-10-2024 11:49:33 WIB
9	Ary Fiermawan	23-10-2024 11:52:52 WIB
00	Hendri Darma Putra	23-10-2024 11:59:08 WIB
01	ALI MUKTHAMAR	23-10-2024 13:00:55 WIB

IO	NAME	TTD
02	Ridwan Syahbani Tamher	23-10-2024 13:05:08 WIB
03	REIZAL NORMAN MUSTAMU	23-10-2024 13:10:44 WIB
04	RAHMANSYAH FIKRIADIN	23-10-2024 13:11:29 WIB
05	Bayu Propesta	23-10-2024 13:16:06 WIB
06	Parlin Silitonga	23-10-2024 13:20:29 WIB
07	Glory M.M Marbun	23-10-2024 13:26:42 WIB
08	SUPENDI	23-10-2024 14:08:53 WIB
09	Rohadi	23-10-2024 14:46:51 WIB
10	Muhamad Zarkasih	23-10-2024 14:57:32 WIB
11	Yudha Adhi Oetomo	23-10-2024 14:58:17 WIB
12	PITRA ROMADONI NASUTION	23-10-2024 15:02:57 WIB
13	HASRAN	23-10-2024 15:25:19 WIB

BELUM ABSEN

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	SUTAN SYAHRUDIN	24-10-2024 08:00:35 WIB
	Tiko Wahyudi	24-10-2024 08:00:38 WIB
	Haerul Kusuma	24-10-2024 08:01:16 WIB
	Suryanto	24-10-2024 08:01:54 WIB
	Dasa Susilo	24-10-2024 08:02:01 WIB
	HADI PRAJOKO	24-10-2024 08:02:02 WIB
	Fajar Shiddieq	24-10-2024 08:02:17 WIB
	Eko Susiati	24-10-2024 08:02:18 WIB
	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	24-10-2024 08:02:20 WIB
0	AMIR AMIRULOH	24-10-2024 08:02:25 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ainun Abror	24-10-2024 08:02:59 WIB
2	Ana Sofa Yuking	24-10-2024 08:03:03 WIB
3	Sofyan Syahputra	24-10-2024 08:03:11 WIB
4	Saparudin	24-10-2024 08:03:21 WIB
5	Jeance Jolanda Loppies	24-10-2024 08:03:49 WIB
6	Jeffry Palijama	24-10-2024 08:04:16 WIB
7	Yanti Widiyanti	24-10-2024 08:04:24 WIB
8	Muhamad Zarkasih	24-10-2024 08:04:43 WIB
9	Edy Rudyanto	24-10-2024 08:04:49 WIB
0	Teguh Kayen	24-10-2024 08:05:08 WIB
1	Eko Arief Cahyono	24-10-2024 08:05:09 WIB
2	Georgian Obertha	24-10-2024 08:05:21 WIB
3	Ito Lawputra	24-10-2024 08:05:34 WIB

IO	NAME	TTD
4	Ade Salamah	24-10-2024 08:05:38 WIB
5	Agung Siswanto	24-10-2024 08:05:41 WIB
6	Agus Widodo	24-10-2024 08:06:08 WIB
7	Wiwik Winarsih	24-10-2024 08:06:10 WIB
8	HASRAN	24-10-2024 08:06:16 WIB
9	Siti Khatijah	24-10-2024 08:06:25 WIB
0	Moch. Choirul Hamsyah	24-10-2024 08:06:28 WIB
1	HERI SUSANTO	24-10-2024 08:06:47 WIB
2	Hendri Darma Putra	24-10-2024 08:07:00 WIB
3	Yusron Hidayat	24-10-2024 08:07:09 WIB
4	Stefani Widyastuti	24-10-2024 08:07:10 WIB
5	Sudiyono Akbar	24-10-2024 08:07:13 WIB
6	Anugrah Yanuar Riswandani	24-10-2024 08:07:19 WIB

IO	NAME	TTD
7	Purwanto	24-10-2024 08:07:20 WIB
8	Ronald Budi Laksana	24-10-2024 08:07:29 WIB
9	EKA SUSOPRANININGSIH PUTRI TRISNAWATI	24-10-2024 08:07:32 WIB
0	Indriati	24-10-2024 08:07:38 WIB
1	Faizal Hafied	24-10-2024 08:07:48 WIB
2	Indra Kusuma	24-10-2024 08:07:50 WIB
3	Muhamad Fauzul Adzim	24-10-2024 08:08:03 WIB
4	Saupi Hasbi	24-10-2024 08:08:03 WIB
5	Glory M.M Marbun	24-10-2024 08:08:07 WIB
6	Debora Anggie Noviana	24-10-2024 08:08:10 WIB
7	Maya Mey Sindy	24-10-2024 08:08:27 WIB
8	Sunny Shilby	24-10-2024 08:08:28 WIB
9	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	24-10-2024 08:08:28 WIB

IO	NAME	TTD
0	Muhammad Dziqirullah	24-10-2024 08:08:44 WIB
1	Erwin Romel Sinaga	24-10-2024 08:09:24 WIB
2	Romeo Varry Tumbel	24-10-2024 08:09:29 WIB
3	DODI WINARDI	24-10-2024 08:09:44 WIB
4	Angga Dwi Prasetyo	24-10-2024 08:09:53 WIB
5	Angelieke Jeanette	24-10-2024 08:10:03 WIB
6	Angelieke Jeanette	24-10-2024 08:10:03 WIB
7	Bayu Propesta	24-10-2024 08:10:42 WIB
8	Sapto Wibowo Sutanto	24-10-2024 08:10:50 WIB
9	Sahrul Hikam	24-10-2024 08:11:03 WIB
0	Kurnia Zakaria	24-10-2024 08:11:25 WIB
1	Septinur Dadang	24-10-2024 08:12:02 WIB
2	Syamsul Jahidin	24-10-2024 08:12:08 WIB

IO	NAME	TTD
3	Reta Novita Sari	24-10-2024 08:12:31 WIB
4	Diana Prima Penyami	24-10-2024 08:12:41 WIB
5	Martono	24-10-2024 08:12:52 WIB
6	Faruqi Robbani	24-10-2024 08:12:56 WIB
7	Sri Widoyanti	24-10-2024 08:13:27 WIB
8	Taufik Hidayat	24-10-2024 08:13:33 WIB
9	Arif Rahman Hakim	24-10-2024 08:13:53 WIB
0	Agung M. Akbar Gunawan	24-10-2024 08:13:54 WIB
1	Marc Duphariandi	24-10-2024 08:14:06 WIB
2	Deasy Anna Victorina	24-10-2024 08:14:34 WIB
3	Deasy Anna Victorina	24-10-2024 08:14:35 WIB
4	Febrina Anggi Nurrahmadani	24-10-2024 08:14:43 WIB
5	YUSRIL	24-10-2024 08:14:46 WIB

IO	NAME	TTD
6	Muhammad Faisal Akbar	24-10-2024 08:15:34 WIB
7	Sherena Octaria	24-10-2024 08:15:49 WIB
8	Parlin Silitonga	24-10-2024 08:16:16 WIB
9	Azimatun	24-10-2024 08:16:24 WIB
0	Arteria Dahlan	24-10-2024 08:16:25 WIB
1	Martiningsih	24-10-2024 08:16:58 WIB
2	RISKAL M. YAKUB	24-10-2024 08:17:05 WIB
3	Jacob Resimau	24-10-2024 08:17:10 WIB
4	Yudha Adhi Oetomo	24-10-2024 08:17:17 WIB
5	Abraham Yesaya Runtu	24-10-2024 08:17:46 WIB
6	ARNI JUNIASTI ARAS	24-10-2024 08:20:24 WIB
7	Sarah Kamila El Islamy	24-10-2024 08:21:27 WIB
8	RAHMANSYAH FIKRIADIN	24-10-2024 08:21:34 WIB

IO	NAME	TTD
9	HERLIN BALI MURYANTI	24-10-2024 08:21:38 WIB
0	Mulih	24-10-2024 08:22:08 WIB
1	Wawan Sugiarto	24-10-2024 08:22:15 WIB
2	PAULUS Y. LENDES	24-10-2024 08:22:25 WIB
3	SUSANTO	24-10-2024 08:22:58 WIB
4	Vania Devi Novitasari	24-10-2024 08:22:59 WIB
5	Hendrik Ruben Gelong	24-10-2024 08:23:06 WIB
6	ACHMAD TRISANA MARSEDA	24-10-2024 08:23:23 WIB
7	RATNA HERLINA SURYANA	24-10-2024 08:23:45 WIB
8	Indra Rinaldy Isman	24-10-2024 08:23:48 WIB
9	Ririen Aryani	24-10-2024 08:25:11 WIB
00	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang	24-10-2024 08:25:21 WIB
01	Pandu Adie Wijaya	24-10-2024 08:25:38 WIB

IO	NAME	TTD
02	REIZAL NORMAN MUSTAMU	24-10-2024 08:27:13 WIB
03	Atmowicahya D. Virgito	24-10-2024 08:27:15 WIB
04	Sandra Tetelepta	24-10-2024 08:27:47 WIB
05	Marselinus Edwin Hardhian	24-10-2024 08:28:17 WIB
06	Charles M. Tampubolon	24-10-2024 08:28:30 WIB
07	Dendi Mulyadi	24-10-2024 08:28:53 WIB
08	Arista Hidayatul Rahmansyah	24-10-2024 08:29:37 WIB
09	Daniel Mubarach	24-10-2024 08:31:55 WIB
10	PITRA ROMADONI NASUTION	24-10-2024 08:32:23 WIB
11	Firdaus	24-10-2024 08:33:11 WIB
12	TAUFIK HUSAIN	24-10-2024 08:37:16 WIB
13	Ahmad Triswadi	24-10-2024 08:37:25 WIB
14	Miftachul Isti Almaidhah	24-10-2024 08:39:05 WIB

IO	NAME	TTD
15	Faris Elhaq Sukrisman	24-10-2024 08:42:36 WIB
16	Elianta Ginting	24-10-2024 08:45:15 WIB
17	Delvina Marferita	24-10-2024 08:46:43 WIB
18	Ikhsyan Suprasetya	24-10-2024 08:48:49 WIB
19	Ruben Fritson	24-10-2024 08:49:00 WIB
20	ALI MUKTHAMAR	24-10-2024 08:53:38 WIB
21	Febrina Aulya Rabbani	24-10-2024 08:58:02 WIB
22	Lisa Rochmilayali	24-10-2024 08:59:58 WIB
23	Hartono	24-10-2024 09:02:29 WIB
24	Robby Dareho	24-10-2024 09:17:34 WIB
25	Lenarki Latupeirissa	24-10-2024 09:22:20 WIB
26	Selmi Afif	24-10-2024 09:38:18 WIB
27	Ega Battista	24-10-2024 09:39:20 WIB

IO	NAME	TTD
28	Ega Battista	24-10-2024 09:39:47 WIB
29	Yayan Susianto	24-10-2024 09:40:46 WIB
30	Syafruddin	24-10-2024 09:42:06 WIB
31	SUPENDI	24-10-2024 09:42:08 WIB
32	Ratih Mutiara Louk Fanggi	24-10-2024 09:42:20 WIB
33	Abdul Majid	24-10-2024 09:42:52 WIB
34	Naskan	24-10-2024 09:43:47 WIB
35	Zevi	24-10-2024 09:46:01 WIB
36	Ihsan Firmansyah	24-10-2024 09:52:08 WIB
37	MUHAMMAD RAMDHAN ULAYO	24-10-2024 09:52:44 WIB
38	Rina Tauran	24-10-2024 10:00:41 WIB
39	Edison	24-10-2024 10:06:14 WIB
40	Hendrik Eddy Purnomo	24-10-2024 10:14:25 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Georgian Obertha	24-10-2024 10:30:17 WIB
	Haerul Kusuma	24-10-2024 10:30:42 WIB
	Ito Lawputra	24-10-2024 10:30:56 WIB
	Parlin Silitonga	24-10-2024 10:31:04 WIB
	Debora Anggie Noviana	24-10-2024 10:32:09 WIB
	HERLIN BALI MURYANTI	24-10-2024 10:32:43 WIB
	Sunny Shilby	24-10-2024 10:33:08 WIB
	Saupi Hasbi	24-10-2024 10:33:30 WIB
	Jacob Resimau	24-10-2024 10:33:37 WIB
0	Faizal Hafied	24-10-2024 10:33:39 WIB
1	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU	24-10-2024 10:33:58 WIB

IO	NAME	TTD
2	Sherena Octaria	24-10-2024 10:34:31 WIB
3	Angga Dwi Prasetyo	24-10-2024 10:34:52 WIB
4	Yanti Widiyanti	24-10-2024 10:36:08 WIB
5	Daniel Mubarach	24-10-2024 10:36:31 WIB
6	Ana Sofa Yukung	24-10-2024 10:37:05 WIB
7	Diana Prima Penyami	24-10-2024 10:37:06 WIB
8	SUTAN SYAHRUDIN	24-10-2024 10:38:08 WIB
9	Yusron Hidayat	24-10-2024 10:38:44 WIB
0	Rifyan Ridwan Saleh	24-10-2024 10:39:05 WIB
1	HADI PRAJOKO	24-10-2024 10:39:26 WIB
2	Sahrul Hikam	24-10-2024 10:39:33 WIB
3	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN	24-10-2024 10:39:39 WIB
4	Agung M. Akbar Gunawan	24-10-2024 10:41:51 WIB

IO	NAME	TTD
5	YUSRIL	24-10-2024 10:41:55 WIB
6	Indra Kusuma	24-10-2024 10:43:27 WIB
7	Abraham Yesaya Runtu	24-10-2024 10:46:39 WIB
8	Muhammad Dziqirullah	24-10-2024 10:47:39 WIB
9	Arteria Dahlan	24-10-2024 10:48:25 WIB
0	Ikhsyan Suprasetya	24-10-2024 10:48:46 WIB
1	Marc Duphariandi	24-10-2024 10:50:04 WIB
2	Eko Arief Cahyono	24-10-2024 10:51:03 WIB
3	Tiko Wahyudi	24-10-2024 10:51:09 WIB
4	Sofyan Syahputra	24-10-2024 10:51:22 WIB
5	Muhammad Faisal Akbar	24-10-2024 10:51:55 WIB
6	ALI MUKTHAMAR	24-10-2024 10:51:57 WIB
7	Bayu Propesta	24-10-2024 10:52:23 WIB

IO	NAME	TTD
8	Ega Battista	24-10-2024 10:52:45 WIB
9	Saparudin	24-10-2024 10:53:04 WIB
0	Ainun Abror	24-10-2024 10:53:36 WIB
1	Rina Tauran	24-10-2024 10:54:03 WIB
2	Teguh Kayen	24-10-2024 10:54:17 WIB
3	DENI MUNAWAR	24-10-2024 10:54:38 WIB
4	HERI SUSANTO	24-10-2024 10:55:02 WIB
5	Marselinus Edwin Hardhian	24-10-2024 10:56:09 WIB
6	Sudiyono Akbar	24-10-2024 10:58:13 WIB
7	PAULUS Y. LENDES	24-10-2024 10:58:45 WIB
8	Jeance Jolanda Loppies	24-10-2024 10:58:59 WIB
9	Purwanto	24-10-2024 11:00:31 WIB
0	Yudha Adhi Oetomo	24-10-2024 11:02:58 WIB

IO	NAME	TTD
1	AMIR AMIRULOH	24-10-2024 11:03:51 WIB
2	Fajar Shiddieq	24-10-2024 11:04:03 WIB
3	Vania Devi Novitasari	24-10-2024 11:06:32 WIB
4	Atmowicahya D. Virgito	24-10-2024 11:07:56 WIB
5	Muhamad Fauzul Adzim	24-10-2024 11:08:21 WIB
6	Septinur Dadang	24-10-2024 11:08:58 WIB
7	Lisa Rochmilayali	24-10-2024 11:09:40 WIB
8	ARNI JUNIASTI ARAS	24-10-2024 11:10:05 WIB
9	Hartono	24-10-2024 11:10:24 WIB
0	Sarah Kamila El Islamy	24-10-2024 11:12:02 WIB
1	Ridwan Syahbani Tamher	24-10-2024 11:13:17 WIB
2	Edy Rudyanto	24-10-2024 11:16:51 WIB
3	Moch. Choirul Hamsyah	24-10-2024 11:17:13 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT DIUNDUH
MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA
DENGAN LOGIN DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username: Pusedik_MK
password: pusedikmkri9

Username :
GK3_PUSDIKLAT
password : pusedikmkri

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Individu
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pemohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Rafael Nadal_Permohonan Pemohon

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Rafael Nadal_Permohonan Pemohon





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI



Username:

Password:



ABDULKADIR

PESERTA

NO
REGISTRASI
PESERTA

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
23 Oktober 2024**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



*** Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke Daftar
Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI ADVOKAT ANGKATAN I

Narasumber : Dian Chusnul Chatimah

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	ALI MUKTHAMAR, S.H.	65	65	70	66
2	3	Ratih Mutiara Louk Fanggi, S.H., M.H.	65	65	70	66
3	6	Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M., M.I.Kom.	0	0	0	0
4	11	Delvina Marferita, S.H.	78	80	70	77,6
5	18	Erwin Romel Sinaga, S.H., M.H. CEL.	65	65	65	65
6	26	Arista Hidayatul Rahmasyah, S.H., M.H.	69	65	70	66,8
7	30	Ahmad Triswadi, S.E., S.H., M.H.	70	70	70	70
8	32	Wawan Sugiarto, S.H., M.H.	69	65	70	66,8
9	37	Glory M.M Marbun, S.H.	65	65	70	66
10	42	Hendri Darma Putra, S.H., M.H.	68	68	70	68,4
11	46	HASRAN, S.H., M.Hum.	70	75	70	73
12	49	Teguh Kayen, S.H.I., M.H.	70	65	70	67
13	53	Ary Fiermawan	0	0	0	0
14	54	Ito Lawputra, S.H., S.I.Kom, M.H., C.Med., CTA.	68	68	70	68,4
15	57	SUSANTO, S.H., M.H. CPM.	70	69	70	69,4
16	67	Rifyan Ridwan Saleh, S.H., M.H.	69	70	70	69,8
17	71	Dr. (C) Muhamad Zarkasih, S.H., M.H., M.Si.	70	69	70	69,4
18	73	RISKAL M. YAKUB, S.H.	65	65	70	66
19	75	Romeo Varry Tumbel, S.H.	78	80	70	77,6
20	79	Septinur Dadang, S.H.	65	65	70	66
21	83	Faruqi Robbani, S.H., M.Kn.	65	65	70	66
22	86	Vania Devi Novitasari, S.H.	78	80	70	77,6
23	91	Abdul Majid, S.Pi., M.H.	78	80	70	77,6
24	97	Anugrah Yanuar Riswandani, S.H.	68	69	70	69
25	99	TAUFIK HUSAIN, S.H.	68	68	70	68,4
26	101	Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.	78	80	70	77,6

27	105	Dr.N.R Indriati, SH.SE.MH.MKn.	65	65	70	66
28	110	Dewi Wiwiek, SH.Mkn	70	65	70	67
29	114	Ikhsyan Suprasetya, SH	65	65	70	66
30	120	Azimatun, SH	68	69	70	69
31	123	RATNA HERLINA SURYANA AMD, SST. PAN. S.H., M.H.	65	65	70	66
32	125	Syafruddin, S.T., S.H.	70	75	70	73
33	129	Rezzy Akbar Yudoprakoso, S.H.	67	68	70	68,2
34	132	Ruben Fritson, S.H.	65	65	70	66
35	141	Prija Aji Satriaji	0	0	0	0
36	146	Taufik Hidayat, S.H.	70	65	70	67
37	147	Yusron Hidayat, S.H.	70	70	70	70
38	153	Sandra Tetelepta, SH	65	65	70	66
39	154	SUPENDI, S.H., M.H., CLA.	65	65	70	66
40	160	Angelieke Jeanette, SH. MH	65	65	70	66



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Narasumber : Ria Indriyani

NO	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	2	HERI SUSANTO, SH MH	75	70	75	72
2	4	Yayan Susianto, S.H.	70	70	70	70
3	7	Indra Rinaldy Isman, S.H.	75	75	75	75
4	9	Sunny Shilby, S.H.	75	70	75	72
5	14	Sarah Kamila El Islamy, S.H.	75	80	75	78
6	17	Febrina Anggi Nurrahmadani, S.H	75	70	75	72
7	19	Ronald Budi Laksana, S.H., M.H.	75	70	75	72
8	21	Suryanto, S.H., M.H.	70	75	70	73
9	23	ARNI JUNIASTI ARAS, S.H.	70	70	70	70
10	28	Eko Susiati, S.H., M.H.	60	65	60	63
11	34	Agung Siswanto, S.H	70	70	70	70
12	35	Ainun Abror, S.H.	75	75	75	75
13	36	Debora Anggie Noviana, S.H.	75	70	75	72
14	38	Purwanto, S.H.	70	70	70	70
15	45	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN, A.Md.T., S.H.	70	80	75	77
16	50	Supardi, S.H., M.H.	0	0	0	0
17	55	Pandu Adie Wijaya, S.H.	75	75	75	75
18	59	Haerul Kusuma, S.H.	75	80	80	79
19	60	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang, S.H.	70	70	70	70
20	62	Ega Battista, S.H.	65	65	65	65
21	65	Saparudin, S.H., M.H.	70	70	70	70
22	70	Parlin Sililonga, S.H.	75	80	75	78
23	77	Marselinus Edwin Hardhian, S.H., CMLC.	75	85	75	81
24	89	Febrina Aulya Rabbani, S.H., M.Kn., CTL	75	70	75	72
25	98	YUSRIL, S. H.	75	75	75	75
26	100	Georgian Obertha, S.H.	70	70	70	70

27	104	Reta Novita Sari, S.H.	0	0	0	0
28	107	Muhamad Fauzul Adzim, S.H., M.H.	75	80	75	78
29	116	Marc Duphariandi, SH	75	70	75	72
30	118	Siti Khatijah, SH	70	70	70	70
31	119	Deasy Anna Victorina, S, SH	70	70	70	70
32	126	Daniel Mubarach	75	75	75	75
33	131	Sapto Wibowo Sutanto, S.H	70	65	70	67
34	134	PITRA ROMADONI NASUTION, S.H., M.H.	0	0	0	0
35	136	Arteria Dahlan, S.T., S.H.,M.H.	75	88	80	83,8
36	138	Tina Haryaningsih Tamher, S.H., M.H.	0	0	0	0
37	149	Firdaus, S.H.	70	70	70	70
38	151	Aryo Tyasmoro, S.H.	0	0	0	0
39	155	Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H.	70	75	70	73
40	157	Dr Robby Dareho, S.H., M.Th.	75	70	75	72



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

Narasumber : Helmi Kasim

NO	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	8	Tiko Wahyudi, S.H.	20	30	20	70
2	12	Miftachul Isti Almaidhah, S.H.	20	35	20	75
3	15	REIZAL NORMAN MUSTAMU, S.H.	20	30	20	70
4	16	Hartono, S.H.	20	45	15	80
5	27	Eko Arief Cahyono, S.H., M.H.	20	30	20	70
6	31	Naskan, S.Hi., M.H	20	30	20	70
7	39	Maya Mey Sindy, S.H.	20	25	20	65
8	41	ACHMAD TRISANA MARSEDA, S.H.	20	35	20	75
9	43	Martono, S.H., M.H.	20	20	20	60
10	47	Wimbo Bintoro, S.H.	20	25	20	65
11	48	Indra Kusuma, SH	20	25	20	65
12	51	Sofyan Syahputra, S.H.	20	30	20	70
13	56	Arif Rahman Hakim, S.H., M.H	20	25	20	65
14	58	Dasa Susilo, SH	20	30	20	70
15	61	Selmi Afif, S.H.	20	25	20	65
16	69	HERLIN BALI MURYANTI, S.H.	20	35	20	75
17	72	DODI WINARDI, S.H.	20	25	20	65
18	76	EKA SUSOPRANINGSIH PUTRI TRISNAWATI, S.H.	20	30	20	70
19	82	Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H.	20	30	20	70
20	85	Ririen Aryani, S.H., M.H.	20	30	20	70
21	88	Ridwan Syahbani Tamher, S.H.	0	0	0	0
22	90	Martorningsih, S.H., M.H.	20	20	20	60
23	94	Lisa Rochmilayali, S.H.,M.Kn.,Cpm.	20	30	20	70
24	95	PAULUS Y. LENDES, S.H.	20	35	20	75
25	96	RAHMANSYAH FIKRIADIN, S.H.	20	30	20	70
26	102	Jeffry Palijama, SH	20	25	20	65

27	106	Sri Widoyanti, SH	20	20	20	60
28	113	Sudiyono Akbar, S.H. M.H, M.A.P.	20	20	20	60
29	122	Yudha Adhi Oetomo, SH MH CLA	20	30	20	70
30	128	Jasmine Salsabila Mulya	0	0	0	0
31	130	Moh Mahdi, SH .	0	0	0	0
32	133	RAMADANI RAHMAN, S.E	0	0	0	0
33	135	Ana Sofa Yuking, S.H., M.H.	20	40	20	80
34	137	Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.	0	0	0	0
35	140	Stefani Widyastuti	20	45	20	85
36	144	Yuda Aditia Ma Atfa, S.H.	0	0	0	0
37	145	Muhammad Dziqirullah	20	30	20	70
38	150	Mulih, S.H.	20	25	20	65
39	158	Arnold Pohan, S.H.	0	0	0	0
40	159	Rina Tauran, SH.MH	20	20	20	60

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN
2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I**

Narasumber : Bisariyadi

NO	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	5	Dendi Mulyadi, S.H.	70	65	70	67
2	10	Abraham Yesaya Runtu, S.H.,M.H(C)	70	65	70	67
3	13	MUHAMMAD RAMDHAN ULAYO	80	75	80	77
4	20	YOSEF EXEL PINONDANG, S.H.	80	70	70	72
5	22	Atmowicahya D. Virgito, SH,MH.	70	65	70	67
6	24	Agus Widodo, S.H.	70	70	70	70
7	25	Zevi, S.H.	80	75	80	77
8	29	Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H.	70	65	65	66
9	33	H. Edy Rudyanto, S.H.	70	65	65	66
10	40	Saupi Hasbi, S.H.	70	65	65	66
11	44	Dr. Ir. HADI PRAJOKO, S.H., M.H.	80	75	80	77
12	52	Yanti Widiyanti, S.H., M.H.	70	65	65	66
13	63	Jacob Resimau, SH	60	60	65	61
14	64	SUTAN SYAHRUDIN, S.H.	70	65	70	67
15	66	Hendrik Ruben Gelong, S.H., M.H.	80	75	80	77
16	68	dr. Charles M. Tampubolon, S.H., M.KKK.	80	75	80	77
17	74	Diana Prima Penyami, S.H., M.H.	75	75	75	75
18	78	Fajar Shiddieq, S.H., M.H.	80	80	80	80
19	80	H. AMIR AMIRULOH, S.H.	70	70	70	70
20	81	Faris Elhaq Sukrisman, S.H.	70	65	70	67
21	84	Muhammad Faisal Akbar, S.H., M.Kn.	0	0	0	0
22	87	Sahrul Hikam, S.H.	75	75	75	75
23	92	Ade Salamah, SH.MH	80	70	75	73
24	93	Edison, S.H.	70	70	70	70
25	103	Ihsan Firmansyah, S.H.	0	0	0	0
26	108	Sherena Oclaria, S.H.	80	80	80	80
27	109	Elianta Ginting, SH.MH	70	65	65	66
28	111	SYAIFUL MA ARIF, S.H.	0	0	0	0
29	112	Bayu Propesta, SH	70	65	65	66

30	115	Agung M. Akbar Gunawan, SH	70	70	70	70
31	117	DENI MUNAWAR, S.H.	80	70	75	73
32	121	Prihatin Kusdini, SH.MH	70	65	70	67
33	124	Dr. Kurnia Zakaria, S.H., M.S.	80	75	80	77
34	127	Sindya A.M.	60	60	60	60
35	139	Dr. Hendrik Eddy Purnomo, S.H., M.H., ACIArb., C.Med.	70	70	70	70
36	142	M. Oryzha Al Ghazali, S.H., M.H.	0	0	0	0
37	143	Rohadi, S.H.	0	0	0	0
38	148	Anang Susanto, S.H.	60	60	60	60
39	152	Jeance Jolanda Loppies, SH	70	65	65	66
40	156	NURUL HUDAH, S. E., S. H., M. H.	75	70	75	72

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

NAMA NARASUMBER : Dian Chusnul Chatimah

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta cukup antusias dalam praktek pembuatan permohonan.
2	Oleh karena mayoritas peserta belum pernah menghadapi permohonan Pemohon sehingga peserta kesulitan untuk membuat kalimatisasi dalam permohonannya.
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

NAMA NARASUMBER : Ria Indriyani

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta masih belum memahami penghitungan 158
	Peserta masih belum memberikan alasan terhadap dalil-dalil permohonan
	Bagian petitum poin 2 tidak dipilih apakah pemohon memilih a atau b
	Masih ada yang mengajukan pada tanggal 7 Desember, dan 8 desember dimana ini bukan hari kerja
2	Penulisan Pemohon, Termohon masih menyorok ke dalam seharusnya rata kanan
	Masih ada yang menggunakan jumlah penduduk adalah jumlah DPT di soal
	Pengisian perolehan suara yang benar menurut Pemohon, masih ada yang sama dengan perolehan suara yang benar menurut Termohon
	Petitum alternatif semua digunakan sehingga petitum Pemohon menjadi kabur, selain itu ada yang meminta menggunakan petitum alternatif namun TPSnya sama, kalau TPSnya sama pilih salah satu saja petitum alternatifnya
3	Peserta ada yang membuat daftar bukti namun tidak dituangkan dalam posita permohonan
	Keputusan KPU tentang nomor urut dan pasangan calon tentangnya masi menggunakan kalimat yang di template
	Masih ada yang belum menghapus yang tidak diperlukan
	Ada yang tidak konsisten mengenai tanggal pengajuan, di dalam uraian tenggang waktu menambahkan kalimat bahwa permohonan diajukan pada tanggal 6 namun tanggal permohonannya 8 desember
4	Pada bagian Kedudukan hukum peserta tidak konsisten dalam menyebutkan pasangan calon yang memiliki suara terbanyak
	Peserta ada yang tidak mengisi bagian identitas
	Peserta ada yang tidak menuliskan tanggal permohonan
	Pada bagian petitum ada peserta yang menuliskan ulang poin-poin dalil

	permasalahan
5	Penomoran sistematika permohonan ada yang terhapus
	Pemohon tidak menghapus tabel untuk gubernur dan wakil gubernur
6	
7	
8	
9	
10	
11	

--	--

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

NAMA NARASUMBER : Helmi Kasim

KELAS : Kelas 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Sebagian peserta menggunakan eksepsi namun sekedar menulis kembali uraian mengenai baik kewenangan/tenggang waktu maupun kedudukan hukum yang ada dalam permohonan. Sebagian ada yang menambahkan di ujung uraian dengan sekedar menyatakan MK tidak berwnang, Permohonan melewati tenggang waktu sert Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
	Terdapat peserta yang tidak menuliskan "Dalam Eksepsi" ketika menggunakan argumentasi memberikan eksepsi.
	Terdpat peserta yang mencampuradukkan antara argumentasi dalam eksepsi dengan argumentasi yang seharusnya digunakan untuk membantah dalil permohonan dalam posita.
2	Terdapat peserta yang tidak dapat membedakan tanggal permohon sebagai dasar untuk menghitung tenggat waktu pengajuan dengan tanggal registrasi perkara. Sebagian peserta menggunakan tanggal registrasi perkara untuk menghitung tenggat waktu pengajuan permohonan.
3	Terdapat peserta yang menggunakan argumentasi terkait Pasal 158 UU 10/2016 untuk menyatakan tidak berwenangnya Mahkamah, argumentasi Pasal 158 lazimnya digunakan untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
4	Catatan: Peserta yang tidak membawa laptop tampaknya kesulitan dalam

	menjawab soal. Untuk sekedar menyesuaikan dengan template, setelah memeriksa lembar jawaban tampak adanya kesulitan di samping kesulitan untuk Menyusun argumentasi.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

11	



Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



Database Peserta Kegiatan Registered

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	KAB/KOT
1	ALI MUKTHAMAR, S.H.	Laki-laki	BPW PERADIN Lampung	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN
2	HERI SUSANTO, SH MH	Laki-laki	DPC PERADI SAI BOGOR RAYA	JAWA BARAT	KAB. BOGOR
3	Ratih Mutiara Louk Fanggi, S.H., M.H.	Perempuan	PERADI "DPC Mataram "	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM
4	Yayan Susianto, S.H.	Laki-laki	DPW PERADIN Banten	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU
5	Dendi Mulyadi, S.H.	Laki-laki	"DPC Sukabumi " pradi said	JAWA BARAT	KAB. SUKABUMI
6	Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M., M.I.Kom.	Laki-laki	DPNI	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN
7	Indra Rinaldy Isman, S.H.	Laki-laki	"DPC Sukabumi "	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
8	Tiko Wahyudi, S.H.	Laki-laki	DPNI	JAWA TENGAH	KAB. CILACAP
9	Sunny Shilby, S.H.	Laki-laki	DPNI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT
10	Abraham Yesaya Runtu, S.H	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KOTA DEPOK
11	Delvina Marferita, S.H.	Laki-laki	DPNI	BANTEN	KOTA TANGERANG
12	Miftachul Isti Almaidhah, S.H.	Perempuan	DPNI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
13	MUHAMMAD RAMDHAN ULAYO	Laki-laki	BPW PERADIN Banten	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN
14	Sarah Kamila El Islamy, S.H.	Perempuan	DPNI	JAWA BARAT	KAB. KUNINGAN
15	REIZAL NORMAN MUSTAMU, S.H.	Laki-laki	DPN Indonesia	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
16	Hartono, S.H.	Laki-laki	PERADI "DPC Sidoarjo "	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO
17	Febrina Anggi Nurrahmadani, S.H	Perempuan	DPNI	-	-
18	Erwin Romel Sinaga, S.H., M.H. CEL.	Laki-laki	DPN	BANTEN	KAB. TANGERANG
19	Ronald Budi Laksmana, S.H., M.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur Peradin	JAWA TIMUR	KAB. MALANG
20	YOSEF EXEL PINONDANG HUTAJULU, S.H.	Laki-laki	DPNI	-	-
21	Suryanto, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI "DPC Kediri Raya "	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI
22	Atmowicahya D. Virgito, S.H., M.H.	Laki-laki	"DPC Gorontalo " PERADI	GORONTALO	KAB. GORONTALO
23	ARNI JUNIASTI ARAS, S.H.	Perempuan	DPNI	JAWA BARAT	KOTA DEPOK
24	Agus Widodo, S.H.	Laki-laki	"DPC Madiun Raya " PRADI SAI DPC MADIUN RAYA	JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO
25	Zevi, S.H.	Perempuan	DPNI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
26	Arista Hidayatul Rahmansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	"DPC Madiun Raya " DPC PERADI MADIUN	JAWA TIMUR	KAB. MADIUN
27	Eko Arief Cahyono, S.H., M.H.	Laki-laki	DPC Peradi SAI Surabaya	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA
28	Eko Susiati, S.H., M.H.	Perempuan	"DPC Sidoarjo "PRADI SAI	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA
29	Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H.	Laki-laki	"DPC Sidoarjo " PRADI SAI SIDOARJO	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO
30	Ahmad Triswadi, S.E., S.H., M.H	Laki-laki	Tim Hukum Santri Kudus Jawa Tengah	-	-

31	Naskan, S.Hi., M.H	Laki-laki	Tim Hukum Santri Kudus Jawa Tengah	-	-
32	Wawan Sugiarto, S.H., M.H.	Laki-laki	"DPC Madiun Raya " PERADI SAI MADIUN RAYA	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN
33	H. Edy Rudyanto, S.H.	Laki-laki	PERADI	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO
34	Agung Siswanto, S.H	Laki-laki	Tim Hukum Santri Kudus Jawa Tengah	JAWA TENGAH	KAB. KUDUS
35	Ainun Abror, S.H.	Laki-laki	"DPC Sidoarjo " DPC PERADI SAI SIDOARJO	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO
36	Debora Anggie Noviana, S.H.	Perempuan	DPNI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA
37	Glory M.M Marbun, S.H.	Perempuan	DPNI INDONESIA	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
38	Purwanto, S.H.	Laki-laki	PERADI "DPC Sidoarjo "	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA
39	Maya Mey Sindy, S.H.	Perempuan	DPNI	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
40	Saupi Hasbi, S.H.	Laki-laki	DPNI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
41	ACHMAD TRISANA MARSEDA, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Barat Peradin	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG
42	Hendri Darma Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	BPW Jawa Barat Peradin	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG
43	Martono, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI "DPC Sidoarjo "	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO
44	Dr. Ir. HADI PRAJOKO, S.H., M.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur Peradin	JAWA TIMUR	KOTA MALANG
45	AGUNG RIZKHI ZAIFUDHIN, A.Md.T., S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur Peradin	JAWA TIMUR	KOTA MALANG
46	HASRAN, S.H., M.Hum.	Laki-laki	PERADIN BPW Jawa Timur Peradin	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA
47	Wimbo Bintoro, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur Peradin	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK
48	Indra Kusuma, SH	Laki-laki	DPC Depok PERHAKI	JAWA BARAT	KOTA DEPOK
49	Teguh Kayen, S.H.I., M.H	Laki-laki	"DPC Salatiga "	JAWA TENGAH	KAB. BOYOLALI
50	H. Supardi, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADIN BPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA
51	Sofyan Syahputra, S.H.	Laki-laki	"DPC PERADI SAI Deli Serdang "	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN
52	Yanti Widiyanti, S.H., M.H.	Perempuan	BPW PERADIN Banten	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN
53	Ary Fiermawan	Laki-laki	BPW Banten Peradin	BANTEN	KOTA TANGERANG
54	Ito Lawputra, S.H., S.I.Kom, M.H., C.Med., CTA.	Laki-laki	DPNI	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
55	Pandu Adie Wijaya, S.H.	Laki-laki	"DPC Sidoarjo " OA	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO
56	Arif Rahman Hakim, S.H., M.H	Laki-laki	DPNI	-	-
57	SUSANTO, S.H., M.H. CPM.	Laki-laki	PERADI "DPC Sidoarjo "	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO
58	Dasa Susilo, SH	Laki-laki	DPC Bekasi	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
59	Haerul Kusuma, S.H.	Laki-laki	DPNI	BANTEN	KAB. LEBAK
60	Ahmad Kamal Arifin Sitanggang, S.H.	Laki-laki	DPC Depok PERHAKI	-	-
61	Selmi Afif, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Tengah Peradin	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG
62	Ega Battista, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Tengah Peradin	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT

63	Jacob Resimau, SH	Laki-laki	DPC Bekasi PERHAKI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
64	SUTAN SYAHRUDIN, S.H.	Laki-laki	Peradin BPW Jawa Barat	JAWA BARAT	KOTA BOGOR
65	Saparudin, S.H., M.H.	Laki-laki	BPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	TENGGARONG
66	Hendrik Ruben Gelong, S.H., M.H.	Laki-laki	DPNI	-	-
67	Rifyan Ridwan Saleh, S.H., M.H.	Laki-laki	DPNI	-	-
68	dr. Charles M. Tampubolon, S.H., M.KKK.	Laki-laki	DPN	BANTEN	KAB. TANGERANG
69	HERLIN BALI MURYANTI, S.H.	Perempuan	DPN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
70	Parlin Silitonga, S.H.	Laki-laki	DPN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
71	Dr. (C) Muhamad Zarkasih, S.H., M.H., M.Si.	Laki-laki	BPW PERADIN DKI Jakarta	JAWA BARAT	KAB. BOGOR
72	DODI WINARDI, S.H.	Laki-laki	DPN INDONESIA	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
73	RISKAL M. YAKUB, S.H.	Laki-laki	DPN INDONESIA	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA TIMUR
74	Diana Prima Penyami, S.H., M.H.	Perempuan	DPN PRADI SHI	BANTEN	KOTA TANGERANG
75	Romeo Varry Tumbel, S.H.	Laki-laki	"DPC Manado "	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO
76	EKA SUSOPRANININGSIH PUTRI TRISNAWATI, S.H.	Perempuan	BPW Banten Peradin	BANTEN	KOTA TANGERANG
77	Marselinus Edwin Hardhian, S.H., CMLC.	Laki-laki	BPW Jawa Tengah Peradin	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT
78	Fajar Shiddieq, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI "DPC Sukabumi "	JAWA BARAT	KAB. G A R U T
79	Septinur Dadang, S.H.	Laki-laki	BPW DKI Jakarta Peradin	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
80	H. AMIR AMIRULOH, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Barat Peradin	JAWA BARAT	KOTA BOGOR
81	Faris Elhaq Sukrisman, S.H.	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
82	Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H.	Laki-laki	DPNI INDONESIA	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
83	Faruqi Robbani, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KAB. CIANJUR
84	Muhammad Faisal Akbar, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
85	Ririen Aryani, S.H., M.H.	Perempuan	DPNI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
86	Vania Devi Novitasari, S.H.	Perempuan	DPNI	JAWA BARAT	KAB. BOGOR
87	Sahrul Hikam, S.H.	Laki-laki	DPNI	BANTEN	KAB. LEBAK
88	Ridwan Syahbani Tamher, S.H.	Laki-laki	PERADIN	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
89	Febrina Aulya Rabbani, S.H., M.Kn., CTL	Perempuan	DPNI	JAWA BARAT	KAB. G A R U T
90	Martiningsih, S.H., M.H.	Perempuan	PERHAKI DPP DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
91	Abdul Majid, S.Pi., M.H.	Laki-laki	PERADIN	JAWA BARAT	KOTA BOGOR
92	Ade Salamah, SH.MH	Perempuan	DPP DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
93	Edison, S.H.	Laki-laki	PERADIN	JAWA BARAT	KAB. BOGOR
94	Lisa Rochmilayali, S.H.,M.Kn.,Cpm.	Perempuan	DPNI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
95	PAULUS Y. LENDES, S.H.	Laki-laki	DPNI INDONESIA	-	-

96	RAHMANSYAH FIKRIADIN, S.H.	Laki-laki	Sudding & Partners	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
97	Anugrah Yanuar Riswandani, S.H.	Perempuan	PERHAKI JDPC Bekasi	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
98	YUSRIL, S.H.	Laki-laki	Sudding & Partners	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
99	TAUFIK HUSAIN, S.H.	Laki-laki	Sudding & Partners	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
100	Georgian Obertha, S.H.	Laki-laki	PERHAKHI	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
101	Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KAB. BOGOR
102	Jeffry Palijama, SH	Laki-laki	DPP DKI Jakarta	JAWA BARAT	KOTA DEPOK
103	Ihsan Firmansyah, S.H.	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KAB. CIANJUR
104	Reta Novita Sari, S.H.	Perempuan	DPN	JAWA BARAT	KAB. CIANJUR
105	Dr.N.R Indriati, SE.SH.MH.MKn.	Perempuan	DPP PERHAKHI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
106	Sri Widoyanti, SH	Perempuan	DPP DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
107	Muhamad Fauzul Adzim, S.H., M.H.	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KAB. BOGOR
108	Sherena Octaria, S.H.	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KAB. BANDUNG
109	Elianta Ginting, SH.MH	Perempuan	DPP DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
110	Wiwik Winarsih	Perempuan	DPP DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
111	SYAIFUL MA ARIF, S.H.	Laki-laki	LOIR	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA
112	Bayu Propesta, SH	Laki-laki	DPC Cirebon	-	-
113	Sudiyono Akbar, S.H. M.H, M.A.P.	Laki-laki	PERKUMPULAN PENASIHAT & KONSULTAN HUKUM INDONESIA	JAWA BARAT	KAB. CIREBON
114	Ikhsyan Suprasetya, SH	Laki-laki	DPC DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
115	Agung M. Akbar Gunawan, SH	Laki-laki	DPP DKI Jakarta	-	-
116	Marc Duphariandi, SH	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR
117	DENI MUNAWAR, S.H.	Laki-laki	ANGGOTA	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG
118	Siti Khatijah, SH	Perempuan	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA
119	Deasy Anna Victorina, S, SH	Perempuan	DPP DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
120	Azimatun, SH	Perempuan	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
121	Prihatin Kusdini, SH.MH	Perempuan	DPP DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
122	Yudha Adhi Oetomo, SH MH CLA	Laki-laki	DPP DKI Jakarta	-	-
123	RATNA HERLINA SURYANA, SST. PAR. S.H., M.H.	Perempuan	DPP DKI Jakarta	-	-
124	Dr. Kurnia Zakaria, S.H., M.S.	Laki-laki	PERHAKI DPP DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
125	Syafruddin, S.T., S.H.	Laki-laki	DPNI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
126	Daniel Mubarach, S.H.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
127	Sindya A.M.	Perempuan	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
128	Jasmine Salsabila Mulya	Perempuan	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
129	Rezzy Akbar Yudoprakoso, S.H.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
130	Moh Mahdi, SH .	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA
131	Sapto Wibowo Sutanto, S.H	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU

132	Ruben Fritson, S.H.	Laki-laki	PERHAKHI DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
133	RAMADANI RAHMAN, S.E	Laki-laki	PERHAKI	-	-
134	PITRA ROMADONI NASUTION, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP PERHAKHI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT
135	Ana Sofa Yukung, S.H., M.H.	Perempuan	DPN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
136	Arteria Dahlan, S.T., S.H.,M.H.	Laki-laki	PERADI DPC Jakarta Selatan	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
137	Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
138	Tina Haryaningsih Tamher, S.H., M.H.	Perempuan	PERADIN	-	-
139	Dr. Hendrik Eddy Purnomo, S.H., M.H., ACI Arb., C.Med.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
140	Stefani Widyastuti	Perempuan	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
141	Prija Aji Satriaji	Laki-laki	PERADIN	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
142	M. Oryzha Al Ghazali, S.H., M.H.	Laki-laki	PERHAKI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
143	Rohadi, S.H.	Laki-laki	DPNI	-	-
144	Yuda Aditia Ma Atfa, S.H.	Laki-laki	PERHAKHI	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK TIMUR
145	Muhammad Dzigirullah	Laki-laki	BPW Sumatera Selatan	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA
146	Taufik Hidayat, S.H.	Laki-laki	PERHAKI DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
147	Yusron Hidayat, S.H.	Laki-laki	DPNI	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG
148	Anang Susanto, S.H.	Laki-laki	PERADIN BPW DKI Jakarta	JAWA BARAT	KAB. BEKASI
149	Firdaus, S.H.	Laki-laki	BPW PERADIN DKI Jakarta	JAWA BARAT	KAB. BEKASI
150	Mulih, S.H.	Laki-laki	BPW DKI Jakarta Peradin	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT
151	Aryo Tyasmoro, S.H.	Laki-laki		-	-
152	Jeance Jolanda Loppies, SH	Perempuan	DPD Maluku	MALUKU	KOTA AMBON
153	Sandra Tetelepta, SH	Perempuan	DPD Maluku	MALUKU	KAB. MALUKU
154	SUPENDI, S.H., M.H., CLA.	Laki-laki	BPW PERADIN Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG
155	Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H.	Laki-laki	DPC Bekasi	D.K.I. JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU
156	NURUL HUDAH, S. E., S. H., M. H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur Peradin	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
157	Dr Robby Dareho, S.H., M.Th.	Laki-laki	DPP DKI Jakarta	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
158	Arnold Pohan, S.H.	Laki-laki	DPNI	-	-
159	Rina Tauran, SH.MH	Perempuan	PERKUMPULAN PENASIHAT & KONSULTAN HUKUM INDONESIA	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
160	Angelieke Jeanette, SH. MH	Perempuan	PERHAKHI	JAWA BARAT	KOTA DEPOK



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN ORGANISASI ADVOKAT TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN I

NOMOR : 48/PK/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua puluh** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nanang Subekti**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia, Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia berkedudukan di alamatnya masing-masing, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Organisasi Advokat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 40 (empat puluh) orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia;
 - 40 (empat puluh) orang pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia;
 - 40 (empat puluh) orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia;
 - 40 (empat puluh) orang pengurus dan/atau anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **14 Oktober 2024**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **14 Oktober 2024**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Nanang Subekti
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Organisasi Advokat

Dr. Syaiful Ma'arif, S.H., CN.
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat
Indonesia

Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Penasihat Dan
Konsultan Hukum Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan
Advokat Indonesia

Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.
Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia